

# Pengantar Teori dan Metode Penelitian Budaya

Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

# Pengantar Teori dan Metode Penelitian Budaya

Indra Tjahyadi  
Sri Andayani  
Hosnol Wafa



## PENGANTAR TEORI DAN METODE PENELITIAN BUDAYA

Penulis :

Indra Tjahyadi, Sri Andayani, Hosnol Wafa

Editor:

Adi Sutrisno, S.S., M.Hum.

Nuril Hidayati, S.Fil, M.Phil.

Desain Sampul/ Tata Letak

Syska Liana

Diterbitkan oleh PAGAN PRESS

Dusun Tanjungwetan, RT/RW 001/001 No 35 Desa Munungrejo,

Kec . Ngimbang, Lamongan

Telp 081-335-682-158 email: penerbitpaganpress@gmail.com

Bekerjasama

Fakultas Sastra dan Filsafat Universitas Panca Marga Probolinggo

Cetakan pertama, November 2020

Halaman : x + 162

Ukuran : 15 cm x 21 cm

ISBN : 978-623-6910-06-1

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All rights reserved

# Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses penyelesaian modul ini, terutama pada rekan-rekan dosen di lingkungan Universitas Panca Marga Probolinggo yang telah menyediakan waktunya untuk berdiskusi dengan kami. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Terima kasih.

*Probolinggo, 13 November 2020*

**Penyusun**



# Prakata

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Referensi *Pengantar Teori dan Metode Penelitian Budaya* ini. Buku ini disusun berdasarkan beberapa diskusi dan penelitian yang telah kami lakukan selama tiga tahun ini. Beberapa kendala memang pernah hadir dalam proses penyusunan buku ini. Namun, puji syukur pada Tuhan YME, akhirnya kami mampu menyelesaikan buku ini.

Kami menyadari jika di dalam penyusunan buku ini mempunyai kekurangan, namun penulis meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap akan memberikan sebuah manfaat bagi pembaca.

Akhir kata untuk penyempurnaan buku ini, maka kritik dan saran dari pembaca sangatlah berguna untuk penulis kedepannya.●

*Probolinggo, 13 November 2020*

**Penyusun**





# Daftar Isi

<b>Ucapan Terima Kasih.....</b>	<b>v</b>
<b>Prakata.....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>ix</b>
<b>Bab I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
<b>Bab II Hakikat Ilmu Pengetahuan.....</b>	<b>3</b>
A. Pengertian Pengetahuan.....	3
B. Pengertian Pengetahuan Ilmiah.....	5
C. Objek Ilmu Pengetahuan.....	6
D. Sifat Ilmu Pengetahuan.....	8
E. Unsur-Unsur Ilmu Pengetahuan.....	10
<b>Bab III Hakikat Kebudayaan.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Kebudayaan.....	15
B. Lapisan Kebudayaan.....	19
C. Unsur-Unsur Kebudayaan.....	23
D. Fungsi Kebudayaan.....	26
E. Sifat Kebudayaan.....	27
F. Teori Pembentukan Kebudayaan.....	29
<b>Bab IV Kearifan Lokal.....</b>	<b>34</b>
A. Pengertian Budaya Lokal.....	34
B. Pengertian Kearifan Lokal.....	35
C. Fungsi Kearifan Lokal.....	38

<b>Bab V Teori Budaya</b> .....	41
A. Teori Fungsionalime-Struktural.....	41
B. Teori Interaksionisme Simbolik.....	48
C. Teori Ekologi Kebudayaan.....	55
D. Teori Semiotika Budaya.....	63
E. Teori Representasi.....	73
<b>Bab VI Paradigma Penelitian Budaya</b> .....	80
A. Pengertian Penelitian.....	80
B. Perspektif Penelitian Budaya.....	81
C. Paradigma Ilmu Budaya.....	82
<b>Bab VII Metodologi Penelitian Budaya</b> .....	107
A. Metode Ilmiah.....	107
B. Metode Fenomenologi Budaya.....	109
C. Metode Etnografi.....	116
<b>Bab VIII Model Penelitian Etnografi</b> .....	124
Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Pandalungan Probolinggo.....	124
<b>Bab IX Model Penelitian Semiotika Budaya</b> .....	145
Representasi Pobolinggo dalam Seni Pertunjukan Kelabang Songo.....	145
<b>Biodata Penulis</b> .....	162

# BAB I

## PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan sesuatu yang kompleks dan dinamis. Perkembangan kehidupan manusia makan berdampak pada timbulnya perkembangan dalam kebudayaan manusia. Perkembangan tersebut dapat berupa hadirnya bentuk-bentuk kebudayaan baru atau meningkatkan tingkat kebutuhan hidup manusia sehingga menciptakan kompleksitas baru dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya untuk memahami kebudayaan harus terus dilakukan.

Pemahaman-pemahaman baru mengenai kebudayaan dapat diciptakan apabila pengembangan keilmuan kebudayaan terus dilakukan. Pengembangan terus akan menghasilkan penemuan-penemuan baru, teori-teori baru, dan makna-makna baru atas keilmuan kebudayaan. Pengembangan terus memiliki manfaat sebagai medium yang dapat membantu manusia dalam memahami, dan pada akhirnya, mengembangkan kebudayaan dan peradaban yang dimilikinya. Oleh karena itu, berbagai penelitian kebudayaan perlu dilakukan.

Dalam melakukan pengembangan keilmuan kebudayaan perlu dilakukan penelitian. Penelitian adalah kegiatan atau aktivitas pengembangan keilmuan. Namun, penelitian tidak

dapat dilakukan secara asal-asalan. Perlu pemahaman dan pengetahuan dalam penelitian sehingga dapat menghasilkan pengetahuan yang benar. Dalam rangka hal tersebut, buku ini disusun, yakni memberikan pemahaman dan pengetahuan bagaimana mengembangkan keilmuan di bidang kebudayaan sehingga dapat menghasilkan pengetahuan kebudayaan yang benar, sah, dan tidak bias.●

# BAB II

## HAKIKAT ILMU PENGETAHUAN

### A. PENGERTIAN PENGETAHUAN

Penelitian merupakan cara manusia untuk memproduksi pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah salah satu jenis pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Menurut Poedjawijatna (1983: 14) pengetahuan dapat didefinisikan sebagai hasil tahunya manusia atas sesuatu. Adapun Soehartono (2004: 77) mendefinisikan pengetahuan sebagai hasil dari kegiatan ingin tahu manusia tentang berbagai hal melalui berbagai cara dan dengan berbagai alat tertentu. Berdasarkan dua definisi pengetahuan tersebut tampak bahwa pengetahuan adalah produk khas manusia. Tidak ada makhluk hidup lain di alam semesta ini yang memproduksi pengetahuan. Namun, apakah yang disebut tahu itu? Mengapa hanya manusia yang dapat memproduksi pengetahuan?

Tahu adalah segala hal yang diketahui keberadaannya oleh akal manusia. Dikatakan segala hal karena objek tahu manusia itu memiliki kategori yang sangat luas. Menurut Poedjawijatna (1983: 11) objek tahu manusia adalah segala hal yang ada dan mungkin ada. Itu berarti objek tahu manusia meliputi segala hal yang keberadaannya dapat ditangkap oleh panca indera dan segala

hal yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia, tetapi keberadaannya diterima oleh akal manusia sebagai sesuatu yang diketahui. Maka, tahu manusia itu merupakan kategori yang sangat luas dan kompleks.

Pengetahuan hanya dapat diproduksi apabila makhluk tersebut memiliki akal aktif. Tanpa akal aktif berbagai hal yang ditangkap oleh makhluk tersebut tidak dapat diolah menjadi sesuatu yang berguna bagi dirinya. Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup di alam semesta yang memiliki akal aktif. Akal aktif ini berguna bagi manusia untuk mengatasi berbagai halangan atau kendala yang hadir dalam kehidupannya. Akal aktif ini juga memungkinkan manusia untuk melakukan kreasi dan rekreasi atas berbagai hal yang telah diterimanya. Oleh karena itu, Aristoteles (385—322 SM), seorang filsuf Yunani kuno, menyebut manusia sebagai *animale rationale* (mahluk rasional atau mahluk berpikir) (Suhartono, 2004: 37—44).

Namun, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, tidak semua pengetahuan yang diproduksi akal aktif manusia dapat dikategorikan sebagai pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan. Menurut Setiawan dkk (2014: 11) pengetahuan manusia dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yakni: pengetahuan pra-ilmiah, pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan filsafat. Pengetahuan pra-ilmiah berbeda dengan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan pra-ilmiah adalah pengetahuan biasa atau suatu pengetahuan yang muncul karena adanya kegiatannya akan sehat manusia terhadap kegiatan manusia yang ada di hadapannya. Pengetahuan ini disebut pengetahuan umum atau pengetahuan biasa (*ordinary knowledge*).

Pengetahuan kedua yang dimiliki oleh manusia adalah

pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang lebih sempurna dibandingkan dengan pengetahuan umum atau pengetahuan biasa. Hal tersebut disebabkan pembentukan pengetahuan ini melibatkan berbagai prosedur yang kompleks. Terdapat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan cara berpikir tertentu agar pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dapat dikategorikan sebagai pengetahuan ilmiah. Oleh karena itu, pengetahuan ini memiliki tingkat pembentukan yang lebih kompleks dibandingkan pengetahuan umum atau pengetahuan biasa (Setiawan dkk, 2014: 11).

Pengetahuan filsafati adalah jenis pengetahuan ketiga yang dimiliki oleh manusia. Pengetahuan ini berisi hal-hal yang bersifat hakiki atau esensial atas objek yang dipikirkan atau dikenali dan diketahui manusia. Pengetahuan ini dibentuk melalui cara analisis, pemahaman, deskripsi, penilaian, penafsiran, dan perekaan dengan menggunakan akal sehat manusia. Pengetahuan ini lebih bersifat spekulatif karena hanya didasarkan sistem berpikir rasional saja (Setiawan dkk, 2014: 11).

Sampai di sini, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah produk khas manusia, karena pengetahuan hanya dapat diproduksi oleh makhluk yang memiliki akal aktif. Namun, tentunya, masih terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam pikiran kita, seperti: apakah yang disebut pengetahuan ilmiah, bagaimanakah pengetahuan ilmiah, dan mengapakah dibutuhkan pengetahuan ilmiah dalam kehidupan manusia?

## **B. PENGERTIAN PENGETAHUAN ILMIAH**

Pengetahuan ilmiah biasa dikenal dengan nama ilmu pengetahuan. Sebagaimana telah disampaikan pada subbab

sebelumnya bahwa Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang lebih sempurna dibandingkan dengan pengetahuan umum atau pengetahuan biasa. Hal tersebut disebabkan pembentukan pengetahuan ini melibatkan berbagai prosedur yang kompleks. Terdapat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan cara berpikir tertentu agar pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dapat dikategorikan sebagai pengetahuan ilmiah. Oleh karena itu, pengetahuan ini memiliki tingkat pembentukan yang lebih kompleks dibandingkan pengetahuan umum atau pengetahuan biasa (Setiawan dkk, 2014: 11).

Ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah dapat dipahami sebagai pengetahuan yang bertujuan mencapai kebenaran ilmiah tentang objek tertentu, yang diperoleh melalui pendekatan atau cara pandang (*approach*), metode (*method*), dan sistem tertentu. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan adalah akumulasi pengetahuan yang menjelaskan hubungan sebab-akibat yang hakiki dan universal atas suatu objek menurut metode tertentu dan sistem tertentu yang merupakan satu kesatuan yang sistematis. Pengetahuan jenis ini diciptakan oleh manusia karena adanya dorongan dari rasa ingin tahu yang tidak berkesudahan atas objek, pikiran atau akal budi yang menyangsikan pencerapan indera yang dianggap memiliki kemampuan untuk menyesatkan akal budi atau akal sehat manusia. Maka, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang memungkinkan manusia untuk mencapai kebenaran yang sah (Rusidi, 1993: 4; Suhartono, 2004: 96--97; Setiawan, 2014: 13).

### **C. OBJEK ILMU PENGETAHUAN**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pengetahuan ilmiah merupakan produk dari hasil aktivitas manusia dalam upayanya



untuk memahami objek tertentu dengan menggunakan metode, sistem, dan pendekatan tertentu. Itu berarti setiap pengetahuan ilmiah atau setiap ilmu pengetahuan memiliki objeknya. Objek inilah yang membedakan antara satu ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan lainnya.

Menurut Suhartono (2004: 97) ilmu pengetahuan memiliki dua objek yang saling berkaitan satu sama lainnya, yakni objek material dan objek formal. Secara definitif, objek material dapat dipahami sebagai sasaran material suatu penyelidikan, pemikiran, atau penelitian keilmuan. Objek material dapat berupa benda-benda material maupun yang non-material. Selain itu, objek material juga dapat berupa hal-hal, masalah-masalah, ide-ide, ataupun konsep-konsep. Dengan kata lain, objek material tidak terbatas pada apakah ada di dalam realitas konkret atau di dalam realitas abstrak (Suhartono, 2004: 98).

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa selain objek material, sebuah ilmu pengetahuan juga memiliki objek formalnya. Objek formal adalah pusat perhatian atau *focus of interest*. Menurut Suhartono (2004: 98) objek formal adalah cara pandang yang digunakan untuk memahami objek material. Cara pandang ini memiliki berbagai macam jenis bergantung pada segi yang ingin dipahami oleh seseorang atas objek material yang sedang diselidikinya. Objek formal inilah yang memberikan perbedaan dan kekhasan antara satu ilmu dengan ilmu pengetahuan lainnya. Sebagai contoh, antara ilmu kedokteran, ilmu sosial, dan ilmu budaya memiliki objek material yang dapat dikatakan sama, yakni manusia.

Namun, antara ilmu kedokteran, ilmu sosial, dan ilmu budaya menjadi berbeda ketika dikaitkan dengan cara pandang yang dimiliki oleh masing-masing ilmu tersebut. Ilmu kedokteran

memiliki objek formal atau cara pandang fisis terhadap manusia. Adapun ilmu sosial memandang manusia dalam segi keberadaannya dalam kaitannya dengan masyarakat. Sedangkan, ilmu budaya, melihat atau mendekati manusia dengan memfokuskan cara pandangnya sebagai subjek pencipta budaya yang memiliki pola perilaku maupun berpikir yang khas sesuai sistem budaya yang dimiliki. Itulah, ilustrasi yang memperlihatkan bahwa perbedaan objek formal menghasilkan perbedaan keilmuan.

#### **D. SIFAT ILMU PENGETAHUAN**

Ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah memiliki sifat-sifat yang khas, yang menandai keberadaannya dan membedakannya dari pengetahuan biasa. Menurut Poedjawijatna (1983: 13—16) ilmu pengetahuan memiliki sifat-sifat sebagai berikut.

##### **1. Berobjek**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa setiap ilmu pengetahuan pasti memiliki objek. Objek ini adalah sesuatu yang menjadi fokus bagi pengamatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Maka, tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak memiliki sebuah objek yang diamati.

##### **2. Bermetode**

Metode merupakan sifat kedua ilmu pengetahuan. Metode adalah suatu cara atau sistem dalam ilmu untuk memperoleh kebenaran faktawi. Adanya metode memungkinkan sebuah ilmu pengetahuan untuk divalidasi kebenarannya, atau dipertanggungjawabkan kebenarannya.

##### **3. Universal**

Ilmu pengetahuan memiliki sifat universal. Itu berarti sebuah pengetahuan ilmiah dapat diterapkan di berbagai tempat.

Memang, sebuah ilmu pengetahuan dikembangkan dalam tataran induktif. Namun, hasilnya tetap harus mengandaikan universalitas, sehingga terdapat asas-asas umum yang dapat berlaku di berbagai tempat dengan kasus yang serupa.

#### **4. Bersistem**

Adanya metode sebagai sifat ilmu pengetahuan menandakan bahwa ilmu pengetahuan juga memiliki sistem tertentu. Agar sistem dapat berjalan, seseorang yang ingin memproduksi ilmu pengetahuan harus mampu berpikir sistematis. Berpikir secara sistematis adalah berpikir yang bertujuan untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang saling berhubungan, rasional, konsepsional dan memenuhi syarat untuk memahami dunia tempat manusia hidup mauoun untuk memahami diri manusia sendiri. Dalam berpikir secara sistematis ini, bagian yang satu dengan bagian yang lain saling berhubungan dan semua bagian merupakan kesatuan serta kebulatan, tidak boleh dipisah-pisah ataupun terpisah, serta tidak boleh berdiri sendiri-sendiri (Suhartono, 2004: 61--62).

Berpikir secara sistematis senantiasa mengandaikan adanya keruntutan. Maka, berpikir secara filsafat bukan saja berpikir secara radikal dan sistematis, juga berarti berpikir secara koheren. Berpikir secara koheren, merujuk Suhartono (2004: 63), adalah berpikir tanpa meloncat-loncat, tanpa kekacauan, dan tidak mengandung kontradiksi. Dalam koherensi, tidak boleh ada pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan.

Contoh:

Hujan turun

Tidak benar bahwa hujan turun

Pernyataan yang pertama yang berbunyi “Hujan turun” bertentangan dengan pernyataan yang kedua, “Tidak benar bahwa hujan turun,,” begitu juga sebaliknya. Dalam berpikir secara koherensi hal ini tidak dibenarkan. Karena kedua pernyataan ini saling bertentangan. Jadi, dalam berpikir secara koherensi, pernyataan-pernyataan yang ada haruslah saling mendukung dan tidak boleh mengandung pertentangan-pertentangan (Kattsoff, 2004: 9).

Koherensi mengandung kebenaran logis. Kebenaran logis ini menuntut seorang filsuf untuk terus mendasarkan kegiatannya pada kerja logika. Kerja logika ini membuat berpikir secara filsafat tidak lain adalah berpikir secara logis. Berpikir secara logis, Rapar (1996: 23) menyatakan, bukan hanya berarti bahwa pengertian-pengertiannya dapat diterima akal sehat, tetapi juga agar sanggup menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar dari premis-premis yang digunakannya. Oleh karena itu, berpikir logis juga merupakan bagian penting dari berpikir secara filsafat. Dengan berpikir sebuah kebenaran yang dihasilkan oleh kerja berpikir dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## **E. UNSUR-UNSUR ILMU PENGETAHUAN**

Sebagai sebuah bangunan yang dibentuk oleh pengetahuan manusia, ilmu pengetahuan memiliki unsur-unsur pembangunnya. Menurut Soehartono (2008: 4) unsur pembangun ilmu pengetahuan yang pertama adalah *konsep*. Konsep merupakan istilah, dan dapat dipahami sebagai gambaran mental atau persepsi. Secara definitif, konsep adalah satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide

(gagasan) tertentu (Suhartono, 2008: 4).

Konsep ada yang memiliki tingkat abstraksi yang tinggi, tetapi ada pula yang memiliki tingkat abstraksi yang rendah. Konsep yang dapat secara langsung ditemukan oleh panca indera manusia merupakan konsep yang berkategori memiliki tingkat abstraksi yang rendah. Menurut Suhartono (2008: 4) sebuah konsep dikatakan memiliki tingkat abstraksi yang rendah apabila konsep tersebut dapat dengan mudah dicerap atau ditemukan oleh panca indera manusia. Konsep yang demikian tersebut tidak memerlukan pengolahan pada tataran akal yang lebih. Oleh karena itu, konsep tersebut dikatakan sebagai konsep dengan tingkat abstraksi yang rendah.

Konsep "Buku" merupakan contoh konsep yang memiliki abstraksi yang rendah. Hal itu disebabkan tidak saja karena buku merupakan konsep yang telah berwujud bendawi, tetapi juga secara empiris dapat dengan mudah ditemukan keberadaannya oleh panca indera manusia. Maka, ketika seseorang dihadapkan pada permasalahan mengenai konsep "buku", seseorang tersebut dapat mudah memecahkan permasalahan tersebut, yakni dengan cara memberikan jawabannya dengan menghadirkan benda "buku".

Hal tersebut akan berbeda apabila seseorang dihadapkan pada permasalahan mengenai konsep perilaku yang terdapat dalam sebuah masyarakat. Pemecahan permasalahan mengenai konsep perilaku tersebut tidak dapat dipecahkan begitu saja dengan kemampuan empiris manusia. Pemecahan permasalahan yang terkait dengan perilaku tersebut harus juga melibatkan kemampuan rasional manusia. Itu disebabkan perilaku seseorang tidak hanya ditentukan oleh berbagai hal yang bersifat fisis

seperti lingkungan kebendaan, tetapi juga melibatkan pola pikir yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan tersebut memiliki tingkat abstraksi yang tinggi.

Menurut Soehartono (2008: 4—5) sebuah konsep dikatakan memiliki tataran atau tingkatan abstraksi yang tinggi apabila konsep tersebut tidak dapat secara langsung ditemukan oleh panca indera manusia. Konsep dengan tingkat abstraksi tinggi merupakan konsep yang dibuat untuk memberikan nama pada berbagai gejala dengan ciri-ciri tertentu. Konsep dalam tingkatan ini disebut juga *variabel laten*, yakni sebuah variabel yang merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati, tetapi dianggap sebagai dasar dari variabel yang dapat diamati.

Selain tingkat abstraksi yang dimiliki, konsep juga dapat dibedakan berdasarkan nilai yang dimilikinya. Konsep yang memiliki dua nilai atau lebih pada satu kontinum disebut *variabel*. Adapun konsep yang hanya memiliki satu nilai disebut konsep saja. Sebagai contoh, konsep warna “merah”. Warna “merah” merupakan konsep, tetapi konsep tentang “tingkat kemerahan” sebuah warna merah merupakan variabel. Itu karena dalam tingkatannya, warna “merah” dapat dibedakan nilainya antara warna “merah tua” dengan warna “merah muda”.

Variabel juga dapat dibedakan berdasarkan sifat nilainya. Pertama, *variabel kategorik* atau *diskret*. Menurut Surhartono (2008: 5) *variabel kategorik* adalah variabel yang dibagi menjadi golongan-golongan atau kategori-kategori dengan ciri-ciri tertentu untuk setiap golongan atau kategori. Agama dan jenis kelamin merupakan contoh dari variabel tersebut. Adapun variabel kontinyu adalah variabel kedua. *Variabel kontinyu* adalah variabel yang dapat mengambil nilai pecahan sehingga antara

dua nilai bulat yang berdekatan tidak terputus tetapi masih ada nilai-nilai secara bersambung.

Berdasarkan kemampuannya untuk dimanipulasi, variabel dapat dibedakan menjadi *variabel aktif* dan *variabel atribut*. Variabel aktif disebut juga variabel nonsubjek. Variabel aktif adalah variabel yang dapat dimanipulasi. Pada variabel aktif, seorang peneliti secara aktif memanipulasi variabel metode, penguatan, dan kecemasan. Pada variabel ini seorang peneliti dapat melakukan sesuatu yang menyangkut variabel tersebut pada sekelompok orang dan melakukan hal lain pada kelompok lain atau memberikan instruksi yang berlainan pada kedua kelompok tersebut atau peneliti menggunakan metode pembelajaran yang berbeda, atau memberikan imbalan kepada subyek-subyek dalam kelompok lain, atau menciptakan kecemasan dengan instruksi-instruksi yang meresahkan (Suhartono, 2008: 5).

Berbeda dengan variabel aktif, variabel atribut adalah variabel yang tidak dapat dimanipulasi. Variabel ini disebut juga variabel subjek. Pada variabel ini, seorang peneliti tidak dapat melakukan perubahan yang menyangkut variabel tersebut pada subjek penelitian. Variabel ini berupa variabel yang sudah melekat dan merupakan ciri dari subyek penelitian. Misalnya: Intelegensi, bakat jenis kelamin, status sosial-ekonomi, sikap, daerah geografis suatu (Suhartono, 2008: 5—6).

Selain konsep, unsur ilmu pengetahuan berikutnya adalah proposisi. Menurut Suhartono (2008: 6) *proposisi* dapat dipahami sebagai pernyataan tentang sebuah konsep atau lebih. Proposisi yang masih bersifat sementara dan harus diuji kebenarannya disebut *hipotesis*. Hipotesis tersebut dapat berupa jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, hipotesis

harus disusun dan dirumuskan dalam bentuk yang dapat diuji secara empirik.

Unsur ilmu yang ketiga adalah fakta. Fakta adalah suatu keadaan, hal, ataupun peristiwa yang benar-benar telah terjadi atau nyata. Fakta berupa segala sesuatu yang diterima oleh indera manusia atau keadaan nyata. Fakta dapat dikenali oleh peneliti sebagai suatu hasil pengamatan yang objektif dan dapat diverifikasi oleh siapapun. Menurut Suhartono (2008: 6—7) fakta merupakan bahan terbentuknya data. Data adalah hasil pengamatan peneliti atas fakta yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan. Data atas fakta dapat berupa bahan verbal ataupun visual, dan juga dapat berupa angka.

Teori adalah unsur ilmu yang keempat. Teori adalah proposisi yang memberikan gambaran penjelasan atas suatu gejala. Teori memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Dalam teori, senantiasa, terdapat rumusan atas relasi sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Teori dapat berfungsi sebagai ramalan atas terjadinya suatu gejala (Suhartono, 2008: 6).●



# BAB III

## HAKIKAT KEBUDAYAAN

### A. PENGERTIAN KEBUDAYAAN

Upaya untuk mengungkap fenomena kebudayaan tidak dapat dilakukan apabila seorang peneliti tidak memahami atau mengetahui definisi kebudayaan. Tanpa pengetahuan atau pemahaman mengenai definisi kebudayaan, seorang peneliti kebudayaan dapat, tidak saja mengalami kebingungan, tetapi juga kesalahan dalam melakukan penelitian kebudayaan. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman mengenai kebudayaan secara definitif menjadi bekal pertama yang harus dimiliki oleh peneliti kebudayaan agar tidak mengalami kesesatan analisis.

Secara etimologis, kata *budaya* atau *kebudayaan* yang terdapat dalam khazanah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhayah*. Kata tersebut merupakan bentuk jamak dari kata Sansekerta *buddhi* yang berarti budi atau akal. Secara umum, kata tersebut juga dapat diartikan sebagai “hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia”. Adapun dalam bahasa Inggris, kata *kebudayaan* atau *budaya* disebut *culture*. Secara etimologis, kata *culture* tersebut berasal dari kata dalam bahasa Latin *colere* yang berarti “mengolah atau mengerjakan”, atau “mengolah tanah atau bertani”. Dalam

bahasa Indonesia, kata *culture* tersebut diterjemahkan sebagai *kultur*. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan kedekatan pemahaman dengan logika kata *culture* dalam bahasa Inggris (Koentjaraningrat, 2015: 146; Seokanto& Sulistyowati, 2015: 168; Tjahyadi dkk, 2019: 3).

Namun, upaya untuk memahami arti kata atau konsep *kebudayaan* berdasarkan tataran etimologi saja tidaklah cukup. Tataran etimologi hanya memberikan gambaran parsial mengenai kebudayaan. Hal tersebut disebabkan kata *kebudayaan* merupakan sebuah konsep yang kompleks. Kompleksitas tersebut karena kata kebudayaan tidak hanya merujuk kepada hal-hal yang fisis dalam kehidupan manusia bermasyarakat, tetapi juga hal yang bersifat konseptual atau batiniah. Oleh karena itu, perlu pengelaborasi lebih mendalam mengenai konsep atau makna yang terdapat di balik kata kebudayaan.

Kompleksitas konsep yang berada di balik kata kebudayaan tampak pada pendefinisian dan pengartian yang diberikan kepada kata tersebut. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) (2020), misalnya, kata *kebudayaan* diartikan sebagai *hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat*. Dalam pengartian kata yang diberikan oleh KBBI tersebut dapat dipahami bahwa yang termasuk dalam kebudayaan adalah, tidak saja, tindakan manusia yang dihasilkan dalam sebuah kegiatan, tetapi hasil dari tindak penciptaan batin manusia. Namun, hasil kegiatan dan penciptaan batin apa sajakah yang termasuk dalam kebudayaan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya, kita menelisik kembali definisi atau pengertian kebudayaan yang diberikan oleh Koentjaraningrat. Dengan merujuk pada

perspektif keilmuan Antropologi, Koentjaraningrat (2015: 144) mendefinisikan kebudayaan sebagai *keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar*. Berdasarkan definisi tersebut, tampak bahwa seluruh produk yang dihasilkan manusia, baik yang konseptual atau fisis, dapat dikategorikan sebagai kebudayaan. Itu berarti kebudayaan tidak hanya berbagai hal yang memiliki wujud fisis, tetapi juga yang bersifat metafisis juga dapat dikategorikan sebagai kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan adalah sebuah konsep yang kompleks.

Kompleksitas konsep kebudayaan juga tampak pada definisi kebudayaan yang diberikan oleh seorang Antropolog abad 19, kelahiran Inggris, E.B. Taylor (1832—1917). Menurut Taylor (dalam Soekanto & Sulistyowati, 2015: 148) kebudayaan merupakan kompleksitas yang tidak saja mencakup pengetahuan, ataupun kesenian, tetapi juga kepercayaan, moral, adat, hukum, moral, bahkan berbagai kemampuan dan kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Itu berarti segala hal yang dimiliki manusia sebagai anggota masyarakat dapat dikategorikan sebagai kebudayaan. Mencermati pernyataan tersebut, tidak mengherankan, apabila Barker (2014: 64) menyatakan bahwa kebudayaan adalah sebuah konsep yang rumit.

Namun, itu tidak berarti, sifat esensial dari kebudayaan tidak dapat dikenali, diketahui, atau dipahami. Menurut Soekanto & Sulistyowati (2015: 157) sifat hakikat kebudayaan dapat direduksi menjadi empat faktor penciri, yakni:

1. Faktor kebudayaan yang terlapisan dan tersalurkan melalui perilaku manusia.
2. Faktor kebudayaan yang telah ada terlebih dahulu

dan mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.

3. Faktor kebudayaan yang dibutuhkan dan dilapiskan oleh manusia melalui tingkah lakunya.
4. Faktor kebudayaan yang mencakup berbagai aturan yang berisi tentang kewajiban, tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang diizinkan, dan tindakan-tindakan yang dilarang.

Untuk mendapatkan kelengkapan pemahaman mengenai kebudayaan, berikut pengertian kebudayaan menurut para ahli.

- a. Clifford Geertz (dalam Tasmuji dkk, 2011: 154) mendefinisikan kebudayaan sebagai suatu sistem makna dan simbol yang disusun yang dalamnya mengandung pemahaman bagaimana setiap individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-penilaiannya, yang pola maknanya ditransmisikan secara historis, dan diwujudkan dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana komunikasi, pengabdian, dan pengembangan pengetahuan. Maka, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik, yang keberadaannya haruslah dibaca, diterjemahkan dan diinterpretasikan.
- b. Edward B. Taylor (dalam Haviland, 1985: 332) memberikan pemahaman bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya termasuk segala pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat.

- c. Ralph Linton (dalam Tasmuji dkk, 2011: 151) memahami kebudayaan sebagai seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan.
- d. Sutan Takdir Alisyahbana (dalam Rafiek, 2012: 8) berpendapat bahwa kebudayaan adalah manifestasi dari cara berpikir manusia.
- e. Zoet Mulder (dalam Rafiek, 2012: 10) memberikan pernyataan bahwa kebudayaan dapat dipahami sebagai perkembangan berbagai kemungkinan kekuatan kodrat, terutama kodrat manusia di bawah pembinaan akal budi.
- f. Alfred North Whitehead (dalam Rafiek, 2012: 10) menyebutkan bahwa kebudayaan dapat dipahami sebagai karya akal budi manusia.
- g. M. Rafiek (2012: 11) berpendapat bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang harus ditemukan sebagai sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada, sesuatu yang harus dialihkan dari generasi ke generasi, dan sesuatu yang harus diabadikan keasliannya atau dalam bentuk yang dimodifikasi.

## **B. LAPISAN KEBUDAYAAN**

Kebudayaan memiliki lapisan-lapisan dalam bangunannya. Menurut Koentjaraningrat (2015: 152) lapisan-lapisan tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Lapisan-lapisan tersebut membentuk kesatuan dan keutuhan bangunan kebudayaan. Oleh karena itu, upaya untuk memahami dan mengungkap kebudayaan harus juga meliputi upaya untuk memahami dan mengungkap lapisan-lapisan tersebut.

Menurut Endraswara (2017: 5) lapisan kebudayaan terdiri atas tiga lapisan, yakni: lapisan kognitif, lapisan evaluatif, dan lapisan simbolik. Lapisan kognitif adalah lapisan kebudayaan yang bersifat abstrak atau konseptual. Lapisan ini berwujud gagasan, pandangan hidup, pengetahuan, ataupun wawasan komologis yang dimiliki oleh sebuah masyarakat.

Adapun lapisan evaluatif adalah lapisan yang memberi aturan pada lapisan kognitif sehingga memiliki pola yang dapat dikenali. Lapisan tersebut menyangkut nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam kebudayaan sebuah masyarakat. Lapisan ini memiliki fungsi untuk mengatur sikap dan perilaku setiap anggota dari masyarakat tersebut. Lapisan ini dikenali juga sebagai etika kebudayaan sebuah masyarakat.

Selain lapisan kognitif dan evaluatif, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, kebudayaan juga memiliki lapisan simbolik. Lapisan simbolik dapat dipahami sebagai tataran yang memungkinkan kebudayaan memiliki wujud empiris dan makna. Lapisan ini berfungsi sebagai media interaksi setiap anggota masyarakat dan identifikasi diri sebuah masyarakat. Lapisan berwujud verbal dan visual, seperti bahasa, ataupun benda-benda simbolik lainnya.

Sebagaimana halnya Endraswara, Koentjaraningrat (2015: 150—151) juga membagi kebudayaan menjadi tiga lapisan, yakni lapisan sistem nilai kebudayaan, lapisan sistem sosial, dan lapisan kebudayaan fisik. Lapisan sistem nilai kebudayaan adalah lapisan kebudayaan yang berwujud abstrak. Dikatakan demikian sebab lapisan tersebut berada dalam pikiran setiap anggota masyarakat kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat (2015: 153) lapisan sistem nilai budaya adalah lapisan kebudayaan

yang bersifat sangat umum dan luas, meskipun demikian, lapisan tersebut berada pada hirarki paling tinggi. Hal tersebut disebabkan lapisan tersebut merupakan berbagai konsep yang terdapat dalam pikiran setiap anggota masyarakat yang dianggap bernilai, berharga, dan penting dalam kehidupan, serta membentuk pedoman hidup masyarakat tersebut.

Namun, meski berujud abstrak, lapisan sistem nilai kebudayaan tetap dapat dikenali keberadaannya dalam kebudayaan sebuah masyarakat. Hal tersebut disebabkan keberadaan lapisan sistem nilai budaya termanifestasi dalam ujud adat-istiadat yang terdapat dalam masyarakat. Adat-istiadat merupakan manifestasi dari berbagai norma, pedoman hidup, dan pandangan dunia yang dimiliki oleh sebuah masyarakat. Adat-istiadat memiliki sifat empiris karena dapat dikenali melalui panca indera manusia.

Lapisan kedua yang terdapat bangunan kebudayaan adalah lapisan sistem sosial. Menurut Koentjaraningrat (2015: 151) lapisan sistem sosial adalah lapisan kebudayaan yang bercirikan kegiatan atau aktivitas masyarakat sebuah kebudayaan. Lapisan tersebut terdiri atas aktivitas atau kegiatan manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan secara kontinu dengan sesamanya. Lapisan kebudayaan ini bersifat konkret, bisa difoto, dan bisa dilihat. Misalnya, upacara perkawinan masyarakat Probolinggo. Dalam kegiatan tersebut terkandung perilaku berpola dari individu, yang dibentuk atau dipengaruhi kebudayaannya. Selain itu, upacara perkawinan atau upacara lainnya yang melibatkan suatu aktivitas kontinu dari individu anggota masyarakat yang berpola dan bisa diamati suatu masyarakat. Seperti upacara perkawinan dalam masyarakat yang begitu rumit memperlihatkan pola yang

teratur dan tetap dengan mempergunakan berbagai benda yang dibutuhkan dalam aktivitas tersebut. Secara langsung juga merupakan salah satu contoh lapisan kebudayaan yang berbentuk aktivitas.

Kebudayaan fisik merupakan lapisan ketiga yang terdapat dalam bangunan kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat (2015: 151) lapisanlapisan kebudayaan tersebut merupakan lapisan yang paling konkret, bisa dilihat, dan diraba secara langsung oleh pancaindra. Lapisan kebudayaan fisik berupa objek-objek fisik hasil-hasil kebudayaan manusia berupa tataran sistem ide atau pemikiran ataupun aktivitas manusia yang berpola. Misalnya, berbagai mahar yang terdapat dalam upacara perkawinan masyarakat Probolinggo berupa barang yang harus diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Benda-benda itu merupakan perlapisan dari ide dan aktivitas individu sebagai hasil dari kebudayaan masyarakat. Dalam upacara selamatan, terdapat berbagai sesaji atau peralatan yang dibutuhkan atau digunakan dalam aktivitas tersebut. Selain itu, juga berbagai bentuk arsitektur bangunan yang terdapat di sebuah wilayah kebudayaan juga merupakan contoh kebudayaan fisik.

Seorang arsitek ketika mendesain atau merancang sebuah bangunan, tentunya, berlandaskan pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tempat arsitek tersebut menjadi anggotanya. Oleh karena itu, setiap desain atau rancangan bangunan yang diciptakannya pasti memiliki keberkaitan dengan pengetahuan masyarakat tempat arsitek tersebut hidup.



### **C. UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN**

Selain terdiri atas lapisan-lapisan, kebudayaan juga memiliki unsur-unsur pembangun di dalamnya. Menurut Koentjaraningrat (2015: 164--170) kebudayaan sebagai sebuah bangunan, atau struktur terdiri atas tujuh unsur yang membangunnya. Bahasa merupakan unsur kebudayaan yang pertama.

Bahasa tidak saja merupakan sarana atau media bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan berinteraksi atau berhubungan dengan lingkungan dan sesamanya, tetapi juga sarana atau media bagi manusia untuk memaknai semesta yang ada di sekitarnya. Menurut Jenks (2013: 5) kemampuan simbolik bahasa tidak saja membuat manusia dapat mengenali lingkungan dan sesamanya, tetapi juga memahami dan memaknai lingkungan dan sesamanya. Oleh karena itu, kebudayaan sebagai sebuah realitas atau kenyataan dalam kehidupan manusia dapat dikenali, dipahami, dan dimaknai oleh manusia karena adanya bahasa.

Sistem pengetahuan merupakan unsur kedua yang terdapat dalam kebudayaan. Sistem pengetahuan berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Banyak suku bangsa yang tidak dapat bertahan hidup apabila mereka tidak mengetahui dengan teliti pada musim-musim apa berbagai jenis ikan pindah ke hulu sungai. Selain itu, manusia tidak dapat membuat alat-alat apabila tidak mengetahui dengan teliti ciri-ciri bahan mentah yang mereka pakai untuk membuat alat-alat tersebut. Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam,

tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya.

Unsur budaya yang ketiga adalah sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Setiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat-istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkat-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya.

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bagian dari kebudayaan fisik. Oleh karena itu, unsur keempat kebudayaan adalah sistem teknologi dan peralatan hidup yang terdapat dan diproduksi dalam sebuah sistem kebudayaan oleh sebuah masyarakat.

Unsur kebudayaan yang kelima adalah mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat. Pembentukan sebuah kebudayaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat masyarakat tersebut tinggal. Perbedaan lingkungan

akan menentukan cara bagaimana masyarakat tersebut mempertahankan hidup. Itu berarti juga meliputi unsur ekonomi yang terdapat dalam sebuah masyarakat. Misalnya, antara masyarakat pesisir yang tinggal di tepi pantai dengan masyarakat petani yang tinggal jauh dari tepi pantai terdapat perbedaan aktivitas ekonomi. Masyarakat pesisir memiliki mata pencaharian yang dapat mendukung keberlangsungan kehidupan mereka dengan mengandalkan hasil yang didapatkan dari laut. Hal tersebut karena laut lebih berada lebih dekat dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat pesisir.

Hal tersebut berbeda dengan masyarakat petani. Masyarakat petani ladang tidak mengandalkan kehidupannya dari hasil laut. Ketidakmungkinan untuk mengakses laut yang disebabkan letak yang mungkin sangat jauh atau bahkan tidak ada, membuat petani ladang lebih mengandalkan hidupnya pada hasil yang didapatkan dari aktivitas ekonomi mereka mengolah tanah dan sawah. Oleh karena itu, mata pencaharian mereka bukanlah nelayan, melainkan menjadi petani ladang.

Sistem religi merupakan unsur kebudayaan yang keenam. Asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. Dalam usaha untuk memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab lahirnya asal mula religi tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi suku-suku bangsa di luar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk religi kuno yang

dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan mereka masih primitif.

Unsur kebudayaan yang ketujuh adalah kesenian. Kesenian yang dimiliki oleh sebuah masyarakat sangat dipengaruhi oleh pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Kesenian merepresentasikan kebudayaan yang berdasar pada pola pikir dan pola perilaku yang terdapat dalam sebuah masyarakat. Oleh karena itu, kesenian juga merupakan unsur kebudayaan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Soekanto & Sulistyowati (2015: 151) bahwa ketujuh unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam kebudayaan. Adapun ketujuh unsur tersebut saling berkaitan satu sama lainnya membentuk sebuah sistem kebudayaan. Oleh karena itu, upaya untuk memahami kebudayaan dapat dilakukan melalui pengkajian secara mendalam terhadap unsur-unsur kebudayaan tersebut.

#### **D. FUNGSI KEBUDAYAAN**

Kebudayaan adalah ranah umum manusia. Ini berarti tidak ada kebudayaan tanpa kehadiran manusia. Manusia menduduki posisi penting sebagai pencipta kebudayaan. Menurut Jenks (2013: 1) kebudayaan berfungsi sebagai media yang memungkinkan terjadinya hubungan antara manusia dengan alam dan manusia-manusia lainnya. Namun, kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai medium perantara antara manusia dengan alam dan manusia lainnya saja. Kebudayaan memiliki fungsi lebih jauh lagi.

Menurut Rafiek (2012: 13) fungsi kebudayaan adalah untuk meningkatkan hidup manusia agar kehidupan manusia manusia menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih bahagia, lebih aman, lebih sejahtera, dan lebih sentosa. Dengan kata lain, kebudayaan

memiliki fungsi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Itu berarti bahwa sistem budaya memiliki fungsi untuk menata dan memantapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia. Proses belajar dari sistem budaya ini dilakukan melalui proses pembudayaan atau *institutionalization* (pelembagaan). Dalam proses ini, individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan yang hidup dalam kebudayaannya.

Dalam upaya tersebut, kebudayaan memiliki sistem agar dapat berjalan dengan baik dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Sistem budaya merupakan wujud yang abstrak dari kebudayaan. Sistem budaya berwujud ide-ide dan gagasan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat. Gagasan tersebut tidak dalam keadaan berdiri sendiri, tetapi berkaitan dan menjadi suatu sistem. Sebagai contoh, antara adat istiadat dengan sistem norma agama memiliki keberkaitan. Adat-istiadat dibangun dengan tetap merelasikan dengan sistem norma agama. Oleh karena itu, upaya untuk memahami adat-istiadat dalam kebudayaan sebuah masyarakat tentunya harus juga diikuti oleh pemahaman mengenai norma agama yang terdapat dalam kebudayaan tersebut. Begitu juga sebaliknya.

## **E. SIFAT KEBUDAYAAN**

Menurut Soekanto & Sulistyowati (2015: 157) kebudayaan memiliki tiga sifat. Sifat kebudayaan yang pertama adalah universal sekaligus khusus. Menurut Soekanto & Sulistyowati (2015: 158) universalitas kebudayaan tampak pada adanya atribut kebudayaan, seperti norma, adat-istiadat, religi, ataupun bahasa, yang dimiliki oleh semua masyarakat kebudayaan. Namun, isi

dari masing-masing atribut tersebut berbeda antara satu sama lainnya. Isi setiap atribut tersebut ditentukan oleh isi kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing masyarakatnya. Oleh karena itu, meskipun terdapat hal yang umum atau universal dalam kebudayaan, tetapi kebudayaan juga memiliki sifat-sifat khusus di dalamnya.

Sifat kebudayaan yang kedua adalah stabil sekaligus dinamis. Menurut Soekanto & Sulistyowati (2015: 158—159) setiap masyarakat pasti memiliki kebudayaan yang keberadaannya selalu dijaga, tetapi itu tidak berarti bahwa kebudayaan tersebut tidak mengalami perubahan atau dinamika. Seiring perkembangan jaman, tentulah terjadi perubahan pada budaya, namun perubahan ini umumnya terjadi bertahap. Jika budaya tidak berubah mengikuti perkembangan jaman, umumnya budaya tersebut akan mati dan ditinggalkan sehingga budaya merupakan hal yang dinamis.

Kebudayaan mengisi dan menentukan jalan kehidupan manusia. Itu adalah sifat kebudayaan yang ketiga. Menurut Soekanto & Sulistyowati (2015: 159) kebudayaan merupakan atribut dari manusia. Kebudayaan mengisi kehidupan manusia dan membantu kehidupan manusia, tetapi kebudayaan juga dapat menentukan kehidupan manusia ke depannya, seperti kehidupan manusia di masa modern yang sangat bergantung kepada internet dan teknologi. Maka, tidak ada pandangan hidup atau pandangan dunia sebuah masyarakat yang tidak terkait dengan kebudayaan. Kebudayaan dengan unsur-unsur dan ujud-ujud yang dimilikinya menjadi dasar bagi pembentukan perilaku dan pandangan sebuah masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan tidak saja mengisi kehidupan manusia dalam

bermasyarakat, tetapi juga menentukan kehidupan masyarakat tersebut.

## **F. TEORI PEMBENTUKAN KEBUDAYAAN**

### **1. Teori Difusi Kebudayaan**

Difusi kebudayaan adalah sebuah proses penyebaran dan pengembangan unsur-unsur terjadinya kebudayaan dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Proses pembentukan kebudayaan melalui difusi kebudayaan adalah dengan cara menggabungkan kebudayaan baru dengan kebudayaan asli dalam jangka waktu yang lama (Rafiek, 2012: 23).

#### **Bentuk-Bentuk Difusi**

Salah satu bentuk difusi adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang terjadi karena dibawa oleh kelompok-kelompok manusia yang bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain di dunia. Hal ini terutama terjadi pada zaman prahistori, puluhan ribu tahun yang lalu, saat manusia yang hidup berburu pindah dari suatu tempat ke tempat lain yang jauh sekali, saat itulah unsur kebudayaan yang mereka punya juga ikut berpindah.

Penyebaran unsur-unsur kebudayaan tidak hanya terjadi ketika ada perpindahan dari suatu kelompok manusia dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga dapat terjadi karena adanya individu-individu tertentu yang membawa unsur kebudayaan itu hingga jauh sekali. Individu-individu yang dimaksud adalah golongan pedagang, pelaut, serta golongan para ahli agama.

Bentuk difusi yang lain lagi adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang terjadi ketika individu-individu dari kelompok

tertentu bertemu dengan individu-individu dari kelompok tetangga. Pertemuan-pertemuan antara kelompok-kelompok itu dapat berlangsung dengan 3 cara, yaitu :

**a.. Hubungan symbiotik**

Hubungan symbiotic adalah hubungan di mana bentuk dari kebudayaan itu masing-masing hampir tidak berubah. Contohnya adalah di daerah pedalaman negara Kongo, Togo, dan Kamerun di Afrika Tengah dan Barat; ketika berlangsung kegiatan barter hasil berburu dan hasil hutan antara suku Afrika dan suku Negrito. Pada waktu itu, hubungan mereka terbatas hanya pada barter barang-barang itu saja, kebudayaan masing-masing suku tidak berubah.

**b. *Penetration pacifique* (pemasukan secara damai)**

Salah satu bentuk *penetration pacifique* adalah hubungan perdagangan. Hubungan perdagangan ini mempunyai akibat yang lebih jauh dibanding hubungan *symbiotic*. Unsur-unsur kebudayaan asing yang dibawa oleh pedagang masuk ke kebudayaan penemrima dengan tidak disengaja dan tanpa paksaan. Sebenarnya, pemasukan unsur-unsur asing oleh para penyiar agama itu juga dilakukan secara damai, tetapi hal itu dilakukan dengan sengaja, dan kadang-kadang dengan paksa.

**c. *Penetration violante* (pemasukan secara kekerasan/tidak damai)**

Pemasukan secara tidak damai ini terjadi pada hubungan yang disebabkan karena adanya peperangan atau penaklukan. Penaklukan merupakan titik awal dari proses masuknya kebudayaan asing ke suatu tempat. Proses selanjutnya adalah



penjajahan, di sinilah proses pemasukan unsur kebudayaan asing mulai berjalan.

**Proses difusi terbagi dua macam, yaitu:**

- a. Difusi langsung, jika unsur-unsur kebudayaan tersebut langsung menyebar dari suatu lingkup kebudayaan pemberi ke lingkup kebudayaan penerima.
- b. Difusi tidak langsung terjadi apabila unsur-unsur dari kebudayaan pemberi singgah dan berkembang dulu di suatu tempat untuk kemudian baru masuk ke lingkup kebudayaan penerima.

**2. Teori Asimilasi**

Istilah asimilasi berasal dari kata Latin, *assimilare* yang berarti “menjadi sama”. Kata tersebut dalam bahasa Inggris adalah *assimilation* (sedangkan dalam bahasa Indonesia menjadi asimilasi). Dalam bahasa Indonesia, sinonim kata asimilasi adalah pembauran. Asimilasi merupakan proses sosial yang terjadi pada tingkat lanjut. Proses tersebut ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Bila individu-individu melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti budaya individu-individu kelompok itu melebur. Biasanya dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur-unsur budaya. Pertukaran tersebut dapat terjadi bila suatu kelompok tertentu menyerap kebudayaan kelompok lainnya (Koentjaraningrat, 2015: 160).

Secara umum, asimilasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha

mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama (Koentjaraningrat, 2015: 160).

Dalam pengertian yang berbeda, khususnya berkaitan dengan interaksi antar kebudayaan, asimilasi diartikan sebagai proses sosial yang timbul bila ada: (1) kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya, (2) individu-individu sebagai anggota kelompok itu saling bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang relatif lama, (3) kebudayaan-kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Biasanya golongan-golongan yang dimaksud dalam suatu proses asimilasi adalah suatu golongan mayoritas dan beberapa golongan minoritas (Koentjaraningrat, 2015: 161)..

Dalam hal ini, golongan minoritas merubah sifat khas dari unsur kebudayaannya dan menyesuakannya dengan kebudayaan golongan mayoritas sedemikian rupa sehingga lambat laun kehilangan kepribadian kebudayaannya, dan masuk ke dalam kebudayaan mayoritas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perubahan identitas etnik dan kecenderungan asimilasi dapat terjadi jika ada interaksi antar kelompok yang berbeda, dan jika ada kesadaran masing-masing kelompok (Koentjaraningrat, 2015: 162).

### **3. Teori Akulturasi**

Akulturasi dapat didefinisikan sebagai proses sosial yang

timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri (Firmansyah, 2016).

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara bagian kebudayaan yang sukar berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing (*covert culture*), dengan bagian kebudayaan yang mudah berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing (*overt culture*). *Covert culture* misalnya: 1) sistem nilai-nilai budaya, 2) keyakinan-keyakinan keagamaan yang dianggap keramat, 3) beberapa adat yang sudah dipelajarisangat dini dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat, dan 4) beberapa adatyang mempunyai fungsi yang terjaring luas dalam masyarakat. Sedangkan *overt culture* misalnya kebudayaan fisik, seperti alat-alat dan benda-benda yang berguna, tetapi jugailmu pengetahuan, tata cara, gaya hidup, dan rekreasi yang berguna dan memberi kenyamanan (Firmansyah, 2016).

Menurut Koentjaraningrat (dalam Firmansyah, 2016), akulturasi merupakan proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu.●

# BAB IV

## KEARIFAN LOKAL

### A. PENGERTIAN BUDAYA LOKAL

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan kearifan lokal, harus dipahami terlebih dulu apa yang disebut budaya lokal. Itu karena kearifan lokal merupakan bagian integral dari kebudayaan lokal. Maka, diperlukan pemahaman mengenai definisi budaya lokal. Menurut Abidin dan Saebani (2014) budaya lokal dapat dipahami sebagai berikut.

- a. *Superculture*, kebudayaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat, contohnya kebudayaan nasional.
- b. *Culture*, lebih khusus, misalnya berdasarkan golongan etnis, profesi, wilayah atau daerah, contohnya budaya Sunda.
- c. *Subculture*, merupakan kebudayaan khusus dalam sebuah culture, tetapi tidak bertentangan dengan kebudayaan induknya, contohnya budaya gotong royong.
- d. *Counter-culture*, tingkatannya sama dengan subculture, yaitu bagian turunan dari culture, tetapi counter-culture ini bertentangan dengan kebudayaan induknya, contohnya budaya individualisme.

Menurut Ranjabar (dalam Abidin dan Saebani, 2014) bahwa dilihat berdasarkan dari sifat majemuk masyarakat Indonesia, ada

tiga golongan kebudayaan yang masing-masing mempunyai corak sendiri, yaitu: kebudayaan sukubangsa/kebudayaan daerah, kebudayaan umum lokal dan kebudayaan nasional. Kebudayaan suku bangsa, artinya sama dengan budaya lokal atau budaya daerah, sedangkan kebudayaan umum lokal bergantung pada aspek ruang, biasanya pada ruang perkotaan ketika berbagai budaya lokal atau daerah yang dibawa oleh setiap pendatang. Akan tetapi, ada budaya dominan yang berkembang, yaitu budaya lokal yang ada di kota atau tempat tersebut, sedangkan kebudayaan nasional adalah akumulasi dari budaya daerah.

Menurut Ismail (2011), yang dimaksud budaya lokal adalah semua ide, aktivitas dan hasil aktivitas manusia dalam suatu kelompok masyarakat di lokasi tertentu. Budaya lokal tersebut secara aktual masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta disepakati dan dijadikan pedoman bersama. Dengan demikian sumber budaya lokal bukan hanya berupa nilai, aktivitas dan hasil aktivitas tradisional atau warisan nenek moyang masyarakat setempat, namun juga semua komponen atau unsur budaya yang berlaku dalam masyarakat serta menjadi ciri khas dan atau hanya berkembang dalam masyarakat tertentu.

## **B. PENGERTIAN KEARIFAN LOKAL**

Setiap masyarakat memiliki kearifan lokal yang merupakan bagian integral dalam sebuah kebudayaan. Kearifan lokal tersebut dapat dipahami sebagai perwujudan nilai-nilai etik yang dimiliki dan terdapat dalam sebuah kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, di setiap kebudayaan pasti terdapat kearifan lokal.

Kearifan lokal dapat dipahami sebagai pengetahuan yang dibangun dan dimiliki oleh sebuah masyarakat lokal. Dalam

pengetahuan ini tidak hanya terkandung pengetahuan yang bersifat empirik atau pragmatik, tetapi juga hal-hal yang bersifat filosofik. Secara umum, kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai sebuah pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan strategi-strategi kehidupan yang berujud berbagai aktivitas yang dilakukan oleh sebuah masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut (Fajarini dalam Banda, 2016).

Menurut Keraf (dalam Hotimah & Ariescy, 2016) kearifan lokal adalah sesuatu yang kompleks. Hal tersebut disebabkan kearifan lokal merupakan segala ujud atau bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Lebih lanjut Keraf menyatakan bahwa semua ujud atau bentuk kearifan lokal tersebut dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib.

Kearifan lokal merupakan bagian integral dari kebudayaan. Hal itu disebabkan keberadaan kearifan lokal sebagai suatu budaya yang diciptakan oleh para aktor lokal sebuah masyarakat. Adapun penciptaan tersebut dilakukan oleh para aktor tersebut melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Keberadaan kearifan lokal sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di masyarakat menempatkan kearifan lokal sebagai pandangan hidup masyarakat.

Sebagai sebuah pandangan hidup, kearifan lokal memuat nilai-nilai yang menjadi pegangan dan dasar bagi sebuah masyarakat dalam melangsungkan kehidupan. Nilai-nilai tersebut mengikat bagi sebuah masyarakat. Menurut Goldmann (1981: 11) pandangan hidup sebuah masyarakat dapat dipahami sebagai pandangan dunia. Hal tersebut disebabkan dalam pandangan hidup terdapat kebermaknaan sebuah relasi antara manusia dan dunia, atau lingkungan, yang koheren dan padu. Adapun yang dimaksud nilai adalah sesuatu yang berkaitan dengan kualitas yang terkandung dalam sebuah objek.

Sebagai sebuah kualitas, nilai berelasi dengan makna yang dikandung oleh sebuah objek. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2020), kata *nilai* diartikan sebagai kadar, mutu, sifat-sifat atau hal-hal yang penting dan berguna bagi kemanusiaan, atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Dalam pembentukannya, nilai selalu melibatkan proses kognitif. Oleh karena itu, sebagai sebuah nilai, kearifan lokal berkaitan dengan kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan secara kompleks.

Sebagai sebuah kesadaran kolektif yang dimiliki oleh sebuah masyarakat, kearifan lokal dapat dipahami sebagai sebuah wacana yang berfungsi mengatur perilaku dan pola pikir setiap anggotanya. Sebagai sebuah wacana yang mengatur, kearifan lokal berisi tata aturan tidak tertulis yang menjadi acuan masyarakat. Adapun acuan tersebut meliputi seluruh aspek yang terdapat dalam kehidupan sebuah masyarakat yang menyangkut hubungan antar sesama manusia, seperti tata interaksi sosial baik antar individu maupun kelompok, yang berkaitan dengan hirarkhi dalam pemerintahan dan adat, aturan perkawinan

antar klan, tata karma dalam kehidupan sehari-hari.

### **C. FUNGSI KEARIFAN LOKAL**

Namun, kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai dasar perilaku atau landasan kesadaran berkehidupan dan bermasyarakat sebuah masyarakat. Kearifan juga memiliki fungsi-fungsi lain yang juga menjadi hal penting dalam kehidupan masyarakat. Setidaknya terdapat empat fungsi kearifan lokal dalam sebuah masyarakat. Adapun fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut.

#### **1. Sebagai Penanda Identitas Masyarakat**

Sebagai produk dari sebuah masyarakat lokal, kearifan lokal mengandung unsur-unsur khas yang terdapat dalam sebuah masyarakat. Hal tersebut karena dalam kearifan lokal terdapat prinsip-prinsip dan cara-cara tertentu yang tidak hanya dianut, dipahami, dan diterapkan oleh masyarakat lokal dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungannya dan ditransformasikan dalam bentuk sistem nilai dan norma adat, tetapi juga dibentuk oleh masyarakat tersebut. Maka, kearifan lokal dapat dimaknai sebagai unsur pembeda antarmasyarakat. Oleh karena itu, kearifan lokal merupakan penanda identitas sebuah masyarakat.

#### **2. Sebagai Elemen Perekat (Aspek Kohesif) Lintas Warga, Lintas Agama, dan Kepercayaan**

Sebagai sesuatu yang bersifat normatif dalam kehidupan sebuah masyarakat, kearifan lokal memiliki fungsi yang tidak hanya memadukan dan menyatukan berbagai individu yang hid-



up dalam masyarakat tersebut, tetapi juga merekatkan ikatan antarindividu sebagai anggota masyarakat. Kesatuan kesadaran yang dimiliki oleh sebuah masyarakat, memungkinkan munculnya imajinasi kolektif yang membentuk sebuah pembayangan sosial yang sama di antara anggota masyarakat tersebut. Oleh karena itu, kearifan lokal merupakan unsur perekat bagi masyarakat.

### **3. Sebagai Medium Penjaga Stabilitas**

Namun, sebagai perekat, kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai medium pemadu dan pemersatu saja. Kearifan lokal dalam fungsinya sebagai elemen perekat di masyarakat, juga memiliki kemampuan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Keberadaan kearifan lokal sebagai elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama, dan kepercayaan menjadikan ketertiban dalam sebuah masyarakat dapat tercipta. Kesadaran kesatuan atau unitas sebuah masyarakat, berdampak pada hilangnya berbagai perbedaan pandangan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, kearifan lokal dapat juga berfungsi sebagai stabilitas kehidupan masyarakat.

### **4. Sebagai Unsur Kultural Yang Ada Dan Hidup Dalam Masyarakat**

Adapun yang dimaksud sebagai unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat bahwa kearifan lokal merupakan manifestasi dari unsur-unsur kebudayaan yang terdapat dalam sebuah masyarakat, yang keberadaannya masih terus dijaga dan dilestarikan. Maka, keberadaan kearifan lokal dapat dijumpai di berbagai unsur kebudayaan yang terdapat dalam

sebuah masyarakat. Oleh karena itu, kearifan lokal yang dimiliki oleh sebuah masyarakat tidak hanya dapat dijumpai secara empiris pada benda-benda budaya, tetapi juga pada bahasa dan berbagai bentuk kesenian yang berkembang di sebuah masyarakat. ●

# BAB V

## TEORI BUDAYA

### A. TEORI FUNGSIONALIME-STRUKTURAL

Teori fungsionalisme struktural atau *Structural-Functionalism Theory* merupakan sebuah teori yang memahami sistem sosial yang kuat dihasilkan oleh perilaku kelompok (grup) seperti ritual/kebiasaan/ agama dalam masyarakat, yang melengkapi individu dengan mekanisme tertentu untuk mengatasi masalah dan tantangan psikologis. (Bettinger 1996:851-852; Barnard, 2004:61). Teori ini memusatkan perhatian pada prasyarat fungsional atau kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu sistem sosial dalam mempertahankan kehidupannya dan struktur-struktur yang sesuai dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam teori ini, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem dinamis, yang terdiri dari sub sistem (struktur-struktur sosial) yang saling berhubungan. Hal tersebut disebabkan sifat sistem sosial punya kecendrungan untuk melaksanakan fungsinya sebagai alat untuk menjaga kelangsungan sistem sosial. Oleh karena itu, teori ini menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik dalam masyarakat. Maka, menurut teori ini kaidah, nilai dan keyakinan, yang berupa tindakan memiliki fungsi perekat bagi masyarakat agar terjadi keseimbangan (*equilibrium*) dalam

sistem sosial.

Fungsional Struktural memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari struktur-struktur sosial. Istilah 'fungsi' dalam teori ini bermakna akibat dari suatu sistem. Fungsionalisme sendiri (dalam arti aliran), menjelaskan gambaran dan ciri dari efek yang berguna pada sistem. Struktur dalam hal ini adalah pola nyata hubungan atau interaksi antar berbagai komponen masyarakat. (Saifuddin, 2005: 156). Masyarakat secara keseluruhan dianggap sebagai struktur besar dalam teori ini.

Dalam sebuah masyarakat terdapat rangkaian struktur yang berkaitan dan membentuk masyarakat (seperti organ-organ dari organisme yang hidup). Setiap struktur dalam masyarakat tersebut memiliki tugas masing-masing. Adanya tugas tersebut memosisikan setiap individu dalam sebuah masyarakat sebagai pelaku memiliki status dalam berbagai struktur masyarakat, lengkap dengan hak dan kewajibannya. Dalam teori ini hal tersebut disebut sebagai peranan. Contoh aplikasi teori ini antara lain ketika seorang fungsional struktural melihat ekonomi dalam kapitalisme sebagai suatu struktur yang bekerja menurut perangkat institusi ekonomi yang berkaitan, didalamnya ada kepemilikan pribadi, pekerja, pemilik, manager dan status lainnya, bekerja melaksanakan peranan mereka. Berdasarkan hal tersebut akan diketahui struktur ekonomi masyarakat tersebut.

Teori Fungsionalisme Struktural juga disebutkan menekankan pada keteraturan seperti aturan umum dan nilai atau norma yang mengatur berbagai interaksi dalam masyarakat, dan mengabaikan konflik dalam masyarakat. Berikut beberapa teori yang memiliki kedekatan kerangka berpikir dengan teori Fungsionalisme Struktural.

## **1. Teori Stratifikasi fungsional**

Teori Stratifikasi Fungsional adalah teori yang terkenal dalam teori Fungsionalisme Struktural. Menurut teori ini segala hal yang terdapat dalam masyarakat memiliki strata sosial tertentu. Sistem stratifikasi tersebut dipandang sebagai sebuah struktur dan berperan dalam sistem posisi atau kedudukan seseorang tidak dalam bagaimana ia mencapai posisi tertentu dalam masyarakat tetapi bagaimana posisi tertentu memberi prestise.

Latar belakang pandangan ini ada tiga hal yaitu 1) bahwa ada posisi tertentu dianggap lebih menyenangkan daripada posisi lainnya, 2) bahwa ada posisi tertentu yang lebih berperan dalam keberlangsungan hidup masyarakat, 3) bahwa posisi-posisi sosial yang berbeda membutuhkan bakat dan kemampuan yang berbeda pula. Seorang yang menduduki posisi tertentu harus mendapat imbalan tertentu pula agar ia bisa tetap melaksanakan tugasnya demi kebaikan masyarakat secara umum. Contohnya peran dokter yang dianggap penting, sehingga harus tetap terisi, dan imbalan yang diberi harus sepadan dengan tanggung jawab yang diembannya.

## **2. Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons**

Ada tiga fase teori Parson (Parsonian) yang diperkenalkan oleh Peter Hamilton dalam buku kumpulan karya Parson yang dieditnya. Dalam fase ketiga (karya) Parsons, yang disimpulkan dan diadaptasi dari bukunya *Societies* (1967) dan *The System Of Modern Societies* (1971) serta beberapa kumpulan esai lainnya, sebagaimana ditulis oleh Hamilton (1990:11) tampak bahwa Parsons (dan kawan-kawan) menyebut empat fungsi penting untuk semua sistem tindakan agar masyarakat dapat tetap

bertahan. Empat fungsi penting ini kemudian dikenal sebagai skema AGIL yaitu *Adaptation, Goal attainment, Integration, Latency* (Rocher, 1975: 40 dalam Ritzer, 2004: 121; Johson, 1981: 142-143). Dalam skema AGIL, suatu fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan dalam sistem, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

1. **Adaptation (adaptasi);** sebuah sistem harus bisa mengatasi situasi eksternal yang gawat dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan sebaliknya.
2. **Goal attainment (pencapaian tujuan);** sistem harus mendefinisikan tujuan dan mencapai tujuannya.
3. **Integration (integrasi);** sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagiannya dan mampu mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L).
4. **Latency (latensi atau pemeliharaan pola);** sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Selanjutnya adalah contoh penggunaan skema AGIL, Parsons yang menunjukkan inti pemikirannya yaitu empat sistem tindakan. Pertama, organisme perilaku. Organisme perilaku adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan eksternal. Kedua, sistem kepribadian. Sistem ini berfungsi untuk melaksanakan pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Ketiga, sistem sosial menjalankan fungsi integrasi dengan mengendalikan setiap komponennya. Keempat, sistem kultural.

Sistem ini melaksanakan fungsi pemeliharaan pola. Sistem ini didefinisikan sebagai aktor, interaksi, lingkungan, optimalisasi kepuasan dan kultur. Meskipun Parsons melihat sistem sosial sebagai sebuah interaksi tetapi dia tidak menggunakan aktor sebagai bagian fundamental dari interaksi tersebut, melainkan peran dan status aktor tersebutlah yang menjadi unit fundamental. *Status* ialah posisi dalam struktur sosial, *peran* ialah fungsi yang dijalankannya dalam posisi struktur.

Dalam pembahasannya mengenai sistem sosial, Parsons menjelaskan sejumlah persyaratan fungsional dari sistem sosial. Pertama, sistem sosial harus terstruktur, untuk menjaga keharmonisan hubungan didalamnya. Kedua, sistem sosial harus mendapat dukungan dari sistem lainnya (berhubungan timbal balik). Ketiga, sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan aktor (anggota sistem sosial). Keempat, sistem harus mampu melahirkan partisipasi anggotanya. Kelima, sistem harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu. Keenam, konflik yang akan menimbulkan kekacauan harus dikendalikan. Ketujuh, sistem sosial memerlukan bahasa untuk keberlangsungan hidupnya.

### **3. Teori Fungsional Taraf- Menengah Robert K. Merton**

Robert K.Merton adalah murid Parsons yang mengembangkan Fungsional Taraf- Menengah. Teori ini perlu diketahui karena kaitannya dengan teori Parsons yang dikritiknya dan karena lebih dapat diterapkan dalam penelitian lapangan. Fungsional Taraf-Menengah dapat didefinisikan sebagai teori taraf menengah yang pada prinsipnya digunakan untuk membimbing penelitian empiris. Teori ini merupakan

jembatan penghubung teori umum mengenai sistem sosial yang terlalu jauh dari kelompok-kelompok perilaku tertentu, organisasi-organisasi dan perubahan-perubahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang diamati, dan gambaran terinci secara teratur mengenai hal-hal tertentu yang tidak digeneralisasi sama sekali (Merton dalam Johnson, 1981: 146).

Merton (Johnson, 1981: 147) mempertahankan perbedaan yang tajam antara motif subyektif (tujuan dan orientasi) individu dan konsekuensi objektif sosial yang muncul dari tindakan. Contoh, dalam mengikuti upacara agama individu bisa saja tidak didorong oleh keinginan apapun untuk memenuhi fungsi laten ataupun untuk meningkatkan solidaritas social; sebaliknya motif bisa bersifat pribadi, seperti memenuhi kewajiban agama, memperoleh keselamatan, atau ketentraman jiwa atau menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang sudah mapan. Merton (dalam Johnson, 1981: 147) menyebut terdapat perbedaan antara motif dan fungsi yakni antara fungsi manifest dan fungsi latent. *Fungsi manifest* adalah konsekuensi-konsekuensi obyektif yang menyumbang pada penyesuaian terhadap system itu yang dimaksudkan (*intended*) dan diketahui (*recognized*) oleh partisipan dalam sistem dan fungsi laten adalah yang tidak dimaksudkan dan tidak diketahui.

Merton membantah pendapat antropolog Malinowski. Menurut Merton tidak semua praktik atau unsur sosio-budaya memiliki fungsi, sebaliknya malah disfungsi. Contoh kebiasaan mamakai baju baru pada hari Lebaran, yang bagi orang miskin bisa menjadi godaan untuk mencuri justru dalam bulan Ramadhan yang dianggap suci. Contoh lain, fungsi becak di kota besar seperti Jakarta (sebelum dilarang), bagi masyarakat kota



pengendara kendaraan bermotor, keberadaannya dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban lalu lintas, tetapi bagi masyarakat pengguna justru sangat bermanfaat. Berfungsi pada tingkatan sosial tertentu tetapi tidak bagi yang lain. Contohnya kebiasaan memotong puluhan kerbau pada pesta orang mati di Tanah Toraja. Fungsional bagi solidaritas kekeluargaan, tetapi disfungsional bagi ekonomi keluarga (Veeger, dkk. 1993:84-85)

#### **4. Strategi Analisis Fungsional Struktural**

Strategi dasar pendekatan fungsional struktural sendiri adalah (1) Mengidentifikasi persyaratan fungsional dan (2) menganalisis struktur tertentu dengan persyaratan-persyaratan fungsional itu terpenuhi (Johnson, 1981: 122-123). Selanjutnya Johnson menerangkan sebagai berikut.

- a. Persyaratan fungsional untuk masyarakat yang mendasar adalah untuk menjamin suatu tingkat kesesuaian minimal antara tingkatan-tingkatan yang berbeda. Integrasi yang sempurna terjadi bila secara serempak mencerminkan pengaturan kebutuhan individu itu sendiri, harapan akan peran pasangan dalam hubungan interaksi dan komitmen nilai umum yang dianut bersama. Tujuan Pasons dengan analisa fungsionalnya adalah untuk meneliti proses atau mekanisme yang menghasilkan kesesuaian. Selain kebutuhan kesesuaian antara sistem kepribadian, sistem sosial, dan sistem budaya, ada persyaratan fungsional tambahan yang dapat ditunjuk dalam sistem-sistem yang berbeda. Misalnya untuk tingkat kepribadian individu harus ada perhatian untuk mempertahankan tingkat keseimbangan antara kebutuhan yang saling bersaing. Selain itu, juga dikatakan bahwa

terdapat beberapa persyaratan fungsional yang tumbuh dari keadaan darurat dan keharusan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk saling berinteraksi supaya tetap hidup. (Johnson, 1981: 124-125)

- b. Parsons menyebut 4 struktur institusional yang perlu ada dalam masyarakat (Johnson, 1981: 126-128), yaitu :
1. Struktur Kekkerabatan
  2. Struktur Prestasi Instrumental dan Stratifikasi
  3. Teritorialitas, Kekuatan, dan Integrasi dalam Sistem Kekuasaan
  4. Agama dan integrasi Nilai

Tekanan dalam analisa Fungsional structural Parsons adalah pada mekanisme yang meningkatkan stabilitas dan keteraturan sistem sosial. Menurut Soekanto (2015: 44--45) metode fungsionalisme bertujuan untuk meneliti kegunaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan struktur sosial dalam masyarakat. Prinsip metode ini adalah bahwa unsur yang membentuk masyarakat punya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi; masing-masing punya fungsi dalam masyarakat. Dalam Antropologi metode ini dipopulerkan Bronislow Malinowski dan A. R. Radcliffe Brown, sedangkan sarjana sosiologi yang melaksanakan pendekatan fungsional terhadap masyarakat antara lain Talcott Parsons dan Robert K. Merton.

## **B. Teori Interaksionisme Simbolik**

### **1. Pengertian Interaksionisme Simbolik**

Teori Interaksionisme Simbolik merupakan teori yang melihat bahwa upaya untuk memahami kebudayaan dapat

dilakukan melalui upaya pengungkapan simbol budaya. Hal tersebut disebabkan adanya pemahaman dalam teori yang melihat bahwa komunikasi yang merupakan pertukaran simbol merupakan aktivitas khas manusia. Teori ini dipelopori oleh Herbert Blumer pada kisaran tahun 1939.

Secara umum, teori ini memiliki perspektif bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Menurut Ahmadi (2008) pemahaman tersebut disebabkan keberadaan teori interaksi simbolik yang memahami bahwa setiap individu memiliki sifat proaktif, reflektif, dan kreatif, dalam menafsirkan, dan menampilkan perilaku yang unik, rumit, dan sulit diinterpretasikan. Oleh karena itu, dalam teori ini terdapat dua penekanan pemahaman. Pertama, manusia dalam masyarakat tidak pernah lepas dari interaksi sosial. Kedua, interaksi dalam masyarakat mengujud dalam simbol-simbol tertentu yang sifatnya cenderung dinamis.

Hal tersebut juga sebagaimana yang dinyatakan oleh Arthur Asa Berger. Menurut Berger (2004: 14) bahwa teori interaksionisme simbolik memahami kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol. Teori ini, menurut Berger, tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk melakukan tindak komunikasi dengan sesama manusia, dan juga pengaruh yang ditimbulkan dari setiap penafsiran simbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang terlihat dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, dalam teori ini, upaya untuk membongkar makna simbol yang diproduksi

dalam tindak komunikasi menjadi hal yang harus dilakukan.

Menurut Fisher (1986: 231), interaksionisme simbolik adalah teori yang melihat realitas sosial adalah hasil atau produk ciptaan manusia. Penciptaan tersebut dapat dilakukan karena manusia adanya interaksi simbolik pada ranah sosial. Kemampuan manusia untuk berinteraksi secara simbolik pada ranah sosial tersebut, memiliki esensi kebudayaan, saling berhubungan, bermasyarakat, dan memiliki buah pikiran. Oleh karena itu, setiap bentuk interaksi sosial dimulai dan berakhir dengan mempertimbangkan diri manusia sebagai makhluk simbolis.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa teori interaksionisme simbolik merupakan teori kebudayaan yang berakar dan berfokus pada pemahaman mengenai hakikat manusia sebagai makhluk relasional. Setiap individu pasti terlibat relasi dengan sesamanya. Hal tersebut disebabkan melalui relasi dengan sesamanya keberadaan diri manusia dapat muncul. Interaksi itu sendiri membutuhkan simbol-simbol tertentu. Simbol-simbol tersebut tidak hanya menjadi jembatan yang menghubungkan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Agar simbol-simbol itu dapat melaksanakan fungsinya sebagai jembatan atau medium penghubung antarmanusia, dalam setiap simbol terdapat konsensus bersama yang hadir dalam skala kecil maupun skalabesar. Namun, karena simbol-simbol tersebut hadir karena adanya konsensus, maka simbol-simbol tersebut biasanya bersifat unik dan dinamis.

Menurut Sobur (2004: 199) upaya untuk melakukan analisis dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik harus memperhatikan prinsip-prinsip penting yang ada dimilikinya. Hal tersebut disebabkan agar tidak terjadi kesalahan dalam

melakukan memperspektif realitas yang dihadapi, sehingga analisis dapat dilakukan dengan benar dan sah. Adapun prinsip-prinsip penting tersebut sebagai berikut:

1. Individu merespon suatu situasi simbolik, mereka merespon lingkungan termasuk objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia) berdasarkan media yang mengandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka.
2. Makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melihat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa, negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu mewarnai segala sesuatu bukan hanya objek fisik, tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran obyek fisik, tindakan atau peristiwa itu ), namun juga gagasan yang abstrak.
3. Makna yang diinterpretasikan oleh individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial, perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri.

Menurut Ardianto dkk(2007: 136) terdapat tiga konsep penting yang harus dipahami ketika hendak melakukan analisis dengan menggunakan teori ini. Ketiga konsep tersebut merupakan kata-kata kunci yang membangun paradigma teori interaksionisme simbolik. Adapun ketiga teori tersebut meliputi konsep tentang pikiran, konsep tentang diri, dan konsep tentang masyarakat. Berikut penjelasan mengenai ketiga konsep yang menjadi unsur penting dalam teori interaksionisme simbolik tersebut.

### **a) Konsep tentang Pikiran (*Mind*)**

Menurut Ritzer & Goodman (2004: 280) teori interaksionisme simbolik memahami pikiran bukan sebagai sesuatu yang murni pribadi, atau terlepas dari dunia sosial. Intraksionisme simbolik memahami pikiran sebagai produk dari interaksi sosial. Dengan kata lain, pikiran yang dimiliki oleh setiap individu atau setiap manusia adalah fenomena sosial. Hal tersebut disebabkan pikiran terbentuk dan berkembang dalam proses sosial, dan merupakan bagian integral dari proses sosial. Proses sosial tersebut, menurut teori interaksionisme simbolik, mendahului pikiran. Hal tersebut disebabkan keberadaan proses sosial yang bukanlah produk dari pikiran.

Dalam teori interaksionisme simbolik, merujuk pada Ritzer & Goodman (2004: 280), pikiran didefinisikan dan dipahami dalam tataran fungsional, dan bukan dalam tataran substantif. Dalam arti bahwa karakteristik istimewa pikiran adalah kemampuannya bagi individu untuk memunculkan dalam dirinya sendiri tidak hanya satu respon saja, tetapi juga respon komunitas secara keseluruhan. Itulah yang dinamakan pikiran dalam teori interaksionisme simbolik. Maka, melakukan sesuatu berarti memberi respon terorganisasi tertentu, dan jika seseorang mempunyai respon itu dalam dirinya, itu berarti seseorang tersebut memiliki pikiran.

Selain dalam tataran fungsional, pikiran juga dipahami dalam tataran pragmatis dalam teori interasionisme simbolik. Menurut Wirawan (2014: 124) berpikir, yang merupakan aktivitas pikiran, dipahami sebagai sebuah proses tempat seseorang melakukan interaksi dengan dirinya sendiri. Adapun interaksi tersebut dilakukan dengan mempergunakan simbol-simbol bermakna. Melalui proses interaksi dengan diri sendiri tersebut,

seseorang melakukan pemilihan, diantara stimulus yang tertuju kepadanya, stimulus yang akan ditanggapi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa teori interaksionisme simbolik juga memahami apabila simbol digunakan juga dalam proses berpikir subjektif. Namun, dalam berpikir subjektif, simbol-simbol tersebut tidak digunakan secara nyata, melainkan hanya dalam percakapan internal dengan dirinya sendiri. Maka, diri sendiri secara subjektif adalah objek. Oleh karena itu, kondisi yang dihasilkan adalah konsep diri yang mencakup kesadaran diri yang dipusatkan pada diri sebagai objeknya.

Mencermati penjelasan di atas tersebut dapat dipahami bahwa dalam teori interaksionisme simbolik, simbol merupakan produk dari respon yang dihasilkan seseorang, baik dalam tataran eksternal atau dalam tataran internal. Menurut Upe (2010: 223) simbol-simbol terbentuk pada seseorang yang membuat respon bermakna. Simbol-simbol dalam bentuk tersebut membawa pada suatu tindakan dan respon yang telah ada dalam pemahaman masyarakat. Melalui simbol-simbol itulah sebuah pemikiran tercipta. Maka, hakikat pikiran dikonstruksikan berdasar pada pengalaman simbol makna yang terinternalisasi dari proses eksternalisasi sebagai bentuk produk interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, teori interaksionisme simbolik memahami makna sebagai kualitas atau isi simbol yang diproduksi melalui proses interaksi yang tidak hanya dengan dirinya sendiri, tetapi juga proses interaksi sosial.

### **b) Konsep tentang Diri (Self)**

Konsep kedua yang membangun paradigma teori interaksionisme simbolik adalah konsep tentang diri (*self*).

Menurut Ahmadi (2008) teori interaksi simbolik memahami konsep tentang diri (*self*) merupakan konsep inti. Hal tersebut disebabkan teori ini menganggap bahwa konsepsi diri adalah suatu proses yang berasal dari interaksi sosial seseorang, sebagai individu, dengan orang lain. Itu berarti bahwa keberadaan sosial yang dimiliki oleh seorang individu sangat menentukan bentuk lingkungan sosial dan dirinya sendiri secara efektif.

Menurut Ahmadi (2008) pemahaman tersebut memperlihatkan bahwa dalam teori interaksionisme simbolik konsep diri (*self*) tidak hanya bersifat subjektif, tetapi juga bersifat sebagai objektif. Dalam arti, bahwa subjek itu meliputi subjek-objek secara sekaligus. Adapun yang dimaksud objek adalah yang berlaku pada dirinya sendiri sebagai karakter dasar dari makhluk lain, sehingga mampu mencapai kesadaran diri (*self conciousness*), dan sebagai dasar dalam mengambil sikap untuk dirinya, juga untuk situasi sosial. Interaksionisme simbolik memiliki anggapan dan pemahaman bahwa diri akan menjadi objek terlebih dahulu sebelum berada pada posisi subjek.

Diri akan mengalami proses internalisasi atau interpretasi subjek, atas realitas struktur yang luas. Maka, diri merupakan produk dialektis dari "I" yang merupakan impuls dari "diri", yaitu aku, sebagai subjek, dan "Me" yang merupakan sisi sosial dari manusia, yaitu "daku" sebagai objek. Menurut Ahmadi (2008) dalam teori interaksionisme simbolik perkembangan "diri" (*self*), sejalan dengan sosialisasi individu dalam masyarakat yakni merujuk kepada kapasitas dan pengalaman manusia sebagai objek bagi diri sendiri. Oleh karena itu, dalam teori interaksionisme simbolik diri muncul dalam proses interaksi. Hal itu disebabkan karena manusia baru menyadari dirinya sendiri dalam interaksi sosial. Jadi, diri adalah fenomena sosial.



### **c) Konsep tentang Masyarakat (Society)**

Sebagaimana tampak pada penjelasan-penjelasan mengenai pikiran dan diri bahwa dunia sosial atau masyarakat menempati posisi awal dalam segala pembentukan yang dipahami oleh teori interaksionisme simbolik. Menurut Mead (dalam Upe, 2010: 287—288) masyarakat memiliki peran penting dalam pembentukan pikiran dan diri. Hal tersebut karenadalam masyarakat terkandung sekumpulan tanggapan terorganisir, yang dalam proses selanjutnya, diambil alih oleh individu dalam ujud “aku” (*me*).

Secara definitif, teori interaksionisme simbolik memahami masyarakat sebagai jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh setiap individu dalam sebuah masyarakat. Setiap individu tersebut memiliki keterlibatan dalam perilaku yang dipilih sendiri secara aktif dan sukarela. Adapun pemilihan tersebut pada akhirnya mengantarkan seseorang sampai pada situasi dan kondisi proses pengambilan peran di tengah masyarakat (Siregar, 2012).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam teori interaksionisme simbolik dinamika makna dan identitas sangat bergantung pada relasi antara individu dengan masyarakatnya. Itu berarti bahwa perubahan identitas dan makna dipengaruhi oleh perubahan sosial. Maka, transformasi identitas dan makna simbol adalah transformasi yang bersifat sosial. Identitas dan makna merupakan hasil konstruksi dari masyarakat. Oleh karena itu, teori ini menganggap bahwa tidak ada yang tidak dikenai oleh masyarakat. Masyarakat merupakan penyebab awal diri dan pikiran setiap individu.

## **C. TEORI EKOLOGI KEBUDAYAAN**

Pada hakikatnya kebudayaan itu berkembang sebagai

perwujudan tanggapan aktif manusia terhadap lingkungannya (Soerjanidkk, 1988:231). Kiranya, pendapat seperti ini tidak hanya diyakini para ekolog, tetapi juga para antropolog. Ini tercermin dari munculnya teori antropologi yang berusaha melihat hubungan antara manusia, lingkungan, dan kebudayaan. Teori ini disebut teori ekologi kebudayaan.

Ekologi Kebudayaan (*Cultural Ecology*) merupakan teori antropologi yang muncul di Abad 20. Teori ini menempatkan ekologi menjadi faktor penting bagi terbentuknya kebudayaan. Menurut Kaplan dan Manners (2000: 102) teori ini dapat dikatakan merupakan anggota dari kelompok teori evolusionisme-budaya, sebab melihat budaya sebagai satu hasil dari perkembangan, sebuah evolusi. Meskipun demikian, ini tidak dapat begitu saja diartikan bahwa teori ini mendukung sepenuhnya teori evolusi, sebab teori ini juga melakukan kritisasi terhadap teori evolusi budaya. Ini dapat dilihat dari kritik Steward kepada White yang dianggapnya terlalu luas dan umum (dalam Kaplan dan Manners, 2000: 63):

"Kritik utama Steward terhadap White bukanlah bahwa rumusan evolusioner yang diajukan White salah, melainkan bahwa rumusan-rumusan itu demikian luas dan umum sehingga tidak banyak membantu kita menangkap runtutan (sekuen) perkembangan secara jelas dan cukup rinci."

Meskipun mengkritisi White, Steward adalah sama-sama penganut evolusionisme. Ini karena Steward sendiri mempertanyakan kemungkinan menciptakan sebuah teori sosial yang meliputi evolusi seluruh umat manusia. Selain itu,

dia juga berpendapat bahwa antropolog tidak terbatas pada deskripsi yang spesifik, budaya yang ada. Steward percaya adalah mungkin untuk membuat teori menganalisa khas, budaya umum, wakil dari era atau wilayah tertentu. Sebagai faktor yang menentukan menentukan perkembangan budaya diberikan, ia menunjuk untuk teknologi dan ekonomi, sambil mengingatkan bahwa ada faktor-faktor sekunder, seperti sistem politik, ideologi, dan agama. Faktor-faktor ini mendorong evolusi suatu masyarakat yang diberikan dalam beberapa arah pada waktu yang sama ([http://en.wikipedia.org/wiki/Julian\\_Steward](http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Steward)).

Sutton dalam buku *Introduction to Cultural Ecology* (2010: 3) menyatakan bahwa ekologi kebudayaan merupakan cabang dari studi Ekologi Manusia (*Human Ecology*). Lebih lanjut ia memaparkan bahwa ekologi manusia merupakan studi mengenai aspek-aspek kebudayaan dan lingkungan, termasuk bagaimana dan mengapa kebudayaan melakukan suatu hal untuk memecahkan persoalannya, bagaimana kelompok masyarakat memahami lingkungannya, dan bagaimana mereka saling berbagi pengetahuan mereka mengenai lingkungannya. Oleh karena itu, menurut Sutton (2010: 4) ekologi budaya adalah "... *the study of the ways in which culture is used by people to adapt to their environment*"

Ekologi kebudayaan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Kaplan dan Manners (2000: 103) mendapat inspirasi dari wawasan jangka panjang tentang manusia, yang melihat manusia sebagai hasil yang sepenuhnya unik dari evolusi biologis. Keunikan tersebut dibuktikan lewat kemampuan manusia untuk menyelaraskan diri atau menundukkan lingkungannya dengan cara-cara yang sangat berbeda dari cara-cara yang digunakan

oleh makhluk yang lebih rendah. Wikipedia mencatat bahwa yang dimaksud dengan ekologi kebudayaan adalah sebuah studi atau kajian yang memfokuskan perhatiannya pada relasi antara masyarakat dan alam sebagai sebuah ekosistem yang menopang kehidupan. (“... *studies the relationship between a given society and its natural environment as well as the life-forms and ecosystem that support its lifeways*”) ([http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural\\_ecology](http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_ecology)).

Secara umum, ekologi budaya termasuk dalam disiplin ilmu Antropologi (Sutton, 2010: 5). Oleh karena itu, Kaplan dan Manners (2000: 104) berpendapat bahwa ekologi budaya berbeda dari ekologi umum, sebab: “... ekologi budaya tidak sekedar membicarakan interaksi bentuk-bentuk kehidupan dalam suatu ekosistem tertentu, melainkan membahas cara manusia (berkat budaya sebagai saranya) memanipulasi dan membentuk ekosistem itu sendiri”. Ini mengakibatkan pembahasan ekologi kebudayaan secara prinsip berkorelasi dengan konsep lingkungan dan adaptasi.

## **1. Konsep Lingkungan dalam Ekologi Kebudayaan**

Lingkungan pada umumnya diartikan dengan ciri-ciri atau hal-hal menonjol yang menandai habitat alami seperti cuaca, flora dan fauna, dan lain-lain. Dalam pemikiran intelektual Barat sejak Yunani Kuno, penjelasan variasi budaya selalu mengacu pada perbedaan ciri habitat alami. Akan tetapi, semua ekologi budaya akan menolak penggunaan faktor lingkungan itu sebagai penjelasan mekanis mengenai variasi kebudayaan. Alasan yang dikemukakan, inventarisasi unsur-unsur habitat alami belaka tidak akan pernah dapat meramalkan budaya yang

terdapat di wilayah tertentu dalam waktu tertentu.

Pada akhirnya, banyak ekolog-budaya mendukung suatu pandangan yang disebut "posibilisme lingkungan" (*environmental possibilism*). Dalam pandangan "posibilisme lingkungan", *the environment is seen as a limiting or enabling factor rather than a determining factor* 'lingkungan dipandang sebagai faktor yang membatasi atau yang memberikan kemungkinan-kemungkinan. Jadi, lingkungan bukanlah faktor penentu' (Sutton, 2010:20). Dalam bukunya tersebut, Sutton juga mengungkapkan bahwa sebuah kebudayaan juga memiliki keterbatasan-keterbatasan, misalnya dalam hal teknologi, sistem kepercayaan, serta hubungan antar-kebudayaan. Namun, budaya juga membuat pilihan dari kemungkinan-kemungkinan yang ada untuk diterapkan.

Posibilisme adalah sebuah proses interaktif antara budaya dan lingkungan. Pilihan yang tersedia pada lingkungan, bisa terbatas oleh kemampuan kebudayaan dan sebaliknya. Seiring dengan perubahan kebudayaan dan lingkungan, proses timbal balik juga mengalami perubahan.

Penguasaan manusia atas lingkungannya meningkat sejak zaman Palaeolithic. Peningkatan tersebut sebagian besar terjadi karena penguasaan teknologi yang semakin berkembang dan juga karena pertumbuhan pengetahuan ilmiah. Filsafat-filsafat moral yang berusia lebih dari 2000 tahun masih relevan diterapkan dalam budaya-budaya modern sekarang, tetapi tidak demikian halnya dengan teknologi. Apabila teknologi 2000 tahun silam diterapkan, maka akan terjadi perubahan besar-besaran cara hidup kita.

Argumen bahwa faktor teknologi dan ekonomi memainkan peranan besar dalam hal adaptasi, dikritisi oleh Leslie White.

Menurut White (dalam Kaplan, 2000:103), dalam telaah evolusi budaya dari kacamata ekologis, tidak hanya faktor teknologi dan ekonomi saja yang patut diperhitungkan, akan tetapi juga faktor-faktor lain seperti ideologi, ataupun sosiopolitik. Faktor-faktor tersebut, secara dialektis dapat saling mempengaruhi.

Pengaruh lingkungan terhadap tingkat perkembangan ekonomi masyarakat, dikemukakan oleh Betty Meggers. Meggers menggunakan pendekatan ekologis untuk mengkaji beberapa daerah di Amerika Selatan dan sejarah Eropa, hingga mengemukakan dalil bahwa "tingkat perkembangan yang dapat dicapai oleh suatu kebudayaan tergantung pada potensi pertanian dari lingkungan pemukimannya". Menurut Meggers (dalam Ithomi, 2006:71), terdapat empat macam lingkungan yaitu: lingkungan tanpa potensi pertanian, lingkungan dengan potensi pertanian terbatas, lingkungan dengan potensi pertanian yang masih dapat ditingkatkan, serta lingkungan dengan potensi pertanian tidak terbatas. Tipe-tipe lingkungan tersebut dianggap menentukan tingkat perkembangan ekonomi masyarakat yang hidup di dalamnya.

Faktor religi misalnya, upacara pesta babi pada masyarakat Tsembaga di pedalaman dataran tinggi New Guinea, Irian. Upacara pesta babi tersebut dapat dilihat sebagai adaptasi terhadap faktor lingkungan yang menghasilkan babi secara berlebihan, selain sebagai sarana mengurangi potensi konflik dalam masyarakat. Contoh faktor psikologi terdapat pada upacara inisiasi laki-laki yang digambarkan oleh Roger Burton, John Whiting, dan Frank W. Young pada beberapa kelompok masyarakat. Upacara inisiasi laki-laki merupakan upacara khusus yang menjadi pertanda bahwa seorang anak laki-laki

telah menjadi pria dewasa (Ihromi, 2006:70). Secara psikologis, inisiasi bermakna menetralsir konflik identitas pada diri anak ketika iaberanjak dewasa. Pada seorang anak laki-laki, identitas kewanitaan bawaan dari ibu harus 'diganti' dengan identitas pria milik sang ayah.

## **2. Konsep Adaptasi dalam Ekologi Kebudayaan**

Para ekolog kebudayaan berpendapat bahwa lingkungan dapat membuahkan dampak yang berbeda-beda ragamnya terhadap pelbagai taraf perkembangan sosiokultural dan sosioekonomis (Kaplan dan Manners, 2000: 113). Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan penelitian terhadap pola-pola adaptasi yang terjadi pada kebudayaan.

Adaptasi dapat diartikan sebagai proses yang menghubungkan sistem budaya dengan lingkungannya (Kaplan dan Manners, 2000: 112). Proses adaptasi manusia dengan lingkungannya adalah suatu proses yang unik karena melalui mekanisme budaya. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana hubungan antara manusia sebagai produsen sekaligus konsumen kebudayaan dengan lingkungannya perlu dilakukan penelitian pada tindak adaptasi terjadi pada hubungan tersebut. Menurut Kaplan dan Manners (2000: 102):

“Suatu ciri dalam ekologi budaya ialah perhatian mengenai adaptasi pada dua tataran: pertama, sehubungan dengan cara system budaya beradaptasi terhadap lingkungan totalnya, dan kedua—sebagai konsekuensi adaptasi sistemik itu—perhatian terhadap cara institusi-institusi dalam sesuatu budaya beradaptasi atau saling menyesuaikan diri.”

Sejalan dengan pernyataan tersebut, maka para ekologi kebudayaan pun sepakat bahwa penelitian terhadap cara manusia beradaptasi dengan lingkungannya merupakan hal yang penting, sebab dengan melakukan penelitian proses-proses adaptasi akan memungkinkan seseorang melihat cara kemunculan, pemeliharaan dan transformasi pelbagai konfigurasi budaya. Dalam usahanya untuk memahami adaptasi, umumnya, merujuk pada Kaplan dan Manners (2000: 102), para ekologi kebudayaan cenderung menekankan teknologi dan ilmu ekonomi dalam analisis mereka terhadap adaptasi budaya, karena dalam segi-segi budaya itulah kelihatan jelas perbedaan di antara budaya-budaya di samping perbedaan dari waktu ke waktu di dalam sesuatu budaya.

Sampai di sini, dapat dipahami bahwa teori Ekologi kebudayaan merupakan teori kebudayaan yang muncul di Abad 20. Teori ini menekankan pentingnya hubungan antara manusia, lingkungan, dan kebudayaan. Dengan Julian Haynes Steward sebagai pelopornya, teori kebudayaan ini lambat laun menjadi kokoh kedudukannya dalam lapangan ilmu antropologi.

### **3. Tokoh Ekologi Kebudayaan**

Julian Haynes Steward merupakan pelopor teori ekologi budaya. Lahir di Washington D.C., Amerika, pada tahun 31 Januari 1902, dan meninggal pada tanggal 16 Februari 1972 dan dimakamkan di Urbana, Illinois. Julian Haynes Steward merupakan antropolog Amerika yang mendapatkan gelar Ph. D. nya dari University of California pada tahun 1925 di bawah bimbingan Alfred Kroeber dan Robert Lowie. Sebagai pelopor ekologi budaya, Julian Haynes Steward banyak menginspirasi



para antropolog terkenal, seperti Eric Wolf, Roy Rapport, Stanley Diamond, Robert Manners, Robert F. Murphy, bahkan Marvin Harris. *Cultural Causality and Law: A Trial Formulation of the Development of Early Civilizations* (1949), *Area Research: Theory and Practice* (1950), *Levels of Sociocultural Integration* (1951), *Evolution and Process* (1953), dan *The Cultural Study of Contemporary Society: Puerto Rico* (Steward and Manners, 1953) adalah karya-karya tulis ilmiahnya yang sangat berpengaruh di dalam lapangan keilmuan antropologi.

#### **D. Teori Semiotika Budaya**

Dalam konteks penelitian budaya kontemporer, semiotika kerap digunakan sebagai landasan teoretis untuk memecahkan persoalan. Hal tersebut tampak dari banyaknya penelitian di bidang budaya kontemporer yang menggunakan teori ini. Oleh karena itu, perlu dipahami juga keberadaan teori semiotika dalam konteks penelitian budaya.

##### **1. Sejarah Teori Semiotika**

Menurut Noth (1990: 15), ada empat tradisi yang melatarbelakangi kelahiran semiotika, yakni: semantik, logika, retorika, dan hermeneutika. Sebagai sebuah ilmu, semiotika memiliki sejarah yang panjang, semenjak zaman Yunani Kuno sampai zaman Modern, dan bidang penelitiannya pun juga sangat luas, bahkan tak jelas batas-batasnya.

Bukti keberadaan semiotika di zaman Yunani Kuno dapat dilihat pada dalil semiotik Plato yang menyatakan bahwa (1) tanda-tanda verbal, baik yang alamiah atau konvensional, hanyalah representasi tidak lengkap dari sifat-sifat benda yang

sebenarnya, (2) studi kata-kata tidak membeberkan apa-apa berkaitan dengan sifat-sifat alamiah yang sebenarnya dari benda semenjak alam ide-ide mandiri dari representasinya di dalam bentuk kata-kata, dan (3) Pengetahuan yang dimediasi oleh tanda-tanda adalah sesuatu yang tak langsung dan bermutu rendah bagi pengetahuan yang segera, dan kebenaran mengenai benda melalui kata-kata, meskipun apabila kata-kata adalah keserupaan yang baik, adalah memiliki mutu yang rendah bagi mengetahui kebenaran itu sendiri (Noth, 1990: 15).

Semiotika Modern muncul di akhir abad dua puluh dengan dua orang bapak: (1) Charles Sanders Peirce (1813-1924), dan (2) Ferdinand de Saussure. Mereka tidak saling kenal. Di akhir abad dua puluh tersebut, Charles Sanders Peirce, seorang filsuf Amerika, menggambarkan sebuah studi yang ia sebut "semiotik", dan dalam *Course in General Linguistics* (1915), seorang linguis dari Swiss, Ferdinand de Saussure secara mandiri mengajukan satu ilmu yang ia sebut "semiologi" (Abrams, 1999: 279).

Peirce menciptakan teori umum untuk tanda-tanda. Ia memusatkan perhatiannya pada berfungsinya tanda pada umumnya. Bagi Peirce, tanda-tanda linguistik meskipun penting tetapi bukan satu-satunya kategori yang ada. Oleh karena itu, hal yang berlaku bagi tanda-tanda pada umumnya, berlaku pula bagi tanda-tanda linguistik, dan tidak sebaliknya. Apa yang dikehendaki oleh Peirce adalah semata-mata agar teorinya ini bersifat umum dan dapat diterapkan pada segala macam tanda. Untuk mencapai tujuan tersebut, ia memerlukan konsep-konsep baru. Agar konsepnya lengkap, ia menciptakan kata-kata baru yang ditemukannya sendiri. Oleh karena itu, Peirce mengusulkan kata semiotik sebagai nama bagi ilmu mengenai

tanda-tanda yang bersifat umum yang diciptakannya (Zoet, 1990: 1—2).

Bagi Peirce, nama ini bersinonim dengan kata logika. Peirce menganggap bahwa logika itu harus mempelajari bagaimana orang bernalar, sebab penalaran manusia dilakukan melalui tanda-tanda. Menurut Peirce, tanda-tanda memungkinkan manusia berpikir, berhubungan dengan manusia lain, dan memberi makna pada apa yang ditampilkan oleh alam semesta (Zoet, 1990: 1—2).

Berbeda dari Peirce yang menganggap bahwa tanda-tanda linguistik bukan yang utama, Saussure mengembangkan dasar-dasar teori linguistik umum. Saussure menganggap bahwa tanda-tanda linguistik memiliki kelebihan ketimbang sistem semiotika lainnya. Bagi Saussure, bahasa adalah sistem tanda. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa teori tentang tanda linguistik perlu menemukan tempatnya dalam sebuah teori yang lebih umum. Untuk teori tanda yang lebih umum tersebut, Saussure mengusulkan nama semiologi (Hoed, 2008: 3).

Sejak itu, semiotika dan semiologi menjadi nama lain bagi studi sistematis mengenai tanda, dan ini berfungsi pada segenap wilayah pengalaman manusia, dan hal ini terus berlaku sampai saat.

## **2. Pengertian Semiotika**

Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda (*sign*) dalam kehidupan manusia. Atau dengan kata lain, semiotika merupakan “ilmu pengetahuan yang bersifat umum” yang membatasi ruang lingkup gejala-gejala semiotis “dalam keseluruhan gejala-gejala manusia”. Semiotika memusatkan perhatiannya pada tanda

yang mencakupi aspek verbal (bahasa) dan nonverbal (misalnya gambar, warna, gerak, tubuh, dan gejala alam. Mengenai hal tersebut, Chandler (2007: 2) menyatakan sebagai berikut:

*Semiotics involves the study not only of what we refer to as 'signs' in everyday speech, but of anything which 'stands for' something else. In a semiotic sense, signs take the form of words, images, sounds, gestures and objects.*

Sebagai sebuah ilmu yang mempelajari tanda-tanda dalam kehidupan manusia, semiotika memiliki tujuan mempelajari bagaimana sebuah makna diciptakan dan bagaimana realitas direpresentasikan oleh tanda-tanda tersebut. Ini sejalan dengan tugas yang diemban oleh semiotika. Menurut Saussure (dalam Traubaut, 1996: 22) semiotika memiliki tugas dan fungsi untuk meneliti kehidupan tanda-tanda dalam ruang lingkup kehidupan sosial dan memberitahukan tanda-tanda tersebut terdiri atas apa dan peraturan apa yang menentukan keberadaan tanda-tanda tersebut.

Sampai di sini, telah diketahui dan dipahami pengertian dari semiotika, tujuan semiotika, dan tugas yang diemban oleh semiotika. Namun, untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas mengenai semiotika, ada baiknya, diketahui dan dipahami juga pengertian-pengertian yang pernah diberikan para ahli kepada semiotika. Berikut beberapa pengertian semiotika yang diberikan oleh para ahli.

- a) Menurut Eco (dalam Chandler, 2007: 2) semiotika adalah suatu program penelitian yang mempelajari semua proses kebudayaan sebagai proses komunikasi. Lebih lanjut Eco

menyatakan: *“semiotics is concerned with everything that can be taken as a sign”*.

- b) Abrams (1999: 279). menyatakan bahwa semiotika adalah suatu ilmu mengenai tanda (pengantar makna) yang tidak terbatas pada sistem komunikasi yang eksplisit seperti bahasa, kode Morse, dan rambu-rambu dan sinyal-sinyal jalan; karena perbedaan yang besar dari aktivitas dan produksi manusia yang lain—bentuk tubuh dan gerakan tubuh kita, ritual sosial yang kita selenggarakan, ragam bentuk baju yang kita kenakan, makanan yang kita sajikan, bangunan-bangunan yang kita diami, objek-objek yang berhubungan dengan kita—menyampaikan makna yang lazim pada setiap anggota yang berpartisipasi dalam satu kebudayaan tertentu, dan maka dapat dianalisis sebagai tanda yang fungsinya membedakan ragam sistem pemberian tanda.
- c) Bagi Mikics (2007: 273—274) semiotika adalah studi tanda, dengan penekanan khusus pada sifat-sifat konvensional atau sistematisnya.
- d) Baldick (2001: 232—233) berpendapat bahwa semiotika atau semiologi merupakan studi sistematis mengenai tanda, atau lebih tepatnya, mengenai produksi makna dari sistem-tanda, linguistik atau non-linguistik. Sebagai sebuah tradisi yang nyata dari penyelidikan ke dalam komunikasi manusia, semiotika ditemukan oleh seorang filsuf Amerika, C.S. Peirce (1893-1914) dan terpisah dengan seorang linguis dari Swiss, Ferdinand de Saussure, yang mengusulkan bahwa linguistik akan membentuk satu bagian dari satu ilmu tanda yang lebih umum: *“semiologi”*.

- e) Hartoko & Rahmanto (1986: 131—132) mengemukakan bahwa semiotika adalah ilmu yang meneliti tanda-tanda, sistem-sistem tanda dan proses suatu tanda diartikan. Ilmu ini tidak hanya bisa diterapkan pada tanda-tanda bahasa, tetapi juga dapat diterapkan pada setiap ungkapan kultural, seperti musik, arsitektur, tarian, dsb. Dan bagi teks sastra khususnya, penting sekali untuk meneliti fungsi yang berlaku bagi berbagai kelompok pembaca dalam proses komunikasi konkret.
- f) Zoest (1990: 5) menyatakan bahwa semiotika adalah studi tentang tanda dan segala yang berhubungan dengannya, baik apakah cara berfungsinya, hubungannya dengan tanda-tanda lain, atau pengirimannya dan penerimaannya oleh mereka yang menggunakannya.
- g) Menurut Hoed (Hoed, 2008: ix—x) semiotika adalah “ilmu” yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. Dan “ilmu” ini dapat digunakan untuk mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. Karena itu, “ilmu” ini dapat memberikan kemungkinan kepada kita untuk berpikir kritis dan memahami bahwa tidak ada satu otoritas yang berwenang memberikan makna atau penafsiran atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan sosial kita.
- h) Jakobson (dalam Chandler, 2007: 8) menegaskan bahwa semiotika adalah *“the general science of signs which has as its basic discipline linguistics, the science of verbal signs”*.

### **3. Teori Semiotika Charles Sanders Peirce**

Menurut Pierce (dalam Vera, 2014: 2) semiotika merupakan

ilmu atau kajian tentang tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda. Semiotika meliputi kajian tentang cara berfungsi tanda, hubungan tanda dengan tanda-tanda lain, pengiriman dan penerima tanda oleh penggunanya.

Tanda bukan suatu jenis fenomena di samping objek-objek nonsemiotik lainnya. Artinya bahwa seluruh alam semesta ini penuh tanda dan disusun atas tanda-tanda (Pierce dalam Noth, 2006:41). Tanda membuat segala hal yang ada di alam semesta dapat dimaknai dan dipahami manusia. Tanda merupakan wakil yang menjelaskan sesuatu. Tanda menunjuk pada seseorang, yakni, menciptakan di benak orang tersebut suatu tanda yang setara, atau suatu tanda yang lebih berkembang, tanda yang diciptakannya dinamakan interpretant dari tanda pertama. Tanda itu menunjukkan sesuatu, yakni objeknya. (Pierce dalam Vera, 2014: 21).

Sebagai wakil sesuatu, tanda berfungsi menunjukkan sesuatu. Artinya tanda membuat seseorang memahami sesuatu yang berada di lingkungannya. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan Vera (2014: 21) berikut: "tanda tidak dapat mengungkapkan sesuatu, tanda hanya berfungsi menunjukkan, sang penafsirlah yang memaknai berdasarkan pengalamannya masing-masing."

Semiotik Pierce merupakan ilmu tanda yang bersifat triadik. Hal tersebut disebabkan oleh keberadaan tanda dipahami oleh Pierce sebagai sesuatu yang tersusun atas tiga unsur, yakni representamen, objek, dan interpretan. Ketiga unsur tersebut menyusun tanda. Model triadik dari Pierce sering juga disebut sebagai "*triangle meaning semiotics*" atau dikenal dengan teori segitiga makna.

Model triadik tanda dalam teori semiotik Pierce pertama adalah Representament. Representament adalah unsur tanda yang mewakili sesuatu (Zaimar, 2008: 4). Menurut Pierce (dalam Noth, 1990: 42) representamen merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut “objek yang dapat dirasakan” yang berfungsi sebagai tanda. Tugas representamen menyampaikan kepada pikiran seseorang tentang sesuatu dari tanda adanya sesuatu yang lain (Noth, 1990: 42).

Objek merupakan istilah kedua yang terdapat dalam model triadik tanda Pierce. Objek adalah sesuatu yang diwakili (Zaimar, 2008: 4). Bagi Pierce (dalam 1990, 2006: 42) objek merupakan sesuatu yang diwakili tanda. Tanpa objek tanpa tidak dapat menjadi wakil sesuatu. Tanpa tanda, objek tidak akan dipahami.

Adapun Unsur tanda ketiga dalam model triadik tanda Pierce adalah interpretant. Interpretant merupakan produk yang dihasilkan oleh hubungan, atau pembangunan relasi, antara representamen dengan objek (Vera, 2014: 22). Interpretan merupakan tanda yang tertera di dalam pikiran si penerima setelah melihat representament (Zaimar, 2008: 2). Interpretant merupakan hasil interpretasi dari seseorang yang menerima representament (Noth, 1990: 43).

#### **4. Teori Semiotika Roland Barthes**

Secara umum, teori semiotika Roland Barthes dipahami sebagai sebuah teori yang memahami tanda sebagai produk dari relasi antara penanda dan petanda yang maknanya memiliki dua tingkat tataran, yakni tataran denotasi sebagai tingkat pertama makna tanda, dan tataran konotasi yang merupakan tingkat kedua makna tanda. Maka, upaya untuk mengungkap



makna tanda tidak dapat dibatasi hanya pada pengungkapan makna denotasi tanda saja, tetapi juga harus sampai pada pengungkapan makna tanda secara konotasi (Vera, 2014: 28).

Namun, pembentukan makna tanda secara denotasi ataupun konotasi tidak dapat terjadi apabila antara penanda dan petanda tidak terjadi relasi. Dalam teori semiotika Barthes, penanda disebut Ekspresi (Vera, 2014: 27). Menurut Barthes (2012: 61) penanda adalah tataran ekspresi sebuah tanda. Penanda merupakan material sebuah tanda yang berfungsi memberi bentuk pada tanda, sekaligus menjadi mediator penanda. Melalui penanda, petanda dapat memiliki bentuk sehingga dapat dikenali secara empiris oleh pengguna dan penerima tanda. Oleh karena itu, penanda selalu bersifat empiris karena keberadaannya dapat diceraap oleh panca indera manusia.

Selain penanda, penciptaan tanda juga membutuhkan petanda. Petanda adalah isi tanda yang merupakan representasi mental dari sebuah objek. Petanda dapat dipahami sebagai sebuah konsep yang berada di balik tanda. Petanda merupakan sesuatu yang memungkinkan tanda memiliki makna. Dalam teori semiotika Barthes, petanda disebut Konten atau isi (Barthes, 2012: 61—68; Vera, 2014: 27).

Dalam semiotika Barthes, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa tanda dapat terciptka karena adanya hubungan atau relasi antara penanda dan petanda. Adapun relasi tersebut disebut signifikasi atau penandaan. Signifikasi merupakan proses penghubungan antara penanda dengan petanda. Fungsi signifikasi adalah menghasilkan tanda. Melalui

signifikasi tanda dimungkinkan untuk ada dan memiliki makna (Barthes, 2012: 75).

Dalam teori semiotika Barthes, signifikasi memiliki dua tingkatan, yakni signifikasi tingkatan tanda denotasi, dan signifikasi tingkatan tanda konotasi. Signifikasi tingkatan tanda denotasi merupakan tingkatan pertama dari proses relasi penanda dan petanda. Pada tingkatan ini, tanda yang diproduksi adalah tanda yang memiliki makna denotasi. Pada tingkatan ini, makna tanda belum memiliki perluasan. Pada tanda denotasi, makna yang diproduksi bersifat eksplisit, objektif, tertutup, langsung, pasti, dan stabil (Vera, 2014: 27).

Tingkatan signifikasi kedua dalam teori semiotika Barthes disebut tingkatan tanda konotasi. Menurut Vera (2014: 28), dalam teori semiotika Barthes, tanda konotasi dapat dipahami sebagai sebuah tanda yang penandanya mengalami keterbukaan makna, tidak langsung, bersifat subjektif, bervariasi, dan tidak stabil. Dalam tingkatan tanda konotasi, penanda mengalami kemungkinan-kemungkinan yang disebabkan oleh penafsiran-penafsiran baru. Oleh karena itu, dalam tingkatan tanda konotasi, makna selalu mengalami perubahan.

Namun, sebagaimana Saussure, Barthes (dalam Vera, 2014: 28) juga memahami bahasa sebagai fakta sosial. Maka, pemroduksian subjektivitas makna tanda tetap terikat pada konteks sosial tempat subjek pemroduksi tanda. Oleh karena itu, tidak ada makna tanda yang benar-benar terlepas dari konsensus yang membentuknya. Begitu juga makna konotasi yang diproduksi oleh signifikasi tingkat kedua, atau signifikasi tingkat tanda konotasi.

**Gambar 1.**  
**Peta Tanda Roland Barthes**

<b>Penandaan Tingkat Pertama</b>	<b>Penanda Denotasi</b>	<b>Petanda Denotasi</b>	
	<b>Tanda Denotasi</b>		
<b>Penandaan Tingkat Kedua</b>	<b>Penanda Konotasi</b>		<b>Petanda Konotasi</b>
	<b>Tanda Konotasi</b>		

Menurut Barthes (dalam Vera, 2014: 28) makna yang diproduksi tanda konotasi identik dengan mitos. Mitos merupakan sistem semiologis tingkat kedua. Dalam arti bahwa mitos adalah sistem semiologi khusus yang terbentuk dari rantai semiologis yang telah ada sebelumnya. Dalam mitos terdapat dua sistem semiologis yang salah satu sistemnya disusun berdasarkan keterpautannya dengan yang lain. Mitos adalah metabahasa, sebuah bahasa kedua (Barthes, 2011: 151, 161, 162).

### **E. Teori Representasi**

Representasi merupakan sebuah teori yang biasa digunakan dalam bidang kajian *Cultural Studies*. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kesamaan pemahaman kebudayaan yang dimiliki oleh teori ini dengan *Cultural Studies* tentang kedudukan bahasa dalam pembentukan dan penyebaran kebudayaan. *Cultural Studies* melihat bahwa kebudayaan merupakan praktik penandaan representasional. Itu berarti bahwa dalam kerangka berpikir *Cultural Studies* pembentukan dan penyebaran kebudayaan selalu menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Barker (2011: 9) berikut.

Cultural studies menyatakan bahwa bahasa bukanlah media

netral bagi pembentukan makna dan pengetahuan tentang dunia objek independen yang 'ada' di luar bahasa, tapi ia merupakan bagian utama dari makna dan pengetahuan tersebut .... Proses-proses produksi makna merupakan praktik signifikasi, dan memahami kebudayaan berarti mengeksplorasi bagaimana makna dihasilkan secara simbolis dalam bahasa sebagai suatu 'sistem signifikasi' .... Bahkan unsur utama *cultural studies* dapat dipahami sebagai studi atas kebudayaan sebagai praktik signifikasi representasi.

Pemahaman *Cultural Studies* tentang hubungan bahasa dan kebudayaan tersebut memiliki kesamaan dengan pemahaman Teori Representasi tentang hubungan bahasa dan kebudayaan. Menurut Hall (1997: 1) antara bahasa dengan kebudayaan memiliki keberkaitan, karena bahasa merupakan tempat tersimpannya nilai-nilai dan makna-makna budaya. Dengan kata lain, teori ini menganggap bahwa bahasa merupakan satu-satunya media yang dapat mewakili pikiran, gagasan, dan perasaan dalam sebuah kebudayaan. Maka, dapat disimpulkan, bahwa kebudayaan merupakan 'penyebaran makna'. Oleh karena itu, usaha untuk mengungkap kebudayaan adalah usaha untuk mengungkap praktik pemaknaan dan kebahasaan yang terdapat sebuah wilayah kebudayaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut tampak bahwa penguasaan teori representasi dalam bidang kajian *Cultural Studies* memiliki relevansi. Kesamaan asumsi dasar yang menjadi pijakan kedua hal tersebut merupakan bukti relevansi. Oleh karena itu, teori representasi dapat digunakan untuk mengungkap fenomena kebudayaan dalam bidang kajian *Cultural Studies*.

Upaya untuk memahami Teori Representasi dapat dimulai dari usaha untuk mengelaborasi apa yang disebut representasi itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2016), kata “representasi” diartikan sebagai “perbuatan mewakili, keadaan mewakili, apa yang mewakili, dan perwakilan.” Adapun Oxford Dictionaries (2014) mengartikan kata *representation* sebagai *the action of speaking or acting on behalf of someone or the state of being so represented, dan the description or portrayal of someone or something in a particular way or as being of a certain nature.*

Menurut Barker (2014: 255) representasi dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan simbolisme yang mencerminkan dunia objek yang independen. Berdasarkan pendefinisian tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa representasi merupakan sebuah praktik, sebuah kegiatan, atau suatu upaya yang melibatkan hal-hal atau elemen-elemen yang dapat membuat simbolisasi atas objek-objek yang berdiri sendiri. Adapun kegiatan, aktivitas, atau upaya pembuatan simbol tidak dapat dilepaskan dari bahasa atau tanda. Oleh karena itu, representasi merupakan sebuah praktik kebahasaan yang berusaha menghubungkan manusia dengan hal di luar manusia.

Pemahaman Barker tersebut memiliki persamaan dengan pemahaman Stuart Hall mengenai representasi. Hall (1997: 15) mendefinisikan representasi sebagai penggunaan bahasa untuk menyatakan makna atau sebuah perwakilan dunia penuh makna kepada orang lain. Definisi ini merupakan pemahaman dasar mengenai konsep representasi. Pendefinisian tersebut diperluas pemahamannya oleh Hall dalam kaitannya dengan studi kebudayaan. Hal tersebut disebabkan oleh keberadaan bahasa yang menjadi sentrum bagi pemroduksian dan pendistribusian kebudayaan dalam sebuah masyarakat.

Hall (1997: 15) melihat bahwa representasi sebagai sebuah konsep yang menghubungkan bahasa dan makna dengan kebudayaan. Bahkan representasi merupakan bagian esensial dari pemroduksian dan penyebaran kebudayaan.

Teori representasi merupakan teori yang berpandangan bahwa untuk memahami konstruksi kebudayaan, seorang peneliti harus mengungkap setiap representasi yang dihasilkan oleh praktik kebahasaan. Hal tersebut disebabkan oleh keberadaan representasi yang berfungsi sebagai penghubung antara bahasa dan makna dengan kebudayaan (Hall, 1997: 15). Oleh karena itu, usaha mengungkap konstruksi sebuah kebudayaan berarti mengungkap praktik kebahasaan dan pemaknaan yang merepresentasinya.

Secara definitif, representasi dapat dipahami sebagai penggunaan bahasa untuk menyampaikan, atau melambangkan, makna kepada orang lain. Representasi merupakan bagian esensial dari proses pembentukan dan pertukaran makna antaranggota sebuah kebudayaan. Representasi melibatkan penggunaan bahasa, tanda, dan imaji yang mewakili sesuatu (Hall, 1997: 15). Dengan kata lain, representasi merupakan pemroduksian pengetahuan tentang sebuah kebudayaan dalam pikiran manusia melalui bahasa. Sebagaimana yang disampaikan Hall (1997: 17) berikut.

*Representation is the production of the meaning of the concepts in our mind through language. It is the link between concepts and language which enable to us to refer to either the 'real' world of objects, people or events, or indeed to imaginary worlds of fictional objects, people and events.*

Dalam teori representasi, proses pemroduksian makna bahasa melibatkan praktik perelasian antara benda, konsep, dan tanda. Adapun proses tersebut terdiri dari dua proses sistem representasi, yaitu: proses yang melibatkan sistem dan proses yang melibatkan bahasa. Tanpa kedua proses tersebut sebuah representasi tidak akan terbangun. Oleh karena itu, usaha untuk menungkap sebuah representasi yang terdapat dalam sebuah kebudayaan harus berangkat dari pengungkapan atas kedua proses tersebut.

Proses sistem representasi yang pertama adalah proses yang melibatkan sistem. Dalam proses tersebut, peneliti mengorelasikan objek, masyarakat, dan peristiwa dengan seperangkat konsep atau representasi mental yang terdapat dalam pengetahuan manusia. Hal tersebut bertujuan agar peneliti, atau seseorang yang hendak memahami sebuah kebudayaan, dapat melakukan praktik perujukan antara sesuatu yang berada di dalam pengetahuannya dan sesuatu yang berada di luar pengetahuannya. Pada proses ini praktik pemaknaan bergantung pada hubungan yang tercipta antara benda di dunia objektif dengan sistem konseptual yang bekerja sebagai representasi mental pada pengetahuan manusia (Hall, 1997: 17-18).

Namun, proses yang melibatkan sistem saja tidak cukup untuk memproduksi representasi dari sebuah kebudayaan. Diperlukan praktik pertukaran makna dan konsep agar sebuah representasi dapat tercipta. Hal tersebut dapat dilakukan oleh manusia hanya dengan cara melibatkan bahasa. Proses yang melibatkan bahasa merupakan proses kedua dalam sistem representasi. Proses tersebut merupakan proses yang penting. Hal tersebut disebabkan oleh fungsi proses tersebut yang

bertujuan untuk mengonstruksi makna. Sebagaimana yang disampaikan Hall (1997: 18) berikut.

*However, a shared conceptual map is not enough. We must be able to represent or exchange meanings and concepts, and we can only do that when we also have access to a shared language. Language is therefore the second system of representation involved in the overall process of constructing meaning. Our shared conceptual map must be translated into a common language, so that we can so correlate our concepts and ideas with certain written words, spoken sound or visual images. The general term we use for words, sounds, or imagery which carry meaning is signs. These signs stand for or represent concept and conceptual relations between them which we carry around in our heads and together they make up meaning-system of our culture.*

Dalam keberadaannya, representasi dapat dibangun berdasarkan tiga ragam pendekatan. Tujuan dari ketiga representasi tersebut adalah untuk menjelaskan representasi makna melalui kerja kebahasaan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan reflektif. Pendekatan reflektif merupakan pendekatan mimetik. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pandangan dalam pendekatan tersebut yang memahami bahasa sebagai cerminan kenyataan (Hall, 1997: 24).

Ragam pendekatan kedua dalam mengungkap representasi adalah pendekatan intensional. Secara sederhana, pendekatan intensional merupakan pendekatan yang berpandangan bahwa makna bahasa bergantung pada maksud penulis. Pada pendekatan tersebut, bahasa dipahami sebagai ekspresi individual. Dengan kata lain, dalam pendekatan ini, bahasa



dipahami sebagai praktik permainan pribadi (Hall, 1997: 25).

Pendekatan konstruksionis merupakan ragam pendekatan ketiga yang terdapat dalam teori representasi. Di antara ragam pendekatan yang terdapat dalam teori tersebut, pendekatan inilah yang dipandang paling representatif digunakan untuk mengungkap praktik pemaknaan dalam sebuah kebudayaan. Menurut Hall (1997: 25) bahasa bukanlah semata-mata cerminan realitas sebab setiap praktik pemaknaan merupakan sesuatu yang khas, yang terikat pada satu kebudayaan. Selain itu, bahasa juga bukan merupakan fakta pribadi, melainkan fakta sosial. Hal tersebut disebabkan oleh adanya faktor konvensional bahasa yang terikat pada kesepakatan masyarakat tertentu.

Pendekatan konstruksionis merupakan pendekatan ketiga yang merupakan ragam pendekatan dalam teori representasi. Pendekatan ini berpandangan bahwa usaha manusia untuk memahami dunia yang berada di luar dirinya tidak mungkin dapat dilakukan tanpa bahasa. Hal tersebut disebabkan oleh keberadaan bahasa yang mengonstruksi makna dunia yang berada di luar diri manusia. Adapun pengonstruksian makna itulah yang mengakibatkan manusia memiliki pengetahuan atas dunia yang berada di luar dirinya (Hall, 1997: 25).

Namun, hal tersebut tidak akan terjadi apabila manusia tidak mampu memproduksi makna bahasa. Oleh karena itu, agar manusia dapat memproduksi pengetahuan atas dunia luar berdasarkan makna yang dikonstruksinya, bahasa haruslah berwatak sosial. Watak tersebut memungkinkan manusia untuk melakukan pemroduksian dan pertukaran pengetahuan (Hall, 1997: 25-26).●

# BAB VI

## PARADIGMA PENELITIAN BUDAYA

### A. PENGERTIAN PENELITIAN

Sebuah ilmu pengetahuan dapat dikembangkan dengan cara penelitian. Melalui upaya atau kegiatan penelitian, sebuah ilmu pengetahuan tidak hanya dapat dibangun, tetapi juga dapat terus dikembangkan, serta diperbarui pemahamannya. Begitu dalam juga pembangun dan pengembangan ilmu pengetahuan budaya, penelitian menjadi kegiatan kunci atau kegiatan utama yang harus dilakukan.

Dalam tataran leksikal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(2020) memberi dua arti pada kata penelitian, yakni: 1) pemeriksaan yang teliti atau penyelidikan, dan 2) kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh KBBI tersebut dapat dipahami bahwa dalam penelitian kegiatan difokuskan tidak saja pada tujuan untuk mengungkap atau membuka pengetahuan, baik yang dianggap telah ada ataupun yang belum ditemukan, dianggap sudah ada atau tersembunyi di alam yang hanya memerlukan pengungkapannya. Namun,

juga pada tujuan untuk memberikan pengetahuan baru atau melakukan kritisasi pada pengetahuan yang telah ada, sehingga tercipta pengetahuan yang benar (Soehartono, 2004: 1--2).

Dalam penelitian, upaya untuk menemukan pengetahuan yang benar harus didasarkan pada aturan atau sistem tertentu. Hal tersebut disebabkan sifat pengetahuan ilmiah yang harus dapat diverifikasi kebenarannya, sehingga tercipta sebuah pengetahuan yang logis-empiris yang sah. Agar sistem pengetahuan dapat terbentuk, sebuah penelitian memerlukan metode. Itu karena metode merupakan prosedur sistemik pembentuk pengetahuan ilmiah. Oleh karena itu, metode merupakan bagian integral dalam kegiatan penelitian. Maka, tidak ada penelitian tanpa metode.

## **B. PERSPEKTIF PENELITIAN BUDAYA**

Penelitian kebudayaan adalah sesuatu yang unik dan khas. Adapun dikatakan demikian sebab penelitian kebudayaan mencakup segala hal yang terdapat dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam penelitian budaya seorang peneliti harus melakukan proses berpikir reflektif. Berpikir reflektif penting dalam penelitian budaya sebab dalam upaya untuk memahami fakta sasaran, penelitian budaya selalu melibatkan perspektif interpretif dan kemanusiaan (Maryaeni, 2005: 2).

Penggunaan perspektif interpretif dan kemanusiaan tersebut menempatkan penelitian budaya bersifat penelitian kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln (2009: 2) penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai penelitian yang menggunakan latar alamiah, yang bermaksud untuk menafsirkan berbagai fenomena yang terjadi. Dalam penelitian kualitatif, penafsiran tersebut dilakukan

dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada. Oleh karena itu, penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai penelitian yang memiliki fokus perhatian dengan beragam metode, yang mencakup pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap subjek kajian.

Menurut Moleong (2017: 6--13) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur-prosedur analisis yang bersifat statistical atau kuantitatif. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya peneliti untuk melakukan secara teliti dan rigid pada berbagai bentuk bermakna dengan bersandar pada gambaran holistik. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berciri alamiah, manusia sebagai instrument penelitian, analisis data secara induktif, dan mementingkan proses daripada hasil.

Kebudayaan hadir dihadapan manusia dalam berbagai simbol bermakna. Berbagai benda budaya yang tampak dalam kehidupan manusia merupakan manifestasi simbolik dari nilai-nilai yang terdapat kebudayaan manusia. Oleh karena itu, penelitian budaya bukanlah penelitian yang menempatkan fakta keras sebagai fokus utamanya. Fokus utama penelitian budaya adalah berbagai makna yang terdapat di balik berbagai fenomena kebudayaan yang dijumpai oleh panca indera manusia (Maryaeni, 2005: 2; Endraswara, 2017: 15). Inilah mengapa penelitian kualitatif relevan dengan untuk digunakan dalam penelitian budaya.

### **C. PARADIGMA ILMU BUDAYA**

Untuk memperoleh pengetahuan, dibutuhkan kerangka berpikir dan cara pandang. Pada tataran tersebut, keberadaan

paradigma merupakan sarana utama dalam pembentukan epistemology ilmu budaya. Oleh karena itu, usaha untuk memahami keberadaan pengetahuan Ilmu Budaya tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk memahami paradigma-paradigma yang ada di dalam ilmu tersebut.

Secara etimologi, kata paradigma berasal dari kata dalam bahasa Yunani, *para deigma*. Kata dalam bahasa Yunani tersebut merupakan kata bentukan dari dua kata, yakni: para yang berarti di samping, di sebelah, dan dekynai yang berarti memperlihatkan suatu model, contoh, arketip, atau ideal. Jadi, secara etimologi, kata paradigma dapat dipahami sebagai upaya untuk memperlihatkan suatu model, contoh, arketip, atau ideal yang berada di sebelah atau di samping (Bagus, 2000: 779).

Paradigma melekat pada praktik keilmuan. Paradigma adalah kerangka berpikir yang dimiliki oleh sebuah ilmu. Paradigma memuat akumulasi konsep, prinsip, serta nilai yang digunakan oleh sebuah ilmu untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan . Paradigma hadir dalam bentuk cara pandang dan pola pemikiran yang dijadikan kaidah sebuah ilmu dalam menyiasati realitas dan menemukan pemahaman (Maryaeni, 2005: 6).

Setiap ilmu memiliki paradigma. Paradigma membentuk kekhasan setiap ilmu. Kemampuan paradigma dalam membentuk kekhasan setiap ilmu disebabkan oleh keberadaan paradigma itu sendiri yang merupakan sistem filosofi besar sebuah ilmu. Paradigma sebagai sistem filosofi besar ilmu memuat aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu yang tidak dapat dipertukarkan. Oleh karena itu, bagi sebuah ilmu, paradigma dipahami dan dihadapi sebagai sistem kepercayaan

yang menempatkan ilmu (dan ilmuwannya) ke dalam suatu pandangan dunia tertentu. Keberadaan pandangan dunia tertentu dalam sebuah paradigma itulah yang menjadikan setiap ilmu memiliki kekhasannya masing-masing dalam memandang, memecahkan, dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang dihadapinya (Denzin & Lincoln, 2009: 3).

Selain memberikan sifat khas pada sebuah ilmu, paradigma juga dapat memberikan kontribusi bagi terbentuknya sebuah teori baru dalam suatu ilmu. Kelahiran suatu teori, bagi Kuhn (1989: 25-27), sesungguhnya merupakan tanggapan atas teori-teori lain yang sebelumnya atau bahkan sedang digunakan dan disepakati oleh suatu komunitas akademik tertentu. Teori baru terlahir karena munculnya suatu fakta-fakta anomali yang mana teori yang sebelumnya dipandang kurang atau tidak mampu menjelaskan masalah-masalah penelitian. Pandangan tersebut, ujar Kuhn (1991: 11), disebut juga paradigma:

“..praktek ilmiah nyata yang diterima—contoh-contoh yang bersama-sama mencakup dalil, teori, penerapan, dan instrumentasi—menyajikan model-model yang daripadanya lahir tradisi-tradisi padu tertentu dari riset ilmiah.”

Demikianlah, dalam kerangka pemikiran Kuhn, bahwa perkembangan keilmuan termasuk lahirnya suatu teori sesungguhnya bagian dari revolusi paradigma yang dijelaskan dalam alur pra-paradigma, sains normal, fase anomali, fase kritis dan revolusi (paradigma baru) yang diakui atau terlegitimasi.

Penelitian kebudayaan merupakan hal yang unik sebab, selain penelitian ini mengikuti karakteristik budaya yang

terintegrasi, merupakan refleksi atas fenomena. Karakteristik ini menuntut peneliti budaya, sebagaimana yang disampaikan oleh Mead dan Geerts, harus turun ke lapangan. Lapangan atau konteks lapangan menjadi sangat penting bagi penelitian kebudayaan, sebab peneliti budaya tidak hanya belajar dari teori atau penemuan-penemuan yang telah ada lebih dulu, tetapi lebih dari itu.

Usaha ini memperlihatkan bahwa penelitian kebudayaan merupakan upaya menangkap realitas, tidak hanya mengejar hal-hal yang faktual atau kasat mata tetapi juga fenomena abstrak. Ini juga kiranya yang menjadi faktor mengapa penelitian kebudayaan bersifat holistik sebab meneliti kebudayaan berarti mempelajari manusia.

Manusia memiliki pemikiran. Pemikiran manusia tersebut senantiasa berubah-ubah atau mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada ruang dan waktu. Ini juga yang mengakibatkan perubahan budaya. Maka, peneliti budaya tidak hanya mencari jawaban mengenai kebudayaan yang diteliti saja, tetapi juga mencari dan memahami perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada satu wilayah kebudayaan.

Kebudayaan bukanlah sesuatu yang bersifat pribadi, tetapi sesuatu yang merupakan milik bersama. Secara umum, ada empat ciri khas fenomena budaya, yakni: milik bersama, hasil belajar, didasarkan lambang, dan merupakan kesatuan integratif. Milik bersama berarti bahwa budaya itu merupakan perbuatan yang dapat dipahami dan didukung semua anggota. Hasil belajar maksudnya bahwa budaya adalah bukan warisan biologis. Didasarkan lambang berarti bahwa budaya menghadirkan penafsiran yang berbeda-beda, bahkan

terkadang membingungkan peneliti dan pemilik budaya. Merupakan kesatuan integratif berarti budaya itu bersifat total dan tidak parsial.

Di luar empat ciri fenomena, kiranya, ada baiknya ditambahkan satu faktor lagi, yakni relatif. Budaya memiliki kekuatan relatif. Oleh karena itu, budaya senantiasa memiliki satu relativitas. Relativitas ini terdiri dari dua tataran, yakni: relativitas ideologis dan relativitas metodologis. Relativitas ideologis setiap budaya merupakan konfigurasi unik yang memiliki citarasa khas dan gaya serta kemampuan tersendiri. Relativitas metodologis dalam arti bahwa relativitas ini beranggapan bahwa tidak ada satu pun budaya yang sama. Relativisme budaya membawa pada kebebasan peneliti untuk memahami budaya. Dalam arti bahwa peneliti bebas untuk menentukan langkah-langkah penelitiannya tergantung pada fenomena budaya yang ia teliti.

Kebebasan yang dimiliki oleh peneliti budaya ini tidak berarti bahwa peneliti budaya tidak memiliki paradigma. Dalam melakukan penelitian kebudayaan, seorang peneliti budaya didasarkan pada paradigma etik dan emik. Paradigma etik adalah paradigma yang menekankan jarak antara peneliti dan yang diteliti, sementara paradigma emik adalah paradigma peneliti budaya tidak lagi berjarak.

Dalam penelitian budaya yang mengikuti paradigma emik peneliti harus masuk ke dalam fenomena budaya yang menjadi fokus kajiannya. Paradigma ini menuntut peneliti untuk berpartisipasi secara aktif dengan objek yang menjadi fokus kajiannya. Kritik terhadap paradigma ini adalah bahwa peneliti yang mengikuti paradigma ini cenderung menghasilkan penelitian yang subjektif. Berpartisipasi dan leburnya peneliti ke



dalam objek kajian mengakibatkan penelitian budaya ini tidak lagi memiliki jarak antara peneliti dan yang diteliti.

Sebagai sebuah ilmu, Ilmu Budaya memiliki paradigma yang tampak dalam setiap praktik keilmuannya. Adapun paradigma Ilmu Budaya beragam. Hal tersebut tampak pada keberagaman paradigma dalam Ilmu Budaya. Setidaknya terdapat empat paradigma dalam Ilmu Budaya, yaitu: 1) positivis, 2) fenomenologis, 3) hermeneutis, dan 4) postmodern.

## **1. Paradigma Positivis**

### **Positivisme sebagai Aliran Filsafat**

Paradigma pertama yang memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum adalah paradigma positivis. Paradigma positivis merupakan paradigma ilmu yang diturunkan dari aliran filsafat positivisme.

Positivisme merupakan salah satu aliran filsafat yang memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmiah. Aliran filsafat ini muncul pertama kali di Perancis pada kisaran abad 19 dengan tokohnya August Comte (1798—1857), seorang filsuf Perancis yang semasa hidup bekerja sebagai sekretaris seorang bangsawan yang bernama Henri de Saint-Simon. Meskipun pemikirannya memberikan kontribusi yang penting bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan ilmiah, semasa hidup sampai wafat, Comte hidup dalam kemiskinan.

Aliran filsafat positivisme muncul sebagai jawaban atas ketidakmampuan aliran-aliran filsafat yang telah ada pada abad 19 (seperti rasionalisme, idealisme, atau empirisme)

dalam menjalankan tugasnya sebagai pendorong dan pemberi landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmiah. Aliran filsafat tersebut mendasarkan pemahamannya mengenai kenyataan pada fakta positif. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pemahaman bahwa segala sesuatu yang berada di luar fakta atau kenyataan harus dikesampingkan dalam filsafat dan ilmu pengetahuan sebab tidak bermakna apa-apa (Ihsan, 2010: 182).

Pemahaman positivisme tersebut bersandar dan berdasar pada pandangan Comte tentang tugas filsafat. Bagi Comte (dalam Hamersma, 1992: 86; dalam Bertens, 1998: 72), tugas filsafat tidak hanya mengoordinasi ilmu pengetahuan dan memperlihatkan kesatuan di antara keberagaman ilmu pengetahuan, tetapi juga filsafat juga bertugas untuk menyusun suatu teori umum sebagai kerangka untuk hasil semua ilmu khusus. Oleh karena itu, Comte (dalam Hamersma, 1992: 86) berpendapat bahwa sebagai ilmu tugas filsafat adalah menyelidiki fakta-fakta dan hubungan yang terdapat antara fakta-fakta, bukan menanyakan "hakikat" benda-benda atau "penyebab yang sebenarnya".

Berdasar dan bersandar pada pemahaman tentang tugas filsafat tersebut, Comte menilai apa yang dilakukan oleh aliran-aliran filsafat yang telah ada sebelumnya dalam melakukan penyelidikan tentang ada, substansi, atau sebab adalah salah dan tidak bermakna. Hal tersebut disebabkan oleh adanya ketidakmampuan hasil-hasil penyelidikan yang dilakukan oleh aliran-aliran filsafat tersebut untuk dipecahkan dan diverifikasi kebenarannya melalui penyelidikan yang berkaitan dengan pengalaman. Sebagai gantinya, Comte mengajukan sebuah paradigam kefilosofan baru yang disebut positivisme, sebuah

paradigma yang berakar pada pemahaman rasionalisme yang dipadukan dengan empirisme, serta menempatkan nilai objektivitas menjadi hal yang penting (Bagus, 2000: 858).

Secara ringkas, dasar-dasar pemikiran positivisme dapat dijabarkan ke dalam lima butir, yakni: 1) dalam alam terdapat hukum yang dapat diketahui, 2) dalam alam penyebab benda-benda tidak dapat diketahui, 3) setiap pernyataan sederhana mengenai fakta, baik khusus atau umum, tidak bermakna meskipun masuk akal, 4) hanya hubungan antara fakta yang dapat diketahui, dan 5) perkembangan intelektual merupakan sebab utama perubahan sosial (Osborne, 2001: 135).

Dalam perkembangannya, aliran filsafat positivisme yang ditokohi oleh Comte tersebut memberikan pengaruh penting pada keberadaan dan perkembangan ilmu pengetahuan ilmiah. Hal tersebut dibuktikan dengan kelahiran Ilmu Sosiologi. Selain itu, pengaruh aliran filsafat tersebut juga tampak pada pemikiran-pemikiran Emile Durkheim, Jeremy Betham (1748—1832), Jhon Stuart Mill (1806—1873), dan Herbert Spencer (1820—1903).

### **Positivisme sebagai Paradigma Ilmu**

Sebagai paradigma, paradigma positivisme merupakan sebuah paradigma ilmu yang menekankan aspek faktual pengetahuan, dan dikenal dengan nama paradigma positivis (Bagus, 2000: 858). Paradigma tersebut menganggap bahwa sebuah pengetahuan dikatakan sah itu apabila pengetahuan tersebut memiliki hubungan timbal-balik dengan kenyataan secara langsung (Maryaeni, 2005: 3). Di dalam paradigma tersebut, bukan spekulasi teoretis yang membentuk pengetahuan,

melainkan pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan yang dilakukan oleh seorang ilmuwan terhadap hubungan-hubungan kenyataan yang diamati. Oleh karena itu, pelbagai bentuk pengetahuan yang terbentuk berdasarkan tindakan spekulasi ditolak oleh paradigma positivis.

Bagi paradigma positivis, kenyataan adalah sesuatu yang dapat ditangkap, dipelajari, dan dipahami. Agar sebuah kenyataan dapat ditangkap, dipelajari, dan dipahami, kenyataan tersebut harus hadir secara faktual dan bereksistensi, dikendalikan oleh hukum-hukum alam, dan memiliki mekanisme yang tetap atau tidak dapat diubah. Artinya, bahwa sesuatu itu dapat disebut sebagai kenyataan dalam paradigma positivis, sesuatu tersebut harus hadir dalam keadaan alami benda-benda, yang keberadaannya terangkum secara konvensional dalam bentuk generalisasi yang bebas-waktu dan bebas konteks, serta keberadaannya memiliki hukum sebab-akibat (Denzin & Lincoln, 2009: 135).

Bentuk dan watak kenyataan tersebut penting bagi paradigma positivis. Hal tersebut disebabkan oleh keyakinan paradigma tersebut yang menganggap bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk mendapatkan penjelasan dan pemahaman mengenai kenyataan secara objektif. Objektivitas kenyataan merupakan hal penting dalam membentuk pengetahuan yang sah. Tanpa objektivitas tersebut, pengetahuan atas kenyataan tidak dapat ditetapkan, sebab hubungan dan hukum-hukum yang terdapat dalam kenyataan tersebut akan senantiasa tidak dapat diukur. Kestabilan dan kemandirian kenyataan (baca: lepas dari konteks ruang-waktu) adalah faktor yang membuat kenyataan dapat dipahami dan dijelaskan. Kestabilan dan kemandirian tersebut menjadikan kenyataan dapat diukur.

Agar kenyataan dapat diukur, dan pengukuran tersebut dapat menghasilkan pengetahuan, maka seorang ilmuwan tidak hanya harus bersandar pemroduksian pengetahuan melalui aktivitas rasional, tetapi juga harus berdasar pada tindakan empiris objektif. Aktivitas dan tindakan tersebut penting, sebab melalui aktivitas dan tindakan itu pengetahuan manusia diperoleh. Aktivitas rasional saja tidak cukup untuk memperoleh pengetahuan yang utuh. Hal tersebut disebabkan oleh pengenalan objek hanya berdasarkan rasio manusia dapat menyebabkan kesalahan. Pengenalan manusia atas objek harus mampu diverikasi kebenarannya melalui tindakan empiris-objektif. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, paradigma positivis menganggap bahwa pengenalan indra itu penting, tetapi untuk memperoleh pengetahuan yang sah pengenalan indra tersebut harus dibantu dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen (Ihsan, 2010: 182).

Pemahaman mengenai kenyataan yang berwatak stabil dan mandiri, serta perlunya pengenalan empiris-objektif dan rasionalisasi atas objek memosisikan kerja pemerolehan pengetahuan dalam paradigma positivis sebagai kerja yang berprinsip dualis dan objektivis. Dualitas dalam kerja epistemologi paradigma positivis muncul disebabkan oleh adanya pemisahan antara peneliti dengan yang diteliti. Adapun watak objektivis hadir disebabkan oleh paradigma positivis senantiasa menolak nilai dan bias yang muncul dalam sebuah pengetahuan. Bagi paradigma tersebut, pengetahuan yang sah adalah pengetahuan yang didasari oleh temuan-temuan yang dapat diulang dalam kenyataannya (Denzin & Lincoln, 2009: 135).

## 2. Paradigma Fenomenologis

Apabila paradigma dipandang sebagai kerangka berpikir yang dimanifestasikan dalam cara pandang dan pola pemikiran yang dijadikan kaidah sebuah ilmu dalam menyiasati realitas dan menemukan pemahaman, maka fenomenologi dapat dikategorikan sebagai tidak hanya sebagai metode filsafat, tetapi juga paradigma.

### Pengertian Fenomenologi

Kata fenomenologi pertama kali diperkenalkan oleh J.H. Lambert pada tahun 1764 untuk menunjuk pada Teori Penampakan. Namun, fenomenologi benar-benar muncul sebagai gerakan filsafat setelah seorang filsuf Perancis, Edmund Husserl (1859—1938), menerbitkan dua jilid karyanya yang berjudul *Logical Investigation* pada tahun 1900 dan 1901.

Secara etimologi, kata fenomenologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani *phainomenon* yang berarti “gejala”. (Osborne, 2001: 153). Di bidang keilmuan filsafat, fenomenologi dipahami sebagai filsafat deskriptif pengalaman. Adapun hal tersebut disebabkan oleh fokus filsafat tersebut yang berusaha menggali tindakan pendeksripsian pengalaman yang dimiliki oleh manusia. Jadi, fenomenologi dapat dipahami sebagai ilmu tentang pengalaman manusia dalam kaitannya dengan usaha pendeksripsian manusia atas gejala-gejala yang hadir melalui pengalaman tersebut. Sebagaimana yang tampak dalam pernyataan Sokolowski (2000: 2) sebagai berikut: *“Phenomenology is the study of human experience and of the ways things present themselves to us in and through such experience.”*

## **Fenomenologi sebagai Metode dan Filsafat**

Fenomenologi merupakan (deskripsi) yang jelas terhadap struktur pokok dari benda yang kongkrit, seperti yang nampak, bukan dalam persepsi manusia. Fenomenologi bertujuan untuk mempelajari dan menggambarkan ciri-ciri intrinsik gejala sebagaimana gejala tersebut menyingkapkan diri kepada kesadaran manusia. Oleh karena itu, fenomenologi berpendapat bahwa untuk mendapatkan pengetahuan mengenai gejala seseorang harus bertolak dari keberadaannya sebagai subjek beserta kesadarannya sembari berupaya untuk kembali ke "kesadaran murni (Bagus, 2000: 236).

Fenomenologi merupakan metode dan filsafat. Sebagai metode, fenomenologi memaparkan prosedur yang harus diikuti dalam memahami fenomena murni. Sebagai metode, fenomenologi mendasarkan diri pada prosedur untuk mencapai kesadaran murni melalui pembebasan diri dari pengalaman dan gambaran hidup sehari-hari. Adapun sebagai filsafat, fenomenologi bertujuan membeti pengetahuan yang perlu dan esensial mengenai gejala. Dalam arti, sebagai filsafat, fenomenologi bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai gejala dan kesadaran yang murni (Bagus, 2000: 236).

## **Fenomenologi Edmund Husserl**

Fenomenologi Husserl memfokuskan studinya pada pengalaman kesadaran dan penemuan esensi. Dalam fenomenologi ini, pengetahuan terbentuk bukan berdasarkan pengalaman langsung, melainkan pengalaman yang telah mengimplisitkan penafsiran dan klasifikasi. Adapun hal tersebut didasarkan oleh kecenderungan fenomenologi tersebut untuk

melakukan analisis deskriptif dan introspektif mengenai kedalaman semua bentuk kesadaran dan pengalaman langsung, seperti moral, kepercayaan, estetis, konseptual, dan indrawi (Bagus, 2000: 236).

Tujuan yang hendak dicapai oleh fenomenologi dengan berdasarkan pemahaman tersebut adalah tersingkapnya dunia kehidupan (*Lebenswelt*) dan kehidupan subjektif dan batiniah (*Erlebnisse*). Tersingkapnya dunia kehidupan dan kehidupan subjektif dan batiniah tersebut didapat melalui penyingkapan atas dunia esensial (*wessenschau*). Maka, dunia esensial merupakan dunia yang dipahami sebagai realitas dalam fenomenologi (Bagus, 2000: 236).

### **Konsep Intensionalitas**

Agar dapat memahami alur pemikiran fenomenologi ini perlu dipahami beberapa konsep-konsep kunci yang terdapat di dalamnya. Konsep pertama yang menjadi poros pemikiran fenomenologi ini adalah intensionalitas. Secara etimologi, kata intensionalitas berasal dari kata dalam bahasa Latin *intendere* yang artinya “menuju ke”. Dalam fenomenologi Husserl, intensionalitas dipahami sebagai tindakan tertuju pada kesadaran manusia pada sebuah gejala atau objek. Menurut Husserl bahwa kesadaran manusia tidak dapat dibayangkan tanpa sesuatu yang disadari. Oleh karena itu, supaya ada kesadaran harus diandaikan bahwa a) ada suatu subjek, b) subjek yang terbuka untuk dan pada objek-objek, dan c) ada objek-objek. Adapun hal tersebut terjadi disebabkan oleh keberadaan kesadaran yang tidak bersifat pasif (Hamersma, 1992: 117).

Dalam fenomenologi Husserl, kesadaran merupakan



sesuatu yang aktif. Adapun hal tersebut disebabkan oleh pemahaman fenomenologi tersebut yang meyakini bahwa tindakan menyadari sesuatu berarti mengubah sesuatu. Dalam tindakan menyadari, objek atau gejala yang disadari dijadikan sesuatu yang-ada-bagi-saya. Oleh karena itu, fenomenologi ini menganggap bahwa kesadaran itu tidak seperti cermin atau foto. Antara kesadaran (*noesis*) dan objek kesadaran (*noema*) terdapat interaksi. Namun, interaksi tersebut bukan interaksi antara dua unsur yang sejajar, melainkan interaksi yang menempatkan kesadaran pada posisi utama. Hal tersebut disebabkan oleh keberadaan objek kesadaran yang hanya merupakan ciptaan dari kesadaran. Maka, kesadaran merupakan batu sendi utama pembentukan pengetahuan mengenai objek atau gejala (Hamersma, 1992: 117).

### **Tiga Jenis Reduksi**

Agar kesadaran mampu menghadirkan kesadaran murni atas objek, fenomenologi Husserl mengajukan metode penyingkapan objek dengan jalan reduksi. Adapun tujuan reduksi tersebut adalah agar hal-hal yang dapat mengganggu kesadaran dalam menyingkap hakikat objek dapat disingkirkan. Reduksi-reduksi ini yang menyingkirkan semua hal yang mengganggu kalau kita ingin mencapai *wesensschau*. Reduksi pertama: menyingkirkan segala sesuatu yang subyektif. Sikap kita harus obyektif, terbuka untuk gejala-gejala yang harus “diajak bicara”. Dua: menyingkirkan seluruh pengetahuan tentang obyek yang diselidiki dan diperoleh dari sumber lain. Tiga: menyingkirkan seluruh reduksi pengetahuan. Segala sesuatu yang sudah dikatakan oleh orang lain harus, untuk

sementara dilupakan. Kalau reduksi-reduksi ini berhasil, gejala sendiri dapat memperlihatkan diri, menjadi fenomena (Hamersma, 1992: 117).

### **3. Paradigma Postmodern**

#### **Pengertian Paradigma Posmodern**

Paradigma posmodern yang muncul dan menghantui khazanah pemikiran kebudayaan di Indonesia saat ini sebenarnya telah muncul sejak lama. Dalam konteks historis, istilah posmodernisme telah muncul semenjak tahun 1930-an. Frederico de Oniz adalah orang pertama yang menggunakan istilah ini untuk menyatakan periode peralihan dari modernisme awal ke modernisme dengan kualitas lebih tinggi. Pada tahun 1940-an istilah ini muncul dalam ranah arsitektur, dan pada tahun 1960-an muncul di ranah sastra (Muhadjir, 2001).

Namun, istilah tersebut baru benar-benar menemukan momentumnya ketika Jean-Francois Lyotard menggunakan istilah ini sebagai judul bukunya yang terkenal *La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir* pada tahun 1977 (Muhadjir, 2001). Meskipun, istilah posmodernisme telah ramai diperdebatkan sejak saat itu, tetapi, sampai saat ini, istilah posmodernisme masih menimbulkan ketidakpastian ontologism. Itu tampak pada masih ramainya perdebatan mengenai pemahaman baku terhadap istilah postmodernisme di ranah filsafat dan ilmu sosial-humaniora.

Menurut Lyotard (1984) posmodernisme adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi pengetahuan pada masyarakat yang paling berkembang. Secara definitif,

istilah tersebut dapat dipahami sebagai sebuah istilah yang pemaknaannya didasari oleh rasa ketidakpercayaan terhadap metanarasi yang menjadi narasi besar yang tersembunyi (atau bersembunyi) di balik pelbagai narasi yang bertebaran di berbagai ranah kebudayaan modern. Dalam kebudayaan modern, metanarasi merupakan "logos" yang memiliki legitimasi dan otoritas bagi kebenaran yang diamini oleh seluruh umat manusia modern. Metanarasi tersebut bersifat niscaya dan monolitik bagi manusia modern. Maka, posmodernisme, merujuk pemahaman Lyotard tersebut, adalah sebuah konsep yang didasari pada rasa ketidakpercayaan terhadap keniscayaan dan hal-ihwal yang monolitik.

Namun, menurut Lyotard (1984), rasa ketidakpercayaan terhadap keniscayaan dan kemonolitan sebuah kondisi. Hal tersebut karena ketidakpercayaan tersebut tidak hanya tidak hanya berkaitan dengan hal-ihwal non-fisik, tetapi juga fisik. Rasa ketidakpercayaan tersebut hadir secara menyeluruh dan holistik dalam kehidupan manusia saat ini. Oleh karena itu, posmodernisme adalah kondisi, bukan sekedar konsep atau situasi yang dialami oleh manusia. Maka, berdasarkan pemahaman Lyotard tersebut dapat disimpulkan bahwa posmodernisme adalah sebuah kondisi dalam kehidupan manusia yang ditandai oleh rasa ketidakpercayaan terhadap keniscayaan dan hal-ihwal yang monolitik.

### **Kegagalan Proyek Modernisme dan Kebangkitan Posmodernisme**

Memahami posmodernisme tidak dapat dilakukan tanpa memahami apa yang telah dilakukan oleh wacana modernisme.

Menurut Ahmed (1992) modernisme merupakan fase sejarah dunia yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepercayaan pada sains, perencanaan, sekularisme dan kemajuan.
2. Keinginan untuk simetri dan tertib.
3. Keinginan akan keseimbangan dan otoritas.
4. Keyakinan terhadap masa depan atau pada utopia yang bisa dicapai.
5. Keyakinan akan sebuah tata dunia natural yang mungkin.

Hal tersebut, menurut Ahmed, berusaha dicapai oleh modernisme melalui mesin, proyek industri besar, besi, baja, dan listrik. Oleh karena itu, zaman modern dapat dipahami sebagai zaman industrialisasi dan zaman di mana kemanusiaan diremehkan.

Sejalan penjelasan tersebut Muhadjir (2001) menyatakan bahwa melalui pengarahannya pada pengembangan ilmu ke pengembangan teori dan pengembangan paradigma atas dasar rasionalitas, modernisme telah mengendalikan manusia secara teknis dengan menggunakan prinsip-prinsip, sistem-sistem pembuktian, model-model logika, serta cara-cara tertentu dalam berpikir rasional. Kondisi tersebut mengakibatkan manusia menjadi objek sistem, dan bukannya menjadi diri sendiri. Kondisi tersebut semakin parah karena modernisme memaknai rasionalitas ke dalam wacana kepentingan kerja, dan direduksi menjadi efisiensi atas kriteria untung-rugi, dan lebih lanjut dijadikan sesuatu yang berupa pragmatik.

Perihal mengenai manusia menjadi objek sistem, dan bukannya menjadi diri sendirinya ini dapat dilihat secara jelas

dalam konsep strukturalismenya Ferdinand de Saussure. Bagi Saussure (dalam Laclau & Mouffe, 1999) sesuatu itu baru bisa dipahami apabila sesuatu ditempatkan dalam satu sistem tertentu yang bersifat arbitrer yang dibentuk berdasarkan konvensi.

Bagi wacana modernisme (dalam Laclau & Mouffe, 1999), identitas manusia sebagai subjek adalah sesuatu yang niscaya. Keniscayaan ini hadir karena manusia berada pada dominasi yang-arbitrer, sebab hanya di bawah dominasi yang-arbitrer manusia dapat dipahami, dipelajari, dan dimaknai. Maka, bagi para modernis Saussurean, dunia sebagai "langue"-lah yang penting. Pemosisian "langue" yang lebih penting ini, mengakibatkan manusia sebagai "parole" terdegradasi pada posisi yang lebih rendah. Di bawah kondisi ini, manusia bukan subjek yang bebas. Tidak adanya pengakuan "parole" mengakibatkan manusia sebagai subjek yang tidak selalu pasti tidak mendapatkan pengakuan. Akhirnya, manusia, jika ditelisik lebih dalam dan jauh, dalam wacana modernisme, bukanlah subjek yang bebas karena ia terikat pada hal-hal yang niscaya.

Menurut Hartono (2007) posmodern adalah mutasi sekaligus kontinuitas dari modernisme. Penempatan prefix "pos" di depan kata "modernisme" dalam istilah "posmodernisme"-lah yang menyebabkan posmodernisme tidak dapat hanya dipandang sebagai mutasi dari modernisme, tetapi ia juga harus dipandang memiliki kontinuitas dengan modernisme. Hal tersebut tampak pada pembagian periodik zaman Arnold Toynbee.

Toynbee (Hartono 2007) menempatkan posmodernisme sebagai sebuah era atau periode keempat sesudah Zaman Kegelapan (675--1075 M), Zaman Pertengahan (1075--

1475), dan Zaman Modern (1475--1875). Periodisasi tersebut memperlihatkan bahwa apa yang kita kenal dengan istilah "posmodernisme" merupakan kelanjutan Zaman Modern. Maka, upaya untuk memahami posmodernisme tetap mengandaikan pemahaman mengenai modernisme. Hal tersebut disebabkan adanya keterkaitan antara zaman modern dan zaman postmodern. Karakter kontinuitas dan mutasi dari posmodernisme terhadap modernisme juga disampaikan oleh Appignanesi dan Garrat.

Menurut Appignanesi & Garrat (1997), yang dimaksud dengan posmodernisme adalah campuran dari pelbagai pemaknaan yang berdasar pada anggapan bahwa posmodernisme bukan sebuah paradigma yang hanya dihasilkan, diakibatkan, atau anak, dan perkembangan modernisme. Namun, posmodernisme juga penyangkalan dan penolakan terhadap modernisme. Paradigma tersebut merupakan kebingungan yang berasal dari dua teka-teki besar: melawan dan mengaburkan pengertian modernisme, dan menyiratkan pengetahuan yang lengkap mengenai modernisme yang telah dilampaui oleh zaman baru. Dengan kata lain, posmodernisme adalah sebuah zaman yang mengandaikan adanya perubahan dalam cara melihat, berpikir, dan berbuat manusia.

Menurut Baudrillard (2006) sejak awal modernisme merupakan wacana dan proyek yang sangat ambisius. Paradigma tersebut diciptakan oleh Barat, dan didistribusikan oleh Barat ke seluruh penjuru dunia dengan pelbagai kiat. Bahkan, dalam pandangan yang negatif, ia didistribusikan oleh Barat ke seluruh penjuru dunia dengan menghalalkan pelbagai cara. Mulai yang halus, seperti hegemoni dan seduksi, sampai ke hal yang paling

kasar dan tidak beradab seperti represi dan kolonialisasi. Adapun tujuan paradigma tersebut adalah jelas, yakni: membentuk dan menyebarkan keyakinan "kebenaran" tunggal (yang tentunya ini juga menurut ukuran Barat!). Padahal, dalam faktanya, paradigma modernisme--dengan utopia kemajuannya--hanya berakhir pada khayalan katastrofi. Ini tampak pada berbagai kekacauan dan kemerosotan kehidupan masyarakat modern. Maka, pemahaman tersebut mendorong masyarakat manusia untuk melakukan penolakan dan kritisasi atas paradigma modern yang selama ini dianut. Hal tersebut berdampak pada terjadi perubahan pada masyarakat manusia modern.

Kegagalan paradigma modern sebagai proyek pembentuk kesadaran masyarakat manusia juga dapat dilihat dalam pemahaman pasca-strukturalis. Bagi para posstrukturalis semacam Jean Jacques Lacan, Michel Foucault, ataupun Derrida, inilah titik kegagalan modernisme. Pengabaian pada "parole" merupakan pengabaian kepada manusia sebagai subjek yang menyeluruh. Dengan kata lain, menyitir pemikiran Gilles Deleuze dan Felix Guattari (Hartono, 2007), sebagai subjek yang menyeluruh, manusia bukan hanya mahluk rasional tetapi juga mahluk berhasrat.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Laclau & Mouffe (1999) menyatakan bahwa sifat arbiter yang terdapat dalam paradigma modern merupakan sebetuk wacana hegemoni yang menempatkan manusia pada posisi "yang-determinan" saja. Padahal, manusia sebagai subjek tidak hanya mengandaikan sesuatu "yang-determinan", tetapi juga "yang-kontingen". Manusia adalah subjek yang senantiasa berada pada titik-titik antagonisme dan perjuangan. Ia adalah subjek

yang terbentuk dari dua tataran, yakni: "yang-determinan" dan "yang-kontingen". Kedua tataran ini tidak dapat dilihat dalam sistem dominasi hirarkis, karena kedua memiliki kesejajaran. Kesejajaran kedua tataran tersebut berdampak pada munculnya gesekan-gesekan di antara keduanya. Gesekan-gesekan itulah yang mengakibatkan tidak dapatnya identitas manusia dilihat sebagai sesuatu yang niscaya. Identitas subjek manusia bukan sesuatu yang niscaya, tetapi sesuatu yang senantiasa mengalami antagonisme dan perjuangan. Identitas manusia adalah sesuatu yang senantiasa mengalami redefinisi. Wacana modernisme gagal melihat hal ini. Maka, kiranya, kesadaran mengenai kegagalan proyek paradigma modernisme sebagai pembentuk kesadaran masyarakat manusia itulah yang menjadi penyebab munculnya paradigma posmodern dalam kesadaran masyarakat manusia saat ini.

### **Kritik Paradigma Posmodern terhadap Paradigma Modern**

Paradigma posmodern mengkritik paradigma modern dalam banyak hal. Kritik paradigma postmodern terhadap paradigma modern, pertama, tampak pada pemahaman mengenai kebenaran ilmu pengetahuan. Paradigma modern mengarahkan ilmu ke pengembangan teori dan pengembangan paradigma yang didasarkan pada rasionalitas. Bagi posmodernisme, apa yang telah dilakukan oleh paradigma modern itu tidak tepat karena tindakan yang didasarkan pada paradigma tersebut justru menjadikan manusia sebagai objek sistem, dan bukan menjadi dirinya sendiri (Muhadjir 2001). Modernisme telah mengendalikan manusia secara teknis. Pengendalian manusia secara teknis ini dilakukan dengan jalan membuat manusia



untuk menggunakan prinsip-prinsip, sistem-sistem pembuktian, model-model logika, serta cara-cara tertentu dalam berfikir rasional. Kondisi ini mengakibatkan manusia bukan menjadi subjek sistem, tetapi objek sistem, karena ia harus mematuhi setiap prinsip, sistem, model, cara yang ditentukan oleh modern (Muhadjir 2001).

Menurut Muhadjir (2001) kepatuhan-kepatuhan tersebut justru tidak menempatkan manusia sebagai subjek penemu. Kepatuhan-kepatuhan yang diandaikan penting oleh paradigma keilmuan modern, justru, membuat manusia kehilangan kebebasannya. Manusia bukanlah berada posisi pencari, tetapi pada posisi penemu. Oleh karena itu, modernisme justru tidak menempatkan manusia sebagai penemu kebenaran, karena kebenaran itu sudah ada di sana, dan manusia tinggal menemukannya kembali. Maka, di bawah kondisi posmodernisme, kebebasan manusia tampil dalam wujud manusia sebagai subjek pencari kebenaran.

Dalam posmodernisme tugas manusia adalah mencari kebenaran dan bukannya sebagai pembukti kebenaran. Kondisi ini karena posmodernisme tidak menawarkan kebenaran mutlak. Logosentrisme absolut yang diartikulasikan oleh modernisme ditolak dan dikritisi oleh posmodernisme. Logosentrisme yang ditawarkan oleh modernisme haruslah didekonstruksi. Keharusan ini muncul, sebagaimana pernah dinyatakan oleh Lyotard, karena telah terjadi transformasi relasi antara sains dan kehidupan (Muhadjir, 2001).

Selain kritik mengenai paradigma keilmuan modern, postmodern juga melakukan kritisasi terhadap paradigma modern tentang manusia sebagai subjek. Laclau & Mouffe

(1999) melihat bahwa paradigma subjek modern justru telah mendehumanisasi manusia sebagai subjek. Menurut Laclau & Mouffe (1999) wacana keniscayaan yang didesakkan oleh hegemoni modernisme telah mengakibatkan munculnya krisis. Krisis ini berpusar pada retakan antara teori dan praktik. Sifat niscaya modernisme mengakibatkan teori tidak lagi akomodatif terhadap praktiknya. Akhirnya, modernisme gagal melihat, mempelajari, dan memahami dunia. Posmodernisme berusaha mengatasi krisis ini. Adapun krisis tersebut diatasi oleh posmodern dengan jalan mengembalikan manusia pada posisi subjek, dan bukannya objek. Modernisme pada abad 19 yang menonggak dengan strukturalisme, telah menghilangkan manusia sebagai subjek. Strukturalisme, dengan pemujaan struktur, mengakibatkan munculnya dehumanisasi (Laclau & Mouffe, 1999).

Dehumanisasi ini terlihat pada wacana bagaimana manusia direduksi ke dalam struktur. Manusia hanya diakui sebagai objek dari struktur, dan bukan pencipta struktur. Hal tersebut tampak pada konsep "langue" dan "parole"-nya Saussure. Bagi Saussure, yang penting adalah "langue", dan bukannya "parole", sebab manusia hanya dapat dipahami dalam satu jaring yang lebih besar. Dengan kata lain, manusia hanya bisa dipahami dalam hubungannya dengan sistem yang mengitarinya. Posmodernisme, dipelopori oleh posstrukturalisme, menolak pandangan ini. Bukan "langue" saja yang penting, sebab tanpa "parole", "langue" tidak akan ada. Dan jika begitu, "parole" merupakan unsur penting, karena keberadaannya menentukan "langue" dan bukan sebaliknya (Laclau & Mouffe, 1999).

Pemahaman semacam ini membuat posmodern menjadi alat

untuk mengembalikan manusia sebagai subjek penting dalam kehidupan dan kebudayaan manusia. Manusia, sebagai subjek, yang semenjak abad 19 lenyap dari khazanah pengetahuan, kembali ke kedudukannya yang penting. Oleh karena itu, bagi posmodernisme tidak ada kebenaran objektif, yang ada hanyalah kebenaran subjektif atau intersubjektif. Pemahaman kebenaran model ini menggiring munculnya kebhinekaan makna. Makna bukan lagi sesuatu yang hanya tunggal. Denotativitas makna bukan sesuatu yang mutlak. Makna adalah banyak, tergantung dari relasi dan subjek yang menentukan (Laclau & Mouffe, 1999).

Ketiga, kritik paradigma modern terhadap paradigma modern mengenai pemberian batas dalam kehidupan manusia. Melalui paradigma mengenai budaya media, posmodern mengkritik objektivikasi paradigma pembatasan kehidupan manusia modern. Menurut Appignanesi & Garrat (1997) kehadiran media publik dalam jaringan yang masif dalam kehidupan masyarakat posmodern merupakan representasi penolakan paradigma posmodern terhadap pemberian batas-batas antara yang-riil dan yang-tidak-riil. Hal tersebut tampak keberadaan budaya *zapping* dalam masyarakat posmodern. *Zapping*--atau kesadaran nol--merupakan gejala ketaksabaran posmodern tanpa kedalaman. Ia merupakan produk hiperaktivitas "posindustrial" dan kegelisahan ekstrem. Budaya ini muncul bersamaan dengan merebaknya kabel multi-saluran dan satelit pemancar, diikuti dengan bantuan tidak terelakkan dari kendali jarak jauh. Sisi menarik dari budaya "zapping" ini adalah adanya otokreasi tontonan yang menempatkan Anda sendiri menjadi pemiliknya (Appignanesi & Garrat, 1997).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Baudrillard. Menurut

Baudrillard (dalam Imam, 2001; Piliang 1999) kehadiran media-media dalam jaringan yang bersifat publik dalam kebudayaan masyarakat posmodern merupakan upaya nyata posmodern dalam menolak paradigma pembatasan modern. Dalam kehidupan masyarakat posmodern tidak ada lagi batas antara yang nyata dan yang tidak nyata. Segala kehadiran telah melebur menjadi sebuah kenyataan baru, yakni kenyataan hiperealitas.

Hiperealitas tersebut berdampak pada pembentukan batas identitas yang dinamis pada masyarakat posmodern. Bagi masyarakat posmodern dengan tidak menolak hegemoni budaya media, itu berarti sekaligus melakukan resistensi dan pencarian lebih lanjut mengenai keberadaan manusia. Namun, hal tersebut mungkin dilakukan apabila masyarakat berada dalam kondisi posmodern, yakni sebuah kondisi yang mengagungkan kebebasan manusia. Kebebasan untuk mengonsumsi dan memproduksi sesuatu. Kebebasan untuk mencitrakan sesuatu sesuai dengan yang dikehendakinya sendiri (Baudrillard dalam Imam, 2001; Piliang, 1999).●

# BAB VII

## METODOLOGI PENELITIAN BUDAYA

### A. METODE ILMIAH

Metode sering diartikan sebagai jalan berpikir dalam bidang keilmuan. Kata *metode* berasal dari kata *meta-hodos* yang berarti menuju, melalui cara, jalan (Akhmadi, 2001: 21). Metode adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar (Suhartono, 2004: 100). Dengan kata lain, metode adalah cara bagaimana objek penyelidikan dikumpulkan, digolongkan dan dipilah menjadi data, dan bagaimana data dianalisis (Hoed, 2008: 7). Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* (2020) kata *metode* berarti cara yang teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan, atau cara kerja yang teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yang ditentukan.

Metode ilmiah adalah salah satu metode yang digunakan manusia untuk memperoleh pengetahuan dengan cara menggabungkan metode empirik dan metode rasionalistik sebagai pendekatan bersama yang saling melengkapi dan memperjelas (Kattsoff, 2004: 143; Suhartono, 2004: 100). Metode ini dimulai dengan dasar pengamatan-pengamatan dan berakhir juga dengan pengamatan-pengamatan. Metode ini mengandaikan adanya

prosedur-prosedur tertentu yang dipergunakan dalam usaha memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh seorang ilmuwan (Kattsoff, 2004: 143).

Metode ilmiah melihat kenyataan sebagai satu susunan dan bukan kekacauan. Menurut metode ini, kenyataan dapat dijelaskan menurut hukum-hukum tertentu atau aturan-aturan tertentu (Beerling, 1966: 14). Suhartono (2004: 101) menyatakan bahwa secara umum metode ilmiah ini terdiri dari dua jenis, yakni: (1) metode analisis, dan (2) metode sintesis.

Metode analisis disebut juga metode analisis-induktif, karena metode ilmiah ini dibantu oleh sarana induktif (Suhartono, 2004: 101). Metode analisis-induktif adalah cara pandang penelitian ilmiah yang bertitik tolak dari pengetahuan-pengetahuan khusus untuk sampai kepada kesimpulan yang berupa pengetahuan umum. Dan ini dilakukan oleh metode analisis-induktif dengan cara memisahkan pengertian-pengertian yang sepadan dengan yang tidak sepadan (Suhartono, 2004: 101). Misalnya, ada tiga jenis majas, yakni metafora, metonimi, dan simile. Pertanyaan yang diajukan adalah jenis majas manakah yang paling disukai oleh para sastrawan Inggris? Apakah majas metafora, majas metonimi atau majas simile? Hipotesis atau praduga dirumuskan sebagaiberikut:

- a) Para sastrawan Inggris lebih menyukai majas metafora daripada majas metonimi.
- b) Para sastrawan Inggris lebih menyukai majas metonimi daripada majas simile.
- c) Para sastrawan Inggris lebih menyukai majas simile daripada majas metafora.
- d) Dst.

Untuk menguji manakah hipotesis yang paling benar, penganut metode analisis-induktif tidak mengkaji teori atau argumentasi teoritis, tetapi melakukan pengamatan langsung dengan membaca karya-karya para sastrawan Inggris. Misalnya, dengan menghitung jumlah masing-masing jenis majas yang terdapat di dalam karya-karya sastra ciptaan para sastrawan Inggris tersebut. Hasil yang didapat dari kerja semacam ini adalah kesimpulan umum mengenai kesukaan sastrawan Inggris di antara tiga jenis majas yang ada tersebut.

Metode sintesis disebut juga metode sintesis-deduktif, karena menggunakan deduktif sebagai alat dalam penyelidikannya. Metode ini melakukan penyelidikan dengan bertitik tolak dari pengetahuan umum agar sampai pada kesimpulan yang berupa pengetahuan khusus (Suhartono, 2004: 102). Misalnya, semua filsuf adalah manusia, dan Derrida adalah filsuf, maka kesimpulannya adalah Derrida adalah manusia.

Di dalam metode ilmiah, metode analisis-induktif (atau metode sintesis-deduktif) digunakan bersama-sama. Ini disebabkan karena sebuah analisis hanya dapat dilakukan apabila telah ada pengetahuan umum, demikian pula sebaliknya. Hal tersebut disebabkan keberadaan pengetahuan umum yang dapat memberikan peneliti pengetahuan awal atas objek yang dikaji atau fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, metode ilmiah senantiasa berpedoman pada metode analisis dan sintesis dengan sarana induktif dan deduktif (Suhartono, 2004: 103).

## **B. METODE FENOMENOLOGI BUDAYA**

### **1. Pengertian Fenomenologi**

Secara umum, fenomenologi adalah sebuah metode

penelitian atau metode berpikir yang bertujuan untuk mengungkap atau menjelaskan realitas yang berada di balik gejala atau fenomena yang tertangkap oleh panca indera manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomenologi pertama kali dikembangkan oleh Edmund Husserl, seorang filsuf besar Jerman kelahiran Republik Ceko yang hidup pada tahun 1859—1938 (Asih, 2005; Hasbiansyah, 2008; Prasetyono, 2013). Menurut Husserl (Asih, 2005; Hasbiansyah, 2008; Prasetyono, 2013) fenomenologi merupakan sebuah bidang kajian yang berupaya untuk mendeskripsikan pengalaman hidup manusia yang terdapat di dalam kesadaran. Pengalaman hidup tersebut adalah sebuah fenomena yang dinamis. Ini disebabkan karena pengalaman hidup manusia selalu mengalami perkembangan dalam kesadaran. Perkembangan tersebut terjadi karena adanya pengaruh dari dunia di luar manusia sebagai subjek berkesadaran yang mengalami dunia. Oleh karena itu, antara manusia, sebagai subjek berkesadaran, dengan dunia yang berada di luar manusia (dunia eksternal) senantiasa berelasi.

Namun, sebelum sampai ke kesadaran manusia, pengalaman hidup manusia masih berupa peristiwa-peristiwa yang dicerap oleh panca indera manusia. Peristiwa-peristiwa itu dalam fenomenologi Husserl disebut fenomena. Secara definitif, fenomena dapat dipahami sebagai sesuatu yang tampak tanpa selubung dan menampakkan dirinya kepada manusia. Oleh karena itu, fenomena merupakan totalitas di balik dari yang tampak pada manusia (Asih, 2005; Hasbiansyah, 2008; Prasetyono, 2013).

Menurut Husserl (dalam Asih, 2005; Hasbiansyah, 2008; Prasetyono, 2013) ilmu pengetahuan telah “mengotori”



kesadaran manusia. Ini berdampak tidak terungkapnya esensi kenyataan yang terdapat dalam pengalaman hidup manusia karena makna murni tidak pernah ada. Ilmu pengetahuan telah menetapkan makna atas kenyataan berdasarkan standar yang ditentukan olehnya. Maka, tidak ada penemuan di dalam ilmu pengetahuan, tetapi pembenaran atas apa yang telah ditetapkan oleh norma ilmu pengetahuan.

Husserl (dalam Asih, 2005; Hasbiansyah, 2008; Prasetyono, 2013) menyatakan bahwa hal tersebut sesuatu yang salah, karena pengalaman manusia itu seharusnya berasal dari *given object* (objek alamiah) dan bukan *given datum* (data-data alamiah menurut ilmu pengetahuan). Agar terhindar dari kesalahan tersebut, upaya untuk memahami fenomena haruslah mengembalikan intensionalitas kesadaran manusia kepada *given object*. Husserl (dalam Asih, 2005; Hasbiansyah, 2008; Prasetyono, 2013) menyebutnya sebagai kembali ke objek. Ini diperlukan karena objek bukanlah sesuatu yang berada di luar diri manusia. Objek berada di dalam dan terikat pada manusia. Oleh karena itu, upaya untuk mengungkap esensi atau makna murni atau hakikat fenomena harus dilakukan dengan cara melakukan dialektika subjek-objek. Dialektika ini diperlukan agar pembauran antara objek yang muncul dalam kesadaran berbaur dengan objek yang ada secara alamiah, sebab hanya dengan tindakan atau praktik tersebut hakikat fenomena dapat diungkap dan pengetahuan manusia yang benar dapat dikembangkan.

## **2. Konsep-Konsep dalam Metode Fenomenologi**

Pemahaman mengenai konsep-konsep yang terdapat dalam pendekatan fenomenologi Husserl merupakan hal yang

harus dimiliki oleh seorang peneliti yang hendak menggunakan pendekatan ini sebagai pendekatan penelitian. Secara umum, terdapat delapan konsep yang menjadi unsur penyusun pendekatan fenomenologi Husserl. Pertama, konsep fenomena yang dalam paradigma fenomenologi Husserl dipahami sebagai suatu tampilan objek, peristiwa, dalam persepsi. Fenomena adalah realitas yang menampakkan dirinya sendiri kepada manusia, atau apa saja yang muncul dalam kesadaran. Fenomena merupakan realitas yang tampak, tanpa selubung atau tirai antara manusia dengan realitas itu (dalam Asih, 2005; Hasbiansyah, 2008; Prasetyono, 2013).

Konsep kedua yang terdapat dalam pendekatan fenomenologi Husserl adalah kesadaran, yakni pemberian makna yang aktif. Kesadaran adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengobjektivikasi dirinya. Dalam kesadaran seseorang memperlakukan dirinya sebagai subjek untuk menjadi objek bagi dirinya sendiri, atau menjadi objektif tentang dirinya sendiri. Melalui kesadaran seseorang mengalami keterbukaan dan kelangsungan relasional dengan yang lain, sehingga tercipta sebuah situasi dan kondisi yang menempatkan dirinya dengan yang lainnya tidak memiliki pemisahan yang tegas (dalam Asih, 2005; Hasbiansyah, 2008; Prasetyono, 2013).

Kesadaran, merujuk pada Husserl dalam Asih, 2005; Hasbiansyah, 2008; Prasetyono, 2013), memiliki sifat intensionalitas. Intensionalitas tersebut merupakan struktur hakiki kesadaran manusia. Intensionalitas mengacu pada keyakinan bahwa semua tindakan (aktus) kesadaran memiliki kualitas. Tindakan kesadaran disebut tindakan intensional dan objeknya disebut objek intensional. Adapun intensi dipahami sebagai

orientasi pikiran pada suatu objek. Jadi, intensionalitas berkaitan dengan kesadaran, pengalaman internal mengenai kesadaran akan sesuatu inilah konsep ketiga dalam fenomenologi Husserl.

Konsep keempat dalam paradigma fenomenologi Husserl adalah konstitusi, yakni sebuah proses yang berupa penampakan fenomena ke dalam kesadaran manusia. Konstitusi adalah hal yang dilihat dari sudut pandang subjek, memaknakan dunia dan alam semesta yang dialami. Proses ini merupakan aktivitas kesadaran, sehingga realitas itu tampak. Dalam proses ini dunia nyata dikonstitusikan oleh kesadaran agar penampakan fenomena dapat terjadi. Maka, konstitusi dapat dipahami sebagai semacam proses konstruksi dalam kesadaran manusia (dalam Asih, 2005; Hasbiansyah, 2008; Prasetyono, 2013).

Dunia merupakan konsep kelima yang terdapat dalam fenomenologi Husserl. Dalam konsep tersebut terdapat kebertautan antara fenomena-fenomena yang diantisipasi dalam kesadaran akan kesatuan kita. Dunia itu dipahami sebagai sarana atau media bagi manusia untuk merealisasikan diri sebagai kesadaran. Dunia adalah hasil persepsi manusia atas sesuatu (dalam Asih, 2005; Hasbiansyah, 2008; Prasetyono, 2013).

Keenam, konsep epoche. Menurut Husserl (dalam Asih, 2005; Hasbiansyah, 2008; Prasetyono, 2013) epoche merupakan konsep yang berkaitan dengan sebuah upaya atau tindakan untuk melakukan pengurangan atau tindakan penundaan penilaian (*bracketing*). Dalam epoche pemahaman, penilaian, dan pengetahuan kenyataan sehari-hari harus dikesampingkan terlebih dahulu, dan fenomena dimunculkan, lalu direvisi secara segar, apa adanya, dalam pengertian yang terbuka, dari tempat yang menguntungkan dari ego murni atau ego transendental.

Tindakan atau upaya ini bertujuan untuk memunculkan pengetahuan di atas setiap keraguan yang mungkin. Epoche merupakan cara pandang lain yang baru dalam melihat sesuatu.

Reduksi merupakan konsep ketujuh dalam paradigma fenomenologi Husserl. Reduksi adalah tindakan berupa penanggungan kepercayaan atas dunia yang diamati atau yang dijumpai. Tindakan ini bertujuan untuk membawa kembali kesadaran manusia pada kesadaran transendental. Tindakan ini dilakukan setelah epoche. Reduksi dilakukan dengan dua tahap, yakni: pertama, reduksi-fenomenologis yang merupakan tindakan memilah pengalaman atau segala yang tampak pada kita agar mendapatkan fenomena dalam wujud murni; dan menunda pemaknaan dengan menyelidiki kembali fenomena dalam kesadaran kita. Kedua, reduksi-fenomenologis-transendental yang merupakan tahapan untuk kembali pada ego-murni. Pada tahapan ini kesadaran manusia berusaha diarahkan untuk kembali pada sumber makna dan eksistensi dunia yang dialami. Pada tahap ini seseorang meninggalkan semua teori, praanggapan, dan prasangka yang telah dimilikinya (dalam Asih, 2005; Hasbiansyah, 2008; Prasetyono, 2013).

Konsep kedelapan yang terdapat dalam paradigma fenomenologi Husserl adalah intersubjektif. Intersubjektivitas berkaitan dengan sejarah fenomena. Konsep ini merujuk pada kemampuan manusia untuk memaknai fenomena yang berasal dari kesadaran yang selalu berkaitan dengan kesadaran orang lain. Maka, dalam intersubjektif, segala sesuatu yang dipahami oleh seseorang tentang orang lain didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman masa lalu seseorang yang lain. Ini berarti pemaknaan atas fenomena yang dilakukan seseorang

tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kesadaran orang lain yang memberikan pengaruh kepadanya. Jadi, tidak ada makna yang subjektif. Makna selalu terbentuk dari eksternalisasi kesadaran internal dan internalisasi kesadaran eksternal (dalam Asih, 2005; Hasbiansyah, 2008; Prasetyono, 2013).

### **3. Tahapan Penelitian Fenomenologi**

Dalam penelitian kebudayaan, metode fenomenologi dapat diterapkan dengan menggunakan langkah-langkah berikut. Adapun langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan *bracketing*. Menurut Husserl (dalam Asih, 2005) langkah pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin melakukan penelitian terhadap sebuah fenomena adalah dengan cara melakukan *bracketing*, yakni melakukan identifikasi dan menyimpan sementara asumsi, keyakinan, dan pengetahuan yang telah dimiliki tentang fenomena yang diteliti agar mampu berkonsentrasi pada setiap aspek fenomena, merenungkan esensi dari fenomena dan menganalisis serta mendeskripsikan fenomena. Pada tahapan ini, peneliti bersikap terbuka, jujur, dan netral terhadap fenomena budaya yang sedang diamati. Hal tersebut perlu dilakukan agar peneliti dapat melakukan identifikasi terhadap fenomena budaya tersebut.

Tahapan kedua yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara *intuiting* sekaligus analisis. Dalam tahapan ini peneliti melakukan perenungan, analisis, dan pendeskripsian atas data dan temuan penelitian. Tujuan tahapan ini tidak saja agar peneliti dapat melakukan penyatuan dengan data yang dianalisis dan mampu untuk melakukan pemilihan dan pemilahan data fenomena untuk memperoleh pemahaman

yang utuh dan mendalam tentang fenomena, tetapi juga agar peneliti dapat menemukan esensi dan pola dari fenomena budaya yang diamari dapat disusun.

## **C. METODE ETNOGRAFI**

### **1. Pengertian Etnografi**

Saat ini, model penelitian etnografi merupakan model penelitian yang banyak diminati oleh peneliti budaya. Hal tersebut karena etnografi tidak saja mampu menghasilkan sebuah penelitian yang holistik bagi kebudayaan, tetapi juga dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru atas kebudayaan. Menurut Spreadley (2007: 15) hal tersebut karena etnografi juga memiliki fungsi korektif atas berbagai pemahaman yang telah ada sebelumnya. Maka, etnografi tidak hanya dapat mempertegas kebenaran-kebenaran budaya yang telah ada sebelumnya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menghadirkan kebenaran-kebenaran baru kebudayaan. Oleh karena itu, banyak peneliti budaya menganggap bahwa etnografi merupakan model penelitian yang dapat membantu perkembangan keilmuan budaya secara signifikan.

Dalam keberadaannya, etnografi bukan hanya model penelitian, tetapi juga metode penelitian. Menurut Spreadley (2007: 15) etnografi juga merupakan sebuah metode yang dapat digunakan dalam penelitian budaya. Hal tersebut karena etnografi tidak hanya merupakan suatu teori dan deskripsi kebudayaan, tetapi juga mencakup teknik penelitian. Oleh karena itu, dalam etnografi tidak hanya memiliki ladsan filosofis yang bersifat abstrak dan general atas kebudayaan, tetapi juga memuat prosedur-prosedur dalam mengungkap

fakta kebudayaan. Maka, dalam etnografi terdapat pula sistem yang dapat dimanifestasikan ke dalam langkah-langkah praktis penelitian budaya. Itulah mengapa etnografi tidak hanya dapat dilihat sebagai sebuah studi tentang bagaimana subjek berpikir tentang kebudayaan, tetapi juga studi tentang bagaimana subjek hidup dan berperilaku dalam sebuah kebudayaan (Endraswara, 2017: 50).

Bagi etnografi, kebudayaan bukanlah sesuatu yang bersifat tunggal dan statis. Etnografi memahami kebudayaan sebagai sesuatu yang heterogen, khas, dan dinamis, serta kompleks. Hal tersebut sebab etnografi mendefinisikan kebudayaan sebagai sebuah sistem pengetahuan yang diperoleh manusia dengan cara proses belajar, dan digunakan oleh manusia tidak saja untuk menafsirkan atau memaknai lingkungan mereka, tetapi juga menyusun strategi perilaku dalam menghadapi lingkungan tersebut. Oleh karena itu, perubahan lingkungan manusia akan berdampak pada kehadiran sistem pengetahuan baru dalam kebudayaan manusia (Spreadley, 2007: 17). Maka, bagi etnografi, kebudayaan bukanlah sesuatu yang bersifat eksplisit, tetapi implisit bagi manusia. Itu berarti makna kebudayaan merupakan sesuatu yang penting bagi etnografi.

Kata *etnografi* merupakan kata bentukan yang disusun atas kata *etno* (bangsa) dan *grafis* (menggambarkan). Itu berarti kata *etnografi* dapat diartikan sebagai sebuah studi yang berusaha menggambarkan sebuah bangsa. Namun, penggambaran sebuah bangsa melalui etnografi bukanlah penggambaran bangsa yang bersifat umum. Hal itu karena, merujuk pada Barker (2014: 92), pendekatan etnografi berpusat pada kemajemukan nilai budaya, makna, dan dunia-kehidupan.

Oleh karena itu, penggambaran bangsa yang diproduksi oleh etnografi adalah penggambaran bangsa yang unik dan khas. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Spreadley (2007: 3) bahwa etnografi merupakan kegiatan pendeskripsian budaya yang bertujuan untuk memahami pandangan hidup dari sudut pandangan penduduk asli.

Etnografi mengandalkan penelitian lapangan untuk mendapatkan pandangan kebudayaan yang khas dan unik dari sebuah masyarakat. Penelitian lapangan harus diterapkan dalam metode etnografi, sebab penelitian lapangan dapat memberikan peneliti pemahaman mengenai cara sebuah masyarakat berinteraksi dan bekerja sama melalui fenomena budaya yang teramati. Hal tersebut membuat etnografi dapat dipahami sebagai pendekatan empiris sekaligus teoretis yang memiliki tujuan utama tidak saja memproduksi deskripsi mendetail dan holistik, tetapi juga analisis budaya yang didasarkan pada kerja lapangan yang intensif (Barker, 2014: 93). Oleh karena itu, etnografi dapat dipahami sebagai sebuah metode penelitian lapangan dalam kajian budaya yang mengharuskan peneliti langsung berhadapan dengan objek penulisan dalam melakukan pemaknaan atau interpretasi terhadap penulisan yang dilakukan (Darmawan, 2008).

## **2. Karakteristik Penelitian Etnografi**

Menurut Spreadley (2007: 5) inti etnografi itu berupa sebuah usaha atau upaya untuk memperhatikan makna-makna dari tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian yang terdapat dalam masyarakat atau fenomena yang diamati. Bagi etnografi, kebudayaan adalah sistem makna. Itu karena kebudayaan oleh



etnografi dipahami sebagai pengetahuan yang diperoleh dan digunakan oleh manusia untuk menafsirkan pengalaman dan membentuk atau memproduksi perilaku sosial. Oleh karena itu seorang peneliti etnografi tidak hanya melakukan penyelidikan atas apa yang teramati saja. Namun, jauh melampaui itu, yakni menyelidiki makna yang berada di balik berbagai benda budaya yang teramati. Sebagaimana yang dinyatakan Spreadley (2007: 7) berikut:

Etnografer mengamati tingkah laku, tetapi lebih dari itu dia menyelidiki makna tingkah laku itu. Etnografer melihat berbagai artefak dan objek alam, tetapi lebih dari itu, dia juga menyelidiki makna yang diberikan oleh orang-orang terhadap berbagai objek itu. Etnografer mengamati dan mencatat berbagai kondisi emosional, tetapi lebih dari itu, dia juga menyelidiki makna rasa takut, cemas, marah, dan berbagai perasaan lain.

Agar seseorang dapat menggunakan etnografi sebagai metode penyelidikan budayanya, seseorang tersebut harus memahami karakteristik penelitian etnografi. Menurut Denzin & Lincoln (2009: 316) penelitian etnografi memiliki empat karakteristik khas. Adapun empat karakteristik tersebut sebagai berikut.

- a) Lebih menakankan upaya eksplorasi terhadap esensi atau sifat dasar fenomena budaya tertentu, dan bukan melakukan pengujian hipotesis atas fenomena tersebut.
- b) Lebih mementingkan bekerja dengan data yang tidak terstruktur, atau data yang belum terumuskan dalam

bentuk kode-kode sebagai seperangkat kategori yang masih menerima peluang bagi analisis tertentu.

- c) Penelitian memfokuskan pada sejumlah kecil kasus, mungkin hanya satu kasus secara detail.
- d) Melakukan analisis data yang meliputi interpretasi makna dan fungsi berbagai tindakan manusia secara eksplisit sebagai sebuah produk yang secara umum mengambil bentuk-bentuk deskripsi dan penjelasan verbal tanpa harus teralu banyak memanfaatkan analisis kuantifikasi.

### **3. Teknik Penelitian Etnografi**

Menurut Darmawan (2008) agar seseorang dapat memproduksi penelitian etnografi, seseorang tersebut harus melakukan pemetaan atas wacana sosial-budaya yang ada di masyarakat yang diamati. Agar pemetaan tersebut dapat menghasilkan pemetaan yang sah dan komprehensif dalam kerangka penelitian etnografi, seorang peneliti etnografi harus bekerja sebagai seorang ahli geografi yang melakukan pemetaan tentang budaya suatu masyarakat. Pemetaan tersebut dapat benar-benar dilakukan dengan baik apabila seorang peneliti menjadi bagian dari masyarakat yang ditelitinya.

Teknik pengumpulan data dengan cara tinggal di tempat masyarakat yang diamati, dan berbicara dengan orang-orang yang tinggal di tempat tersebut, sambil mengamati kebiasaan mereka merupakan cara efektif untuk mendapatkan pemetaan. Hal tersebut perlu dilakukan karena etnografi memiliki prinsip pemetaan yang bersifat holistik, kontekstual, berpandangan emik, mengakui realitas ganda, dan orientasi yang tidak menilai. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar peneliti

dapat memperoleh gambaran yang lengkap dan komprehensif tentang masyarakat yang diteliti (Darmawan, 2008).

Upaya untuk menempatkan perspektif peneliti etnografi bahwa kebudayaan itu bersifat holistik, menurut Darmawan (2008), itu bertujuan agar peneliti dapat melihat kaitan-kaitan dalam budaya dan masyarakat itu sebanyak dan seutuh mungkin. Itu diperlukan karena dalam penelitian etnografi, peneliti harus berpegang pada prinsip penelitian yang mensyaratkan teknik-teknik pengumpulan data yang mampu menjamin jangkauan penelitian atas seluruh kehidupan sosial. Oleh karena itu, dalam etnografi, teknik-teknik pengumpulan tidak hanya terbatas pada observasi atau wawancara saja, tetapi juga mencakup observasi-partisipatif, wawancara mendalam, *focus group discussion*, dan *life history*.

#### **4. Langkah-Langkah Penelitian Etnografi**

Menurut Endraswara (2017: 54—57) penelitian etnografi memiliki langkah-langkah penelitian yang khas. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut.

- a) Melakukan penetapan informan  
Dalam etnografi penetapan informan dilakukan dengan metode seleksi secara komprehensif. Hal tersebut bertujuan agar data yang didapatkan benar-benar memiliki sifat holistik dan mendalam.
- b) Melakukan wawancara terhadap informan  
Teknik wawancara yang dilakukan dalam etnografi adalah wawancara mendalam. Agar wawancara mendalam dapat dilaksanakan, peneliti etnografi harus benar-benar mahir meraih kepercayaan informannya.

- c) Membuat catatan etnografis  
Dalam catatan ini termuat identitas informan, jurnal lapangan, laporan ringkas, dan laporan yang diperluas karena adanya analisis dan tafsir yang diberikan peneliti atas data.
- d) Mengajukan pertanyaan deskriptif  
Tujuan pengajuan pertanyaan deskriptif adalah untuk mendapatkan gambaran setempat melalui refleksi yang ditimbulkan selama wawancara berlangsung. Dalam pertanyaan ini, peneliti tidak bertujuan mencari makna, tetapi lebih pada mencari kesahihan yang data yang didapatkan dari informan.
- e) Melakukan analisis wawancara etnografis  
Pada tahap ini peneliti melakukan pengkodean atas simbol-simbol budaya yang didapatkan dari wawancara dengan informan.
- f) Membuat analisis domain  
Pada tahap ini peneliti membuat istilah pencakup atas apa yang dinyatakan oleh informan. Istilah-istilah tersebut harus memiliki kaitan semantis satu sama lainnya.
- g) Mengajukan pertanyaan struktural  
Pertanyaan struktural merupakan pertanyaan kelanjutan dari pertanyaan deskriptif. Pada pertanyaan struktural terdapat upaya peneliti untuk merumuskan apa yang tadinya belum terumuskan.
- h) Membuat analisis taksonomi  
Pada tahap ini peneliti melakukan pemfokusan pada pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Pada analisis ini identifikasi setiap pertanyaan merupakan hal yang harus dilakukan.
- i) Mengajukan pertanyaan kontras

Tahap ini mensyaratkan penguasaan atas pertanyaan yang telah disampaikan. Hal tersebut karena pada tahap ini peneliti harus melakukan oposisi kritis atas jawaban yang telah didapatkan dari informan.

j) Membuat analisis komponen

Analisis ini dilakukan ketika dan setelah di lapangan. Analisis ini bertujuan untuk melihat dan mencermati kembali data yang telah didapatkan. Apabila peneliti masih melihat kekurangan pada data yang telah didapat, peneliti harus turun ke lapangan penelitian kembali.

k) Menemukan tema-tema budaya

Tahap ini merupakan tahapan puncak analisis etnografi. Hal tersebut karena pada tahap ini peneliti melakukan analisis pada data-data yang telah didapatkan dalam kaitannya dengan perspektif keilmuan budaya.

l) Menulis etnografis

Penulisan etnografi adalah penulisan secara deskriptif. Tujuannya agar pembaca dapat memperoleh gambaran yang holistik tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.●

# BAB VIII

## MODEL PENELITIAN ETNOGRAFI

### **NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT PANDALUNGAN PROBOLINGGO (Kasus Upacara Taropan di Probolinggo)**

#### **Masyarakat Pandalungan Probolinggo**

Masyarakat Pandalungan adalah masyarakat yang hidup dalam kebudayaan Pandalungan. Kebudayaan Pandalungan dapat dipahami sebagai sebetuk kebudayaan yang menyebar dan dimiliki oleh masyarakat hidup kawasan di wilayah pantai utara dan bagian timur Provinsi Jawa Timur yang mayoritas penduduknya berlatar belakang budaya Jawa dan Madura. Kebudayaan Pandalungan disebut juga kebudayaan hibrida sebab terbentuk akibat dari perpaduan antara budaya Jawa dan Madura (Juniarta dkk, 2013; Raharjo, 2006; Setiawan, 2016; Sutarto, 2006).

Masyarakat yang berbasis kebudayaan Pandalungan memiliki watak agraris-egaliter. Ini tampak pada keberadaan masyarakat tersebut yang berada pada wilayah yang didominasi oleh pedesaan dan watak keterbukaan masyarakat tersebut pada berbagai hal yang datang dari luar. Keterbukaan atau egaliter tersebut tampak pada penggunaan bahasa yang kasar

oleh masyarakat Pandalungan. Penggunaan bahasa yang tidak berdasar pada tingkatan merupakan bukti adanya kesadaran kesamaan hak di dalam masyarakat tersebut (Juniarta dkk, 2013; Raharjo, 2006; Setiawan, 2016; Sutarto, 2006).

Dalam konteks etika sosial, masyarakat Pandalungan secara umum memiliki konsep tata krama, sopan-santun, atau budi pekerti yang berakar pada nilai-nilai yang diusung dari dua kebudayaan yang menjadi dasar pembentuknya, yakni kebudayaan Jawa dan Kebudayaan Madura. Ini menjadikan kebudayaan Pandalungan menjadi sebuah kebudayaan yang unik dan khas (Juniarta dkk, 2013; Raharjo, 2006; Setiawan, 2016; Sutarto, 2006).

Masyarakat Pandalungan Probolinggo hidup di wilayah Kota dan Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut tampak pada penggunaan bahasa Jawa, Madura, dan Indonesia yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat di kedua wilayah tersebut. Menurut Subar, seorang warga Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo (Wawancara 20 April 2019) dalam kehidupan sehari-hari ia menggunakan bahasa Madura, bahasa Jawa, bahkan bahasa Indonesia. Adapun penggunaan ketiga bahasa tersebut disebabkan tidak setiap masyarakat Probolinggo memahami bahasa Jawa atau bahasa Madura saja, tetapi juga ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan, Subar menyatakan, tidak jarang dia menggabungkan ketiga bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam berkomunikasi.

Fenomena penggunaan bahasa campuran Jawa, Madura, dan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pandalungan Probolinggo, tidak hanya terjadi di wilayah masyarakat Kota Probolinggo. Di dalam kehidupan masyarakat Kabupaten

Probolinggo, penggunaan bahasa campuran Jawa, Madura, dan Indonesia juga terjadi. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Baisuki, warga Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo (Wawancara, 25 April 2019) berikut: *"mon bik orang Jawa, aku yo ngomong Jawa, Pak. Tapi, yo ngono boso Jowoku ngene ini, pur-campur."*Pernyataan Baisuki tersebut, juga diperkuat oleh Badri, warga desa Maron, Kabupaten Probolinggo. Dalam sebuah wawancara yang dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 2019, Badri memaparkan bahwa tidak mungkin hanya berbahasa Madura atau Jawa saja ketika berkomunikasi dengan masyarakat di Maron. Ini disebabkan masyarakat Maron tidak hanya bersuku Jawa saja, tetapi juga ada suku Madura, bahkan ada etnis Tionghoa yang tidak di wilayah tersebut. Penggunaan bahasa yang bercampur antara Jawa, Madura, bahkan Indonesia tersebut justru mempermudah praktik komunikasi di daerah tersebut.

Pernyataan Subar, Baisuki, dan Badri tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Pandalungan Probolinggo adalah masyarakat yang dalam penggunaan bahasa sehari-hari menggunakan bahasa yang mencampurkan antara bahasa Jawa, Madura, dan terkadang juga mencampurkan bahasa Indonesia. Tentunya ini menjadi ciri khas masyarakat Pandalungan Probolinggo. Oleh karena upaya untuk mengidentifikasi masyarakat Pandalungan Probolinggo sebagai masyarakat yang tinggal di Kota Probolinggo saja adalah hal yang tidak tepat, begitu juga dengan mengidentifikasi bahwa masyarakat Pandalungan Probolinggo adalah masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Probolinggo juga tidak tepat. Hal tersebut disebabkan oleh keberadaan masyarakat Pandalungan Probolinggo yang tersebar, baik di wilayah Kota Probolinggo ataupun di wilayah Kabupaten Probolinggo.



## **Upacara Taropan dalam Masyarakat Pandalungan Probolinggo**

Masyarakat Pandalungan merupakan masyarakat yang mengalami hibridasi kultural Jawa dan Madura. Masyarakat ini merupakan masyarakat multietnis. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat Pandalungan nilai-nilai kearifan lokal tidak hanya berasal dari satu etnis atau suku saja, tetapi lebih merupakan perpaduan antara dua etnis atau dua suku atau lebih. Maka, dalam konteks kebudayaan, nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Pandalungan dapat dikatakan merupakan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat hibrida.

Upacara Taropan merupakan upacara yang khas diadakan oleh masyarakat Kota dan Kabupaten Probolinggo. Upacara ini khas milik masyarakat Pandalungan Probolinggo. Menurut Badri, desa Maron, Kabupaten Probolinggo, Upacara Taropan adalah upacara yang hanya diadakan di Probolinggo. Sebagai seorang keturunan Madura, Badri (Wawancara, 15 April 2019) menyatakan bahwa upacara itu tidak ada di pulau Madura: *"Taropan mon bedhe' e Bolinggo, Pak. Tidak ada upacara iki diadakan di Madura. Kule gak pernah oleh undangan dherri Madura."* Hal yang sama juga dinyatakan oleh Subar. Dalam wawancara yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2019, Subar yang merupakan warga Kota Probolinggo menuturkan bahwa Upacara Taropan hanya pernah dia datangi di Probolinggo saja. Subar tidak pernah mendapatkan undangan untuk menghadiri upacara itu dari luar Probolinggo.

Kata "Taropan" berasal dari bahasa Jawa "terop". Dalam bahasa Indonesia, kata "terop" diartikan sebagai "tenda pesta". Menurut Sri Andayani (Wawancara, 17 Juni 2019) peneliti

bahasa Pandalungan, kata “tarop” tidak ada rujukannya di dalam bahasa Madura. Kata tersebut merupakan kata yang disadur dari bahasa Jawa dengan pelafalan Madura. Oleh karena itu, tidak mungkin mencari makna kata “taropan” dalam kamus bahasa Madura karena bahasa tersebut merupakan kata yang berasal dari bahasa Jawa tetapi menggunakan pelafalan Madura ketika mengucapkannya.

Dalam keberadaannya Upacara Taropan telah diadakan sejak lama. Menurut Baisuki (Wawancara, 7 Juli 2019) upacara tersebut telah ada sejak kakeknya. Keikutsertaan Baisuki dalam upacara tersebut tidak lepas dari tradisi yang diwariskan oleh keluarganya: “begh, sudah lama saya ikut Taropan, Pak. Kakek saya dulu juga ikut Taropan. Abah saya juga ikut. Jadi, ya saya juga harus ikut. *Mon gak norrok, bisa kacau, Pak.*” Ini sebagaimana juga yang dinyatakan oleh Badri (wawancara, 8 Juli 2019) bahwa upacara tersebut telah ada sejak dia kecil. Hanya saja, ketika ditanya sejak kapan upacara tersebut secara tepatnya dimulai, baik Baisuki ataupun Badri tidak dapat menyebutkannya secara tepat.

Hal tersebut juga sebagaimana yang dinyatakan oleh Subar. Menurut Subar (wawancara tanggal 9 Juli 2019) bahwa sejak kapan Upacara Taropan tersebut diadakan, dia tidak tahu. Namun, dia mengetahui bahwa sejak kakek dari abahnya hidup, upacara tersebut sudah ada.

Namun, yang menarik dari pemaparan Subar adalah nilai Upacara Taropan itu. Bagi Subar (Wawancara, 9 Juli 2019) upacara taropan merupakan penanda bagi eksistensinya sebagai laki-laki: “*Mon kule diundang, ya harus datang, pak. Mon takdhatteng malu saya, Pak.*” Kehadiran Subar di dalam Upacara taropan merupakan penanda bagi keberadaannya sebagai bagian

dari masyarakat Pandalungan Probolinggo. Oleh karena itu, meskipun dalam tataran historis, secara kronologis keberadaan Upacara Taropan tidak dapat ditelusuri dimulai sejak kapan, namun keberadaannya diyakini menjadi tradisi bagi masyarakat Pandalungan Probolinggo. Maka, Upacara Taropan tetap dapat dipahami sebagai bagian dari tradisi yang terdapat dalam kebudayaan masyarakat Pandalungan Probolinggo.

Secara umum, Upacara Taropan memiliki kesamaan dengan Kesenian Remoh Madura. Hal itu tampak pada keberadaan Upacara Taropan yang juga merupakan sebuah upacara yang diadakan untuk memperingati satu hal penting dalam kehidupan seseorang dengan cara mengundang berbagai orang yang telah menjadi anggota sebuah kelompok arisan. Dalam Upacara Taropan, mereka yang diundang adalah mereka yang menjadi anggota dari sebuah kelompok arisan yang mentradisi. Setiap anggota arisan Taropan wajib menghadiri undangan taropan apabila dia diundang.

Hal tersebut sama dengan apa yang tampak pada Kesenian Remoh Madura. Menurut Mubarak (2015: 45) Kesenian Remoh Madura merupakan kesenian yang berkembang di wilayah masyarakat Madura. Kesenian ini ditandai dengan keberadaan komunitas arisan yang disebut To'oto'. Dalam Remoh para undangan merupakan mereka yang telah termasuk dalam komunitas To'oto' atau arisan tradisi. Dalam kesenian tersebut, setiap undangan wajib memasukkan amplop berisi uang ke dalam tempat yang telah disediakan oleh penyelenggara. Pemberian amplop tersebut merupakan bukti penghormatan kepada penyelenggara sekaligus pengikat dan penjaga tali silaturahmi antara anggota arisan. Oleh karena itu, pemberian

amplop merupakan penanda bagi kesetiaan dan penghormatan kepada kelompok atau komunitas.



**Gambar 2**  
**Undangan Upacara Taropan di Kota Probolinggo**  
**(Sumber: Dokumentasi Pribadi Hosnol Wafa)**

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa Upacara Taropan memiliki kesamaan dengan Kesenian Remoh Madura. Hal tersebut tampak pada struktur Upacara Taropan dan Kesenian Remoh Madura. Sebagaimana Kesenian Remoh Madura, Upacara Taropan juga dibagi ke dalam tiga babakan, yakni: dhing-gendhing (pembukaan), dhung-dhung, (tarian penyambut tamu), dan andongan (tamu undangan dipanggil bergilir untuk menari bersama lengger). Pada babakan dhing-

gendhing seorang sinden membawakan tembang-tembang berbahasa Jawa dan Madura secara bergantian. Tujuan dari babakan ini untuk memberi tanda dimulainya Upacara Taropan.



**Gambar 3**  
**Sinden sedang melantunkan tembang pada babakan pembukaan**  
**(Sumber: Dokumentasi Pribadi Hosnol Wafa)**

Setelah dirasa cukup, dan para tamu undangan telah memenuhi tempat Upacara Taropan diadakan, maka dilanjutkan dengan babakan berikutnya yakni penyambutan tamu. Pada penyambutan tamu undangan ini, para undangan diberikan selendang sebagai penanda kesediaan tuan rumah untuk menerima kehadiran atau kedatangan tamu. Itu sebagaimana tampak pada gambar berikut:



**Gambar 4**  
**Babakan Penyambutan Tamu dalam Upacara Taropan**  
**(Sumber: Dokumentasi Pribadi Hosnol Wafa)**

Setelah babakan penyambutan dilakukan, babakan berikutnya yang dilakukan adalah babakan menari bersama lengger atau penari perempuan. Pada babakan ketiga tersebut, seorang tamu yang terkena sampur atau selendang wajib untuk naik ke atas panggung untuk menari bersama lengger. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan penghormatan kepada tuan rumah berkaitan kesiapan si tamu ketika menerima undangan untuk menghadiri Upacara Taropan.

Selain pengaruh budaya Madura, pengaruh budaya Jawa juga tampak pada Upacara Taropan. Penggunaan kostum atau busana Remoh pada sinden yang juga merangkap lengger merupakan penanda adanya pengaruh budaya Jawa pada Upacara Taropan. Menurut Lisbijanto (2013: 37-38) merupakan



**Gambar 5**  
**Babakan menari bersama lengger**  
**(Sumber: Dokumentasi Pribadi Hosnol Wafa)**

jenis tarian yang berasal dari Jawa Timur. Tarian ini digunakan sebagai pembuka bagi kesenian tradisional Ludruk, yakni kesenian drama tradisional yang berasal dari Jombang dan berkembang di Surabaya serta Malang. Berdasarkan pemaparan tersebut tampak bahwa penggunaan busana Remo pada pesinden dan lengger Taropan merupakan penanda adanya pencampuran kebudayaan Jawa pada upacara tersebut.

### **Nilai Kearifan Lokal Upacara Taropan**

Secara umum, setiap wilayah kebudayaan atau setiap masyarakat budaya memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang direpresentasikan atau dimanifestasikan dalam berbagai kesenian dan tradisi yang terdapat di wilayah masyarakat tersebut. Setiap masyarakat

kebudayaan pasti memiliki kearifan lokal yang menjadi pedoman dan pranata kebudayaan. Dalam Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia, kearifan lokal dirumuskan sebagai "nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari." Adapun Sudikan (2004: 21) mendefinisikan kearifan lokal sebagai "kecendekiaan atau kebijaksanaan yang dipahami oleh masyarakat di wilayah kebudayaan tertentu."

Kearifan lokal adalah kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. (Rahyono, 2009:7) Itu berarti bahwa kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut.

Menurut Ayatrohaedi (1986: 40) kearifan lokal secara umum memiliki fungsi sebagai faktor penguatan nilai-nilai tradisi pada masyarakat yang menganutnya. Adapun upaya penguatan tersebut tidak hanya terbatas pada pemberian atas kemampuan bertahan terhadap budaya luar, kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, dan kemampuan mengendalikan budaya, tetapi juga memberi kemampuan pada masyarakat untuk menentukan arah perkembangan budaya

Berdasarkan pemaparan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kearifan lokal merupakan dasar pembentuk bagi kepribadian sebuah masyarakat. Hal tersebut disebabkan



oleh keberadaan kearifan lokal yang berfungsi sebagai penata, pelindung, dan pengelola kehidupan sebuah masyarakat. Itu berarti bahwa perilaku dan nilai yang mengikuti perilaku tersebut dibentuk berdasarkan berbagai hal yang terdapat dalam kearifan lokal. Oleh karena itu, kearifan lokal dapat dipahami sebagai unsur utama pembentuk kepribadian, identitas kultural masyarakat yang berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat dan aturan khusus yang telah teruji kemampuannya sehingga dapat terus bertahan.

### **Upacara Taropan sebagai Penanda Nilai Persaudaraan Masyarakat Pandalungan Probolinggo**

Bagi masyarakat Pandalungan Probolinggo, Upacara Taropan bermakna sebagai penanda nilai persaudaraan. Hal tersebut tampak pada keterikatan antara anggota komunitas Taropan. Menurut Baisuki (Wawancara, 6 Agustus 2019) sebagai anggota Taropan saya harus menghadiri setiap undangan Taropan yang dia terima. Ini merupakan bentuk penghormatan atas nilai persaudaraan yang ada: *"Iyelah, Pak. Sebagai saudara saya harus dhetteng setiap kale ada undangan Taropan. Sebagai sebetuk cara silatuhrahmi pada sedulur."* Hal yang sama juga dituturkan oleh Subar (Wawancara 7 Agustus 2019) bahwa kehadiran dirinya untuk memenuhi undangan merupakan penanda pengakuan persaudaraan pada pemilik hajatan atau pengundang.

Ali (2010) menyatakan bahwa dalam masyarakat Madura terdapat ungkapan budaya berbahasa Madura yang khas, yakni: *oreng dhaddhi taretan, taretan dhaddhi oreng* (orang lain dapat menjadi atau dianggap sebagai saudara sendiri, sedangkan saudara sendiri dapat menjadi atau dianggap sebagai orang lain).

Ungkapan tersebut merupakan penanda keberadaan kesadaran pentingnya nilai persaudaraan bagi masyarakat Madura.

Bagi masyarakat tersebut, bahkan, persaudaraan memiliki makna yang universal. Persaudara tidak selalu dimaknai atau identik dengan hubungan darah kekerabatan, tetapi juga pada pertemanan. Oleh karena, itu dalam budaya Madura, konsep teman merupakan konsep yang mereferensi pada relasi sosial dengan tingkat keakraban paling tinggi.

Upacara Taropan sebagai penanda nilai persaudaraan juga tampak pada penyelenggaraan upacara tersebut ketika pemilik hajatan menyelenggarakan pesta pernikahan. Menurut Baisuki (wawancara, 6 Agustus 2019) penyelenggaraan Upacara Taropan bersamaan dengan penyelenggaraan upacara pernikahan adalah sebuah cara untuk menghilangkan fitnah sekaligus untuk memperkenalkan anggota baru keluarga.

Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Subar (Wawancara, 7 Agustus 2019) bahwa sebuah pernikahan itu harus dikabarkan ke banyak orang. Itu harus dilakukan agar tidak menimbulkan salah paham. Maka, penyelenggaraan Upacara Taropan pada saat Upacara Pernikahan tersebut tidak hanya bermakna sebagai selebrasi saja, tetapi juga sebagai momen penanda keterkaitan dan keterikatan nilai persaudaraan di dalam masyarakat Pandalungan Probolinggo.

Bagi orang Madura, pernikahan adalah sebuah cara membentuk keluarga baru dan menambah persaudaraan baru. Pembentukan dan penambahan tersebut merupakan hal penting karena dapat menambah kerukunan, keteduhan, kenyamanan, dan kesejahteraan bahkan keamanan dalam kehidupan. Oleh karena itu, bagi orang Madura, sebuah pernikahan harus



**Gambar 7**  
**Upacara Taropan yang diselenggarakan bersamaan Upacara**  
**Pernikahan (Sumber: Dokumentasi Pribadi Hosnol Wafa)**

dikabarkan kepada masyarakat luas. Maka, dengan semakin banyak orang yang mengerti dan mengetahui pernikahan tersebut akan banyak doa yang muncul untuk memepererat persaudaraan (Sadik, 2014: 39).

Inilah mengapa Upacar Taropan di Probolinggo juga kerap kali diadakan bersamaan dengan Upacara Pernikahan. Pemilik hajat pernikahan tidak hanya menyelenggarakan pesta pernikahan, tetapi juga Upacara Taropan. Oleh karena itu, di Probolinggo, tidak jarang Upacara Penikahan dilangsungkan sampai larut malam. Hal tersebut disebabkan keberadaan Upacara Taropan yang menjadi acara berikutnya dalam Upacara Pernikahan dilangsungkan setelah Upacara Pernikahan berakhir pada sore hari.



**Gambar 8**  
**Situasi tempat duduk tamu Upacara Taropan setelah Upacara**  
**Penikahan (Sumber: Dokumentasi Pribadi Hosnol Wafa)**

Bagi masyarakat Pandalungan yang memiliki watak egaliter, persaudaraan merupakan hal yang penting. Bagi masyarakat Pandalungan Probolinggo kekuatan nilai persaudaraan dapat membuat keberadaan Probolinggo tidak hanya aman bagi berlangsungnya kehidupan, tetapi juga nyaman bagi kehidupan masyarakatnya. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Badri. Bagi Badri (Wawancara, 1 September 2019) persaudaraan itu tidak bisa ditolak bagi masyarakat Probolinggo. Kesamaan derajat dan kesetiaan atas nilai kebersamaan merupakan hal yang penting bagi keselamatan manusia dalam hidup. Sebagai seseorang yang memeluk agama Islam, persaudaraan itu merupakan hal yang harus dijunjung tinggi. Itu disebabkan persaudaraan berarti menghormati sesama manusia. Ini sebagaimana tampak pada gambar berikut:



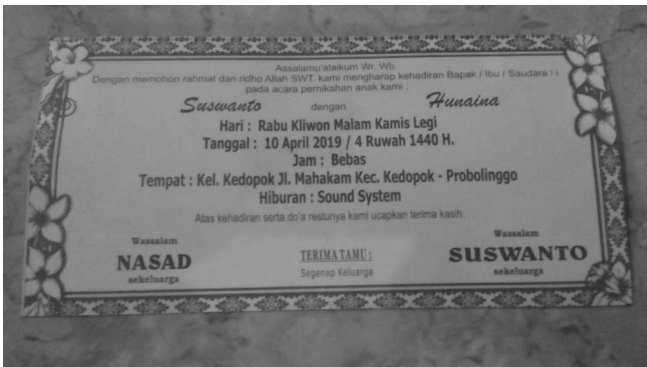
**Gambar 9**  
**Situasi tempat duduk tamu Upacara Taropan**  
**(Sumber: Dokumentasi Pribadi Hosnol Wafa)**

### **Upacara Taropan sebagai Penanda Nilai Relijiusitas Masyarakat Pandalungan Probolinggo**

Masyarakat Pandalungan Probolinggo dikenal sebagai masyarakat yang teguh memegang nilai-nilai keagamaan dalam laku kehidupan sehari-hari. Sutarto (2006) menyatakan bahwa masyarakat Pandalungan adalah masyarakat pendukung Islam kultural. Bagi masyarakat tersebut, Islam bukan hanya sebuah agama ilahiah, tetapi juga penuntun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini tampak pada keoercayaan masyarakat tersebut pada keberadaan tokoh-tokoh agama, khususnya Islam, dalam memberi arahan dan pandangan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Upacara Taropan di Probolinggo, nilai religiusitas masyarakat Pandalungan Probolinggo juga tampak pada penggunaan songkok atau peci. Di masyarakat Pandalungan

Probolinggo, songkok atau peci bukanlah sekedar benda penutup kepala, atau alat yang digunakan manusia untuk melindungi kepala dari terik panas atau dingin udara. Di masyarakat tersebut, songkok atau peci atau kopiah menjadi penanda kualitas keagamaan seseorang. Oleh karena itu, keberadaan songkok menjadi simbol nilai relejiusitas seseorang. Ini sebagaimana tampak pada gambar berikut:



**Gambar 10**  
**Foto Undangan Taropan di Desa Kedupok, Kota Probolinggo**  
**(Sumber: Dokumentasi Pribadi Hosnol Wafa)**

Upacara Taropan dapat dikatakan merupakan upacara yang memiliki nilai materialitas. Hal tersebut tampak pada pemberian amplop berisi sejumlah uang kepada pemilik hajatan. Namun, materialisme tersebut menjadi terdistorsi dan terseimbangkan dengan hadirnya songkok sebagai simbol kesadaran ketuhanan masyarakat Pandalungan Probolinggo. Hal tersebut sebagaimana tampak Gambar 10 di atas. Pada gambar tersebut, undangan acara yang bersifat keduniawian seakan kehilangan maknanya ketika disandingkan dengan foto pemilik hajatan yang menggunakan songkok.



**Gambar 11**  
**Foto Undangan Taropan di Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo**  
**(Sumber: Dokumentasi Pribadi Hosnol Wafa)**

Penggunaan songkok oleh pemilik hajatan seakan menandai keberadaan Upacara Taropan bukanlah sekedar upacara yang bersifat hedon atau keduniawian. Penggunaan songkok pada foto tersebut yang sebagaimana dilakukan oleh pemilik hajatan mengonstruksi makna bahwa Upacara Taropan yang

diselenggarakannya merupakan upaya untuk mempersatukan sesama umat Islam. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Subar (Wawancara, 7 Agustus 2019) bahwa menghadiri Upacara Taropan adalah upaya untuk kembali tali silaturahmi kepada sesama manusia. Perekatan persaudaraan merupakan hal penting dalam Islam: *"Mon oreng Islam, Pak, Hablum minnanas itu penting. Eling kepada manusia itu sama dengan eling ke Tuhan."*

Selain penggunaan songkok, upaya untuk menghadirkan Upacara Taropan sebagai sebuah tradisi yang tetap berpegang pada nilai keislaman atau keagamaan juga tampak pada pemberian nama bulan yang mengikuti nama bulan dalam Islam kultural, yakni Ruwah. Bagi orang Jawa, bulan Ruwah merupakan bulan yang sakral dan penuh nilai spiritualitas. Menurut Geertz (2013: 104) kata selama bulan Ruwah orang Jawa melakukan ritual agama yang bertujuan untuk mendoakan sanak saudaranya yang telah meninggal. Oleh karena itu, di bulan itu orang Jawa bisanya melakukan penyucian diri agar doa yang disampaikan dapat terkabul.

Penyematan penanda bulan yang diambil dari bahasa Jawa Ruwah tidak hanya menandai keberadaan Upacara Taropan sebagai upacara yang berbentuk hibrida. Dalam arti, bahwa Upacara Taropan tidak hanya mengakomodasi kebudayaan Madura saja, tetapi nilai-nilai kearifan lokal yang beredar di masyarakat Jawa pun diakomodasi, bahkan dipadupadankan dengan kebudayaan Madura. Ini menjadikan Upacara Taropan juga memiliki nilai religiusitas dan spiritualitas sebagaimana pemahaman orang Jawa terhadap makna bulan Ruwah. Ini mengongstruksi makna bahwa Upacara Taropan sebagai sarana ibadah yang bertujuan mengirimkan doa untuk keselamatan sanak saudara dan leluhur.



Penghargaan kepada sesama manusia yang disandarkan pada penghormatan nilai ketuhanan merupakan dasar filosofis bagi penerimaan tamu di Upacara Taropan. Dalam Upacara Taropan, setiap tamu undangan dijamu sebagai seseorang yang penting. Oleh karena itu berbagai hidangan disuguhkan kepada tamu yang hadir. Ini merupakan representasi dari kesadaran nilai ketuhanan yang dimiliki oleh masyarakat Pandalungan Probolinggo. Penghormatan kepada sesama manusia adalah bentuk ibadah kepada Tuhan atau Allah SWT. Ini sebagaimana tampak pada gambar berikut:



**Gambar 12**  
**Suguhan untuk para tamu di Upacara Taropan**  
**(Sumber: Dokumentasi Pribadi Hosnol Wafa)**

Pemberian suguhan yang memadai, bahkan berlebih merupakan bentuk rasa syukur pemilik hajatan atas kehadiran para tamu. Ini bukanlah upaya untuk memamerkan kekayaan, tetapi lebih pada upaya untuk membuat para tamu merasa dihormati sehingga dapat memberikan doa yang baik bagi pemilik hajatan Upacara Taropan. Oleh karena, para pemilik hajatan, biasanya, akan memberikan secara maksimal segala materi yang dia miliki demi untuk mendapatkan berkah dari para tamu yang diundangnya.

## **SIMPULAN**

Masyarakat pandalungan Probolinggo merupakan masyarakat yang khas dan unik. Hal tersebut tampak pada kultur hibrida yang terbentuk akibat pencampuran budaya Jawa dan Madura yang berkembang di wilayah tersebut. Upacara Taropan merupakan penanda kekhasan tradisi yang terdapat dalam masyarakat pandalungan Probolinggo. Hal tersebut disebabkan keberadaan upacara tersebut yang merupakan manifestasi dari adanya pengaruh budaya Jawa dan Madura yang membentuk kebudayaan masyarakat pandalungan Probolinggo. Sebagai sebuah bagian dari tradisi masyarakat pandalungan Probolinggo, Upacara Taropan merepresentasikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat pandalungan Probolinggo yang berupa nilai-nilai persaudaraan dan nilai-nilai religiusitas. Nilai persaudaraan yang terdapat dalam upacara tersebut merupakan manifestasi dari sifat keterbukaan dan egaliter dalam masyarakat pandalungan probolinggo. Adapun nilai religiusitas yang terdapat dalam upacara Taropan merupakan manifestasi dari sifat masyarakat Probolinggo yang selalu mentaati nilai-nilai keagamaan, khususnya nilai-nilai keagamaan Islam●

# BAB IX

## MODEL PENELITIAN SEMIOTIKA BUDAYA

### REPRESENTASI PROBOLINGGO DALAM SENI PERTUNJUKAN KELABANG SONGO

#### PENDAHULUAN

Sebuah karya seni tidak saja dapat dipahami sebagai hasil cipta manusia yang bernilai estetika, tetapi juga dapat dipahami sebagai dokumen kebudayaan. Hal tersebut disebabkan dalam setiap karya seni terdapat nilai-nilai kebudayaan. Setiap seniman merupakan anggota sebuah masyarakat. Sebagai anggota sebuah masyarakat, setiap seniman tidak dapat melepaskan diri dari kebudayaan yang dimiliki oleh sebuah masyarakat tersebut. Kebudayaan tersebut memberikan kontribusi bagi pembentukan pengetahuan yang memungkinkan seorang seniman melakukan tindak penciptaan karya seni. Oleh karena itu, tidak ada karya seni yang tercipta dari kekosongan budaya, dan juga tidak ada karya seni yang tidak memuat nilai-nilai kebudayaan sebuah masyarakat.

Keberadaan nilai-nilai kebudayaan yang terdapat di setiap karya seni menjadikan sebuah karya seni dapat dipahami sebagai manifestasi sekaligus representasi sebuah kebudayaan

dan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana juga pada seni pertunjukan musik patrol *Kelabang Songo* yang populer di Probolinggo. Sebagai sebuah karya seni berjenis seni pertunjukan musik patrol, *Kelabang Songo* juga merupakan manifestasi sekaligus representasi dari nilai-nilai kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat Probolinggo. Itu berarti bahwa dalam seni pertunjukan tersebut terdapat nilai-nilai kebudayaan masyarakat Probolinggo.

Menurut Tjahyadi dkk (2020) masyarakat Probolinggo merupakan masyarakat yang dihidupi oleh kebudayaan Pandalungan. Hal tersebut disebabkan tidak hanya karena wilayah tempat tinggal masyarakat tersebut yang berada di wilayah masyarakat Pandalungan, tetapi juga karena nilai-nilai kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat Probolinggo merupakan produk dari hibridasi antara kebudayaan Jawa dan Madura. Oleh karena itu, dalam kebudayaan Pandalungan Probolinggo tidak hanya nilai-nilai kebudayaan Jawa saja yang dapat dijumpai jejaknya, tetapi juga nilai-nilai yang berasal dari kebudayaan Madura.

Secara definitif, kebudayaan Pandalungan dapat dipahami sebagai sebetuk pola pikir, perilaku, pandangan hidup, dan benda-benda kebudayaan yang menyebar dan dimiliki oleh masyarakat hidup kawasan di wilayah pantai utara dan bagian timur Provinsi Jawa Timur yang mayoritas penduduknya berlatar belakang budaya Jawa dan Madura. Kebudayaan ini dapat dikategorikan sebagai kebudayaan berjenis hibrida. Hal tersebut karena kebudayaan Pandalungan merupakan sebetuk kebudayaan yang tercipta akibat adanya perpaduan antara budaya Jawa dan Madura yang ada dan berkembang, serta

lestari di wilayah wilayah pantai utara dan bagian timur Provinsi Jawa Timur (Juniarta dkk, 2013; Raharjo, 2006; Setiawan, 2016; Sutarto, 2006).

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap identitas Probo-linggo yang direpresentasikan dalam seni pertunjukan musik patrol *Kelabang Songo*. Menurut Barker (2014: 255) representasi dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan simbolisme yang mencerminkan dunia objek yang independen. Berdasarkan pendefinisian tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa representasi merupakan sebuah praktik, sebuah kegiatan, atau suatu upaya yang melibatkan hal-hal atau elemen-elemen yang dapat membuat simbolisasi atas objek-objek yang berdiri sendiri. Adapun kegiatan, aktivitas, atau upaya pembuatan simbol tidak dapat dilepaskan dari bahasa atau tanda. Oleh karena itu, representasi merupakan sebuah praktik kebahasaan yang berusaha menghubungkan manusia dengan hal di luar manusia.

Pemahaman Barker tersebut memiliki persamaan dengan pemahaman Stuart Hall mengenai representasi. Hall (1997: 15) mendefinisikan representasi sebagai penggunaan bahasa untuk menyatakan makna atau sebuah perwakilan dunia penuh makna kepada orang lain. Definisi ini merupakan pemahaman dasar mengenai konsep representasi. Pendefinisian tersebut diperluas pemahamannya oleh Hall dalam kaitannya dengan studi kebudayaan. Hall (1997: 15) melihat bahwa representasi sebagai sebuah konsep yang menghubungkan bahasa dan makna dengan kebudayaan. Bahkan representasi merupakan bagian esensial dari pemroduksian dan penyebaran kebudayaan.

Upaya untuk mengungkap keberadaan representasi Pendalungan dalam seni pertunjukan musik patrol *Kelabang*

*Songo* tidak dapat dilakukan tanpa pengungkapan makna simbol yang terdapat dalam seni pertunjukan musik patrol tersebut. Adapun teori yang digunakan sebagai landasan analisis untuk mengungkap makna simbol dalam artikel ini adalah teori semiotika yang dipelopori oleh Charles Sanders Peirce. Menurut Pierce (dalam Vera, 2014: 2) semiotika merupakan ilmu atau kajian tentang tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda. Semiotika meliputi kajian tentang cara berfungsi tanda, hubungan tanda dengan tanda-tanda lain, pengiriman dan penerima tanda oleh penggunanya.

**Tanda** bukan suatu jenis fenomena di samping objek-objek nonsemiotik lainnya. Artinya bahwa seluruh alam semesta ini penuh tanda dan disusun atas tanda-tanda (Pierce dalam Noth, 2006:41). Tanda membuat segala hal yang ada di alam semesta dapat dimaknai dan dipahami manusia. Tanda merupakan wakil yang menjelaskan sesuatu. Tanda menunjuk pada seseorang, yakni, menciptakan di benak orang tersebut suatu tanda yang setara, atau suatu tanda yang lebih berkembang, tanda yang diciptakannya dinamakan interpretant dari tanda pertama. Tanda itu menunjukkan sesuatu, yakni objeknya. (Pierce dalam Vera, 2014: 21).

Sebagai wakil sesuatu, tanda berfungsi menunjukkan sesuatu. Artinya tanda membuat seseorang memahami sesuatu yang berada di lingkungannya. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan Vera (2014: 21) berikut: "tanda tidak dapat mengungkapkan sesuatu, tanda hanya berfungsi menunjukkan, sang penafsirlah yang memaknai berdasarkan pengalamannya masing-masing."

Semiotik Pierce merupakan ilmu tanda yang bersifat **triadik**.

Hal tersebut disebabkan oleh keberadaan tanda dipahami oleh Pierce sebagai sesuatu yang tersusun atas tiga unsur, yakni representamen, objek, dan interpretan. Ketiga unsur tersebut menyusun tanda. Model triadik dari Pierce sering juga disebut sebagai "*triangle meaning semiotics*" atau dikenal dengan teori segitiga makna.

Model triadik tanda dalam teori semiotik Pierce pertama adalah Representament. **Representament** adalah unsur tanda yang mewakili sesuatu (Zaimar, 2008: 4). Menurut Pierce (dalam Noth, 2006: 42) representamen merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut "objek yang dapat dirasakan" yang berfungsi sebagai tanda. Tugas representamen menyampaikan kepada pikiran seseorang tentang sesuatu dari tanda adanya sesuatu yang lain (Noth, 2006: 42).

**Objek** merupakan istilah kedua yang terdapat dalam model triadik tanda Pierce. Objek adalah sesuatu yang diwakili (Zaimar, 2008: 4). Bagi Pierce (dalam Noth, 2006: 42) objek merupakan sesuatu yang diwakili tanda. Tanpa objek tanpa tidak dapat menjadi wakil sesuatu. Tanpa tanda, objek tidak akan dipahami.

Adapun Unsur tanda ketiga dalam model triadik tanda Pierce adalah interpretant. **Interpretant** merupakan produk yang dihasilkan oleh hubungan, atau pembangunan relasi, antara representamen dengan objek (Vera, 2014: 22). Interpretan merupakan tanda yang tertera di dalam pikiran si penerima setelah melihat representament (Zaimar, 2008: 2). Interpretant merupakan hasil interpretasi dari seseorang yang menerima representament (Noth, 2006: 43).

## **METODE**

Metode yang digunakan sebagai landasan kinerja analisis dalam penelitian ini adalah kualitatif interpretatif. Pemilihan jenis penelitian tersebut karena dalam penelitian ini data-data kualitatif yang didapatkan berusaha untuk ditafsirkan atau diinterpretasi agar makna ditemukan (Denzin dan Lincoln, 2009: 2-3). Objek penelitian ini adalah seni pertunjukan musik patrol *Kelabang Songo*. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data visual dan verbal bermakna yang terdapat dalam seni pertunjukan musik patrol *Kelabang Songo*. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui teknik studi pustaka, observasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada tahapan analisis makna tanda yang terdapat dalam teori semiotika Charles Sanders Peirce. Adapun teknik penyajian data, dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Barker (2014: 255) representasi dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan simbolisme yang mencerminkan dunia objek yang independen. Berdasarkan pendefinisian tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa representasi merupakan sebuah praktik, sebuah kegiatan, atau suatu upaya yang melibatkan hal-hal atau elemen-elemen yang dapat membuat simbolisasi atas objek-objek yang berdiri sendiri. Adapun kegiatan, aktivitas, atau upaya pembuatan simbol tidak dapat dilepaskan dari bahasa atau tanda. Oleh karena itu, representasi merupakan sebuah praktik kebahasaan yang berusaha menghubungkan manusia dengan hal di luar manusia.



Pemahaman Barker tersebut memiliki persamaan dengan pemahaman Stuart Hall mengenai representasi. Hall (1997: 15) mendefinisikan representasi sebagai penggunaan bahasa untuk menyatakan makna atau sebuah perwakilan dunia penuh makna kepada orang lain. Definisi ini merupakan pemahaman dasar mengenai konsep representasi. Pendefinisian tersebut diperluas pemahamannya oleh Hall dalam kaitannya dengan studi kebudayaan. Hall (1997: 15) melihat bahwa representasi sebagai sebuah konsep yang menghubungkan bahasa dan makna dengan kebudayaan. Bahkan representasi merupakan bagian esensial dari pemroduksian dan penyebaran kebudayaan.

*Kelabang Songo* tidak saja merupakan sebuah kelompok kesenian yang ada di Probolinggo, tetapi juga nama jenis seni pertunjukan musik patrol yang ada dan berkembang di Probolinggo. Sebagai sebuah karya seni, *Kelabang Songo* merupakan seni pertunjukan yang berakar pada seni musik patrol. Menurut Sutarto (2010) musik patrol merupakan salah satu genre dalam seni musik tradisional yang instrumen utamanya berupa alat-alat musik dari yang terbuat dari bahan dasar bambu. Secara historis, seni musik ini lahir karena terinspirasi dari kegiatan jaga. Seni musik ini berkembang di wilayah kebudayaan Pandalungan yang meliputi wilayah Probolinggo, Jember, Situbondo, Lumajang, dan Bondowoso. malam yang dilakukan para peronda. Kesenian ini memiliki irama yang sangat dinamik.

*Kelabang Songo*, sebagaimana telah dijelaskan di atas, merupakan nama jenis seni pertunjukan musik patrol yang berkembang di Probolinggo. Menurut Tjahyadi dkk (2020) dalam tataran administrasi pemerintahan Indonesia, Probolinggo

merupakan wilayah administrasi pemerintahan yang berbentuk Kota dan Kabupaten. Kota Probolinggo merupakan wilayah administrasi pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Walikota. Adapun Kabupaten Probolinggo merupakan wilayah administrasi pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Bupati. Namun, apabila dilihat dalam tataran geografi, antara wilayah Kota dan Kabupaten Probolinggo terdapat pembatasan wilayah yang unik. Itu tampak pada keberadaan Kota Probolinggo yang berada di tengah wilayah kekuasaan Kabupaten Probolinggo.

Penempatan wilayah Kota Probolinggo di tengah wilayah Kabupaten Probolinggo menciptakan adanya persinggungan yang kontinual antara masyarakat Kota Probolinggo dengan masyarakat Kabupaten Probolinggo. Persinggungan tersebut berdampak pada saling keterpengaruhan budaya antara masyarakat yang tinggal di Kota Probolinggo dengan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut menjadikan karakteristik antara masyarakat Kota dan Kabupaten Probolinggo memiliki kesamaan.

Sebagai karya seni yang merupakan bagian dari kebudayaan Probolinggo, *Kelabang Songo* tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan pendalungan yang berkembang di masyarakat Probolinggo. Sebagai jenis seni pertunjukan musik patrol, *Kelabang Songo* memuat simbol-simbol bermakna. Simbol-simbol tersebut tidak hadir tanpa adanya pengaruh dari kebudayaan Pendalungan yang terdapat di masyarakat Probolinggo. Hal tersebut sebagaimana tampak pada penggunaan kostum para pemain seni pertunjukan musik patrol tersebut.

**Tabel 1:**  
**Analisis Makna Kostum Pemain Kelabang Songo**

<p><b>Representamen</b></p>	
<p><b>Objek</b></p>	<p>Sebuah kelompok kesenian yang sedang memainkan seni perunjukan musik patrol (<i>Kelabang Songo</i>) sedang berjalan di sebuah jalan raya. Para pemain kelompok kesenian tersebut ada yang mengenakan kostum pakaian tradisi Madura, dan ada juga yang mengenakan kostum pakaian wayang orang tokoh Gatotkaca.</p>
<p><b>Interpretan</b></p>	<p>Para pemain seni pertunjukan musik patrol tersebut memperlihatkan adanya pecampuran budaya Madura dan Jawa pada kostum yang dikenakan. Para pemain tersebut merasa nyaman saja dengan perbedaan asal tradisi kostum yang dikenakan.</p>
<p><b>Representamen</b></p>	

Berdasarkan **Tabel 1** dapat dipahami bahwa masyarakat Probolinggo adalah masyarakat yang menerima budaya Jawa dan Madura secara bersamaan. Unsur penerimaan budaya Jawa oleh masyarakat Probolinggo ditampakkan dengan penggunaan kostum Gatotkaca oleh salah satu pemain *Kelabang Songo*. Gatotkaca merupakan tokoh yang biasa dihadirkan dalam seni pertunjukan tradisional Jawa yang disebut Wayang orang.

Menurut Narimo & Wiweko (2017) Wayang Orang merupakan nama seni pertunjukan dramatis yang berkembang di masyarakat Jawa. Seni pertunjukan tersebut merupakan bentuk personifikasi dari seni pertunjukan Wayang Kulit yang telah populer di masyarakat Jawa terlebih dulu. Adapun Wayang Orang menampilkan kisah-kisah pewayangan seperti Ramayana, Mahabarata, ataupun Wayang Purwa. Salah satu tokoh yang sering ditampilkan di pertunjukan tersebut adalah Gatotkaca.

Selain penerimaan atas tradisi yang berakar pada budaya Jawa, masyarakat Probolinggo juga menerima tradisi yang berasal dari kebudayaan Madura. Hal tersebut tampak pada pemilihan kostum seni pertunjukan musik patrol Kelabang Songo yang berasal dari tradisi Madura. Sebagaimana tampak pada Tabel 1. Pada tabel tersebut tampak adanya seorang pemain Kelabang Songo yang mengenakan pakaian tradisional Madura, atau yang biasa dikenal dengan nama *Pesa'an*.

Menurut Rakaditya (2018) *Pesa'an* merupakan pakaian adat masyarakat Madura. Di masyarakat Madura, baju *Pesa'an* digunakan oleh kaum laki-laki dalam aktivitas sehari-hari. Pakaian tersebut memiliki struktur pakaian luar, pakaian dalam, dan celana, serta penutup kepala yang disebut *odheng*. *Pesa'an* selalu berwarna hitam dan memiliki ukuran longgar di semua

bagian. Pakaian tersebut terdiri atas atasan dalam berupa kaos berwarna belang merah putih, dan luaran berwarna hitam. Selain atasan, pakaian tersebut juga memiliki bawahan berupa celana *gomboran* berwarna hitam polos dengan ukuran besar. Adapun pelengkap dari baju Pesa'an adalah *odheng*, yakni penutup kepala berupa balutan kain diatas kepala. Umumnya, pengguna pakaian tersebut juga menghiasinya dengan clurit, yang merupakan senjata adat orang Madura, sebagai atribut pelengkap.

Berdasarkan penjelasan di atas tampak bahwa seni pertunjukan musik patrol Kelabang Songo berusaha merepresentasikan Probolinggo sebagai sebuah wilayah kebudayaan yang menerima tradisi kebudayaan Jawa dan Madura secara sekaligus. Hal tersebut tampak pada pengakomodasian unsur kebudayaan Jawa dan Madura dalam seni pertunjukan tersebut. Dalam seni pertunjukan tersebut, kebudayaan Jawa dan Madura dinegosiasikan, sehingga terbentuk entitas kebudayaan yang bersifat hibrida.

Kelabang Songo merupakan seni pertunjukan berjenis seni pertunjukan musik patrol. Menurut Ariman (Wawancara, 19/08/2020) musik patrol merupakan sebetuk kesenian yang populer dan mentradisi di masyarakat Probolinggo. Hal tersebut karena hampir di setiap perayaan penting, masyarakat Probolinggo menghadirkan seni musik tersebut. Itu sebagaimana pernyataan Bapak Ariman berikut.

*“Orang Probolinggo itu suka sekali sama musik patrol, Mas. Hampir di semua perayaan musik patrol itu ada. Kalo tidak ada rasanya kurang afdol. Mungkin, karena orang Probolinggo itu banyak yang santri. Soalnya, musik ini juga dipakai untuk*

*membangunkan orang sahur. Jadi, kalau puasa pasti banyak anak-anak yang kothekan, main musik patrol di sini.”*

Namun, musik patrol yang dipertunjukkan dalam Kelabang Songo adalah musik patrol yang tidak hanya menggunakan alat musik berbasis bambu, tetapi juga alat musik tabuh yang terdapat dalam gamelan Jawa. Menurut Ariman (wawancara, 19/08/2020) Kelabang Songo merupakan seni musik yang mencampurkan tradisi Madura dan Jawa. Oleh karena itu, musik patrol Kelabang Songo juga menggunakan alat-alat musik yang terdapat dalam gamelan Jawa. Itu sebagaimana tampak pada tabel berikut.

**Tabel 2**  
**Analisis Makna Alat Musik Kelabang Songo**

<p><b>Representamen</b></p>	
<p><b>Objek</b></p>	<p>Seorang pemain musik Kelabang Songo sedang memainkan alat musik <i>Peking</i> sambil duduk di panggung berjalan. Di sebelahnya, juga tampak seorang pemusik Kelabang Songo sedang memainkan alat musik <i>Peking</i>.</p>

<b>Interpretan</b>	Terdapat alat musik dalam tradisi gamelan Jawa yang digunakan dalam seni pertunjukan musik patrol Kelabang Songo. Hal tersebut memperlihatkan adanya upaya untuk menegosiasikan musik tradisi Jawa dengan tradisi musik patrol yang berkembang di wilayah-wilayah yang terdapat kebudayaan Madura.
<b>Representamen</b>	
<b>Objek</b>	Foto yang memperlihatkan keberadaan alat musik yang digunakan oleh seni pertunjukan musik patrol <i>Kelabang Songo</i> , yang terdiri atas peking, dan <i>tong-tong</i> atau <i>dhung-dhung</i> . Alat musik tersebut ditempatkan bersampingan.
<b>Interpretan</b>	Terdapat pencampuran unsur musik Jawa dan Madura dalam seni pertunjukan musik patrol <i>Kelabang Songo</i> . Adapun penempatan alat musik tersebut diletakkan sejajar. Itu memperlihatkan adanya upaya penegosiasian budaya Jawa dan Madura dalam seni pertunjukan musik patrol tersebut.

Selain pada penggunaan kostum, identitas hibrida Jawa-Madura Probolinggo juga ditampakkan pada pemilihan instrumen atau alat musik yang digunakan oleh seni pertunjukan musik patrol *Kelabang Songo*. Salah satu alat musik yang terdapat dalam tradisi musik gamelan Jawa yang digunakan dalam seni pertunjukan musik patrol tersebut adalah *Peking*.

Secara umum, gamelan merupakan alat musik tradisional yang terdapat dalam kebudayaan Jawa. Menurut Kristanto (2019) gamelan merupakan alat musik tradisional yang terdapat dalam kebudayaan Jawa. Gamelan tersusun atas alat-alat musik tradisional Jawa bagian-bagiannya berupa alat perkusi yang dibuat dari perunggu (*gangsra*). Alat musik tersebut menjadi bagian sejak lama. Bahkan identik dengan kebudayaan Jawa.

Namun, seni pertunjukan musik patrol *Kelabang Songo*, tidak hanya menggunakan alat musik dari tradisi kebudayaan Jawa saja. Seni pertunjukan tersebut juga menggunakan alat musik yang berasal dari tradisi kebudayaan Madura, yakni *tong-tong* atau *dhung-dhung*. Menurut Setiawan (2014) *tong-tong* atau *dhung-dhung* merupakan alat musik yang terdapat dalam tradisi kesenian musik tradisional Madura. Alat musik tersebut termasuk ke dalam jenis alat musik perkusi. Nama alat musik tersebut diambil berdasarkan tiruan bunyi yang ditimbulkan ketika instrumen tersebut dibunyikan atau dimainkan, yakni *tong tong tong*.

Berdasarkan penjelasan di atas tampak bahwa Probolinggo direpresentasikan oleh seni pertunjukan musik patrol *Kelabang Songo* sebagai wilayah kebudayaan yang memiliki akar tradisi Jawa dan Madura. Itu mengidentifikasi Probolinggo sebagai wilayah kebudayaan yang berwatak hibrida. Dalam kebudayaan hibrida, unsur kebudayaan asal diletakkan sejajar dan dinegosiasikan sehingga dapat memproduksi bentuk kebudayaan yang berbeda dengan asalnya. Meskipun, kebudayaan baru yang terbentuk secara hibrida tersebut masih dapat dirujuk atau dikenali kebudayaan asalnya. Namun, kebudayaan hibrida dapat hadir sebagai kebudayaan yang otonom.

Hibridasi kebudayaan Jawa dan Madura yang terdapat dalam kebudayaan Probolinggo, mengidentifikasikan kebudayaan Penda-



lungan sebagai identitas Probolinggo. Dalam teori kebudayaan, kebudayaan yang terbentuk akibat adanya perpaduan antara kebudayaan Jawa dan Madura disebut kebudayaan Pandalungan. Secara definitif, kebudayaan Pandalungan dapat dipahami sebagai sebetuk kebudayaan yang berkembang di kawasan wilayah pantai utara dan bagian timur Provinsi Jawa Timur. Kebudayaan ini umumnya dihidupi oleh masyarakat yang mayoritas penduduknya berlatar belakang budaya campuran antara Jawa dan Madura. Dikatakan demikian sebab kebudayaan Pandalungan merupakan kebudayaan yang tercipta akibat dari adanya pencampuran budaya antara budaya Jawa dan Madura. Oleh karena itu, budaya Pandalungan dapat juga dikategorikan sebagai kebudayaan berjenis hibrida (Juniarta dkk, 2013; Raharjo, 2006; Setiawan, 2016; Sutarto, 2006; Tjahjadi dkk, 2020).

Sebagai masyarakat yang terbentuk karena perpaduan budaya, kebudayaan memuat nilai-nilai kemasyarakatan yang berwatak agraris-egaliter. Ini tampak pada keberadaan masyarakat tersebut yang berada pada wilayah yang didominasi oleh pedesaan dan watak keterbukaan masyarakat tersebut pada berbagai hal yang dating dari luar. Keterbukaan atau egaliter tersebut tampak pada penggunaan bahasa yang kasar oleh masyarakat Pandalungan. Penggunaan bahasa yang tidak berdasar pada tingkatan merupakan bukti adanya kesadaran kesamaan hak di dalam masyarakat tersebut (Juniarta dkk, 2013; Raharjo, 2006; Setiawan, 2016; Sutarto, 2006).

Watak egaliter yang terdapat dalam kebudayaan Pandalungan tampak dalam etika sosial yang terdapat di masyarakat Pandalungan. masyarakat Pandalungan secara umum memiliki konsep tata krama, sopan-santun, atau budi pekerti yang berakar

pada nilai-nilai yang diusung dari dua kebudayaan yang menjadi dasar pembentuknya, yakni kebudayaan Jawa dan Kebudayaan Madura. Ini menjadikan kebudayaan Pandaluangan menjadi sebuah kebudayaan yang unik dan khas (Juniarta dkk, 2013; Raharjo, 2006; Setiawan, 2016; Sutarto, 2006).

Kelabang Songo merepresentasikan Probolinggo sebagai wilayah kebudayaan yang beridentitas Pendalungan. Hal tersebut tampak adanya pencampuran budaya Jawa dan Madura dalam seni pertunjukan tersebut tidak hanya melalui kostum yang digunakan dalam seni pertunjukan tersebut. Namun, juga pada pemilihan alat musik yang digunakan dalam seni pertunjukan tersebut.

## **SIMPULAN**

Kajian yang dilakukan memperlihatkan bahwa Kelabang Songo dapat dipahami sebagai nama kelompok kesenian yang terdapat di Probolinggo, dan nama seni pertunjukan musik patrol yang berkembang di Probolinggo. Sebagai kelompok kesenian, Kelabang Songo dipimpin oleh Bapak Ariman. Adapun sebagai genre seni pertunjukan musik patrol, Kelabang Songo dapat dikategorikan sebagai seni pertunjukan musik patrol modifikasi. Hal tersebut karena adanya penggunaan alat musik yang tidak hanya berasal dari tradisi musik patrol, tetapi juga alat musik yang berasal dari tradisi musik gamelan.

Adapun dalam tataran representasi, Kelabang Songo merepresentasikan Probolinggo sebagai wilayah kebudayaan yang beridentitas Pendalungan. Hal tersebut tampak adanya pencampuran budaya Jawa dan Madura dalam seni pertunjukan tersebut tidak hanya melalui kostum yang digunakan dalam seni

pertunjukan tersebut. Namun, juga pada pemilihan alat musik yang digunakan dalam seni pertunjukan tersebut, yang tidak hanya alat musik yang mengidentifikasikan kebudayaan Jawa, tetapi juga alat musik yang merepresentasikan kebudayaan Madura. Oleh karena itu, Probolinggo direpresentasikan sebagai sebuah wilayah kebudayaan yang berjenis hibrida dalam *Kelabang Songo*.●

# BIODATA PENULIS

**INDRA TJAHYADI** Lahir di Jakarta. Dosen Program Studi Sastra Inggris Fakultas Sastra dan Filsafat Universitas Panca Marga Probolinggo. Menyelesaikan pendidikan pascasarjananya di Magister Kajian Sastra dan Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini bersama Hosnol Wafa dan Moh. Zamroni, serta Sri Andayani sedang melakukan penelitian mengenai kebudayaan Pandalungan di Probolinggo.

**SRI ANDAYANI.** Lahir di Probolinggo. Dosen Program Studi Bahasa Inggris Fakultas Sastra dan Filsafat Universitas Panca Marga Probolinggo. Menyelesaikan pendidikan sarjananya di Prodi Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Airlangga dan pendidikan pascasarjanya di Magister Kajian Linguistik Deskriptif Universitas Sebelas Maret. Tertarik melakukan penelitian dan kajian budaya dan bahasa lokal Indonesia. Kekinian bersama Adi Sutrisno dan Indra Tjahyadi sedang melakukan penelitian tentang kebudayaan dan bahasa lokal di Pulau Bawean

**HOSNOL Wafa.** Lahir di Di Probolinggo. Dosen Program Studi Sastra Inggris Fakultas Sastra dan Filsafat Universitas Panca Marga Probolinggo. Menyelesaikan pendidikan pascasarjananya di Program Pascasarjana Prodi Linguistik Penerjemahan UNS Surakarta. Saat ini, selain mengajar, juga aktif melakukan penelitian mengenai kebudayaan Pandalungan di Probolinggo.